



TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**STRATEGI PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN
UTARA DALAM MENARIK INVESTOR DALAM
DAN LUAR NEGERI**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

INTAN ROKHIMAH

NIM. 501574961

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

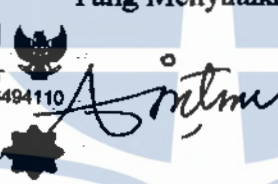
2019

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul “Strategi Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Utara dalam Menarik Investor Dalam dan Luar Negeri” adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Tarakan, 14 Januari 2019
Yang Menyatakan,

(INTAN ROKHIMAH)
NIM. 501574961

ABSTRAK

STRATEGI PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA DALAM MENARIK INVESTOR DALAM DAN LUAR NEGERI

Intan Rokhimah

intanrokhimah1108@gmail.com

Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan guna menganalisis mengenai strategi penanaman Modal Provinsi Kalimantan Utara dalam Menarik Investor Dalam dan Luar Negeri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian terdiri dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara sebagai informan kunci (*key informan*), Sekretaris Dinas, Para Kepala Bidang serta Para Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan orang-orang yang dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan investasi di Provinsi Kalimantan Utara. Instrumen penelitian yang digunakan adalah (a) Pedoman Wawancara, (b) Panduan Observasi berupa pengamatan terhadap obyek yang diteliti, dan (c) Dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan observasi lapangan.

Hasil penelitian menunjukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan strategi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu melalui peningkatan kualitas dan keterampilan masyarakat melalui pelatihan, melakukan berbagai promosi investasi baik di dalam negeri dan luar negeri, seperti menyelenggarakan seminar dan pertemuan forum investasi, berupaya untuk melakukan percepatan pembangunan di bidang pembangunan infrastruktur yang menunjang investasi daerah. Dalam praktiknya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara masih belum efektif dalam penggunaan IT. Kualitas pelayanan perizinan masih buruk, prosedur pelayanan perizinan masih rumit dan membutuhkan waktu lama.

Kata kunci: investasi, pelayanan, strategi

ABSTRACT

NORTH KALIMANTAN INVESTMENT STRATEGY IN INTERESTING IN AND FOREIGN INVESTORS

Intan Rokhimah
intanrokhimah1108@gmail.com

Graduate program
Universitas Terbuka

This study aims to develop the North Kalimantan Province's Capital Strategies in Attracting Domestic and Foreign Investors.

This study uses qualitative research methods with a descriptive approach. The program informants consisted of the Head of the North Kalimantan Province One Stop Service and Investment Service as key informants (key informants), Office Secretary, Heads of Fields and Heads of Subdivisions / Head of Investment Section and One-Stop Integrated Services and people who can provide information relating to investment in North Kalimantan Province. The research instruments used were (a) Interview Guidelines, (b) Observation Guidelines in the form of observations of the object under study, and (c) Documentation. Data collection is done through a library and student program.

The results of the study show that: investment strategies and services are carried out by improving the quality and ability of training. The Government of North Kalimantan Province has carried out various promotions both domestically and abroad, such as holding seminars and investment forum meetings. North Kalimantan Provincial Government to accelerate development in the field of infrastructure development that supports regional investment. The Government of North Kalimantan Province is still not effective in using IT. The quality of licensing services is still poor, the licensing service process is still complicated and takes a long time.

Keywords: investment, service, strategy

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM (TAPM)

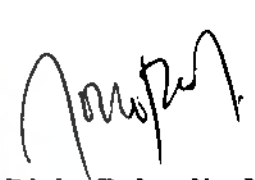
Judul TAPM : Strategi Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Utara
 dalam Menarik Investor Dalam dan Luar Negeri
Nama : INTAN ROKHIMAH
NIM : 501574961
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Hari/Tanggal : Sabtu, 19 Januari 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. M. Riduan Karim, S.E., M.M.
 NIDN. 0323116204


Dr. Djoko Rahardjo, M.Hum.
 NIP. 19580625 199303 1 002

Mengetahui,

**Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial,
 dan Politik, Pengelola Program
 Magister Administrasi Publik**

Dekan FHISIP


Dr. Darmanto, M.Ed.
 NIP. 19591027 198603 1 003


Dr. Sofjan Aripin, M.Si.
 NIP. 19660619 199203 1 002

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : INTAN ROKHIMAH
NIM : 501574961
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : Strategi Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Utara dalam Menarik Investor Dalam dan Luar Negeri

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

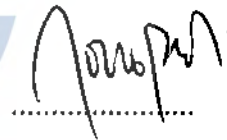
Hari/Tanggal : Jumat, 30 Nopember 2018

Waktu : 15.30 – 17.00 WITA

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji
Dr. Djoko Rahardjo, M.Hum.



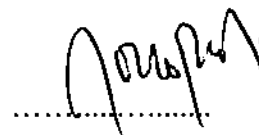
Penguji Ahli
Prof. Dr. Muchlis Hamdi, M.P.A., Ph.D.



Pembimbing I
Dr. M. Riduan Karim, S.E., M.M.



Pembimbing II
Dr. Djoko Rahardjo, M.Hum.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka, disamping manfaat yang ingin disumbangkan kepada pihak yang berkepentingan.

Penulisan tesis ini merupakan kesempatan yang tepat untuk berbagi pengetahuan dan teori dari mata kuliah yang diperoleh selama masa perkuliahan untuk diterapkan di tempat kerja dan kehidupan bermasyarakat. Banyak pihak yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bantuan, baik berupa motivasi maupun pendapat dan saran dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini.

Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada Bapak Dr. M. Riduan Karim, SE. MM. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Djoko Rahardjo, M.Hum., selaku dosen Pembimbing II yang penuh kesabaran telah memberikan dorongan dan bimbingan selama penyelesaian TAPM ini. Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan rasa terimakasih disertai penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

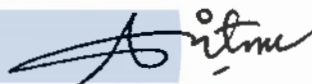
1. Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D selaku Rektor Universitas Terbuka
2. Dr. Drs. Sofjan Aripin, M.Si, selaku Dekan FHISIP UT
3. Dr. Drs. Darmanto, M.Ed selaku Kepala Bidang Prodi Magister Administrasi Publik.
4. Para Dosen, staf dan pegawai program ilmu Administrasi Bidang minat Administrasi Publik
5. Rekan-rekan kuliah program pasca sarjana dan rekan kerja penulis telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini
6. Orang tua, suami dan anak-anak saya tercinta yang telah memberikan bantuan dan dukungan materiil dan moral
7. Seluruh informan penelitian, yaitu Kepala Dinas, Sekretaris dan pejabat terkait lainnya di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara, para pelaku usaha (investor) yang telah

bersedia memberikan data, informasi dan keterangan yang sangat bermanfaat bagi penelitian ini.

Akhir kata, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa baik dalam penyajian dan pemilihan kata-kata maupun pembahasan materi, TAPM ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapkan saran, kritik dan segala bentuk pengarahannya dari semua pihak untuk perbaikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tarakan, 29 Nopember 2018



INTAN ROKHIMAH



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418
Telp. 021 7415050, Fax. 021 7415588

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : INTAN ROKHIMAH
NIM : 501574961
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Palas/08 Nopember 1969
Riwayat Pendidikan : Lulus SDN Tanjung Palas Pada Tahun 1983
 Lulus SMPN Tanjung Palas Pada Tahun 1986
 Lulus SMAN Tanjung Selor Pada Tahun 1989
 Lulus D3 Akuntansi Universitas Mulawarman Samarinda Pada Tahun 1993
 Lulus S1 Universitas Islam Malang Pada Tahun 2001
Riwayat Pekerjaan : 1. Pelaksana Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulungan
 2. Pelaksana Bagian Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Bulungan
 3. Kepala Sub Bagian Umum Dispenda Kabupaten Bulungan
 4. Kepala Sub Bagian Keuangan Dispenda Kabupaten Bulungan
 5. Kepala Sub Bagian Keuangan BPKAD Kabupaten Bulungan
 6. Kepala Seksi Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Bulungan
 7. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bulungan
 8. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Utara

Alamat Rumah : Jl. Kasimuddin RT 02, No. 99, Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan – Provinsi Kalimantan Utara

No. Telp. : -

Tarakan, 29 Nopember 2018

INTAN ROKHIMAH
NIM. 501574961

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR PLAGIASI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TAPM	iv
LEMBAR PENGESAHAN TAPM	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Perumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. <i>New Public Service</i>	13
B. Teori Strategi	19
C. Analisis SWOT	28
D. Investasi Daerah.....	32
E. Strategi Dinas Penanaman dalam Menarik Investor dalam dan Luar Negeri	39
F. Penelitian Terdahulu	46
G. Kerangka Berpikir.....	52
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	54
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan	55
C. Lokasi Penelitian	56
D. Jenis Data	56
E. Sumber Data.....	57
F. Teknik Pengumpulan Data	58
G. Metode Analisis Data	60
H. Jadwal Penelitian.....	63
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Utara	65
B. Potensi dan Peluang Investasi Provinsi Kalimantan Utara	68
C. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan PTSP	75
D. Analisis Investasi Provinsi Kalimantan Utara.....	78

E. Hasil Penelitian mengenai Strategi Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Utara dalam Menarik Investor dalam dan Luar Negeri	82
F. Pembahasan mengenai Strategi Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Utara dalam Menarik Investor dalam dan Luar Negeri	100
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	135
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA.....	137
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Bobot Indikator Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia Menurut Penelitian KPPOD Tahun 2005.....	2
Tabel 1.2. Perkembangan Investasi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 – 2016.....	3
Tabel 1.3. Realisasi Investasi Kabupaten/Kota Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara	5
Tabel 1.4. Realisasi Investasi Provinsi Kalimantan Utara dilihat dari Sektor Investasi.....	6
Tabel 2.1. Matriks Internal Factors Analysis Summary	30
Tabel 2.2. Matriks Eksternal Factors Analysis Summary.....	31
Tabel 2.3. Matriks SWOT.....	32
Tabel 2.4. Penelitian Terdahulu	47
Tabel 3.1. Informan Penelitian.....	55
Tabel 3.2. Jadwal Penelitian	64
Tabel 4.1. Luas Panen Hasil Per Hektar dan Produksi Padi Sawah Menurut Kabupaten/Kota, 2013.....	70
Tabel 4.2. Produksi Perikanan menurut Sub Sektor Perikanan dan Kabupaten/Kota (Ton) 2013	74
Tabel 4.3. Nilai Produksi Perikanan Menurut Sub Sektor Perikanan dan Kabupaten/Kota 2013.....	74
Tabel 4.4. Faktor-Faktor Strategis Internal dan Eksternal.....	78
Tabel 4.5. Perhitungan SWOT	80
Tabel 4.6. Matriks IFAS dan EFAS.....	81
Tabel 4.7. Peta Kawasan Strategis.....	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir.....	53
Gambar 3.1. Komponen Analisis Data Model Interaktif.....	61
Gambar 4.1. Komposisi Pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara.....	77
Gambar 4.2. Komposisi ASN dan PTT berdasarkan jenis kelamin.....	78



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang (Sunariyah, 2010:4). Peran investasi sangat diperlukan sebagai tolak ukur bagi sebuah negara guna menggerakkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Situmorang, 2011:54).

Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang. Guna melaksanakan pembangunan tersebut dibutuhkan dana yang besar, yang tidak dapat dipenuhi dengan dana yang berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu, Indonesia harus membuka diri dengan cara mengundang para investor asing, khususnya investasi jangka panjang berupa Penanaman Modal Asing (PMA).

Kebijakan PMA ini dilandasi alasan bahwa penanaman modal sangatlah signifikan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Dari segi manfaatnya ada dua akibat dari penanaman modal yang menguntungkan Indonesia. *Pertama*, meningkatnya pendapatan riil negara. *Kedua*, adanya manfaat tidak langsung, seperti diperkenalkannya teknologi dan pengetahuan yang baru. Selain itu penanaman modal juga berfungsi untuk memperbesar devisa Indonesia melalui ekspor produksi Indonesia ke luar negeri.

Menurut Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD, 2005) terdapat lima indikator yang menentukan daya tarik investor untuk masuk ke dalam suatu daerah adalah kelembagaan, keamanan politik sosial budaya, ekonomi daerah, tenaga kerja, dan infrastruktur fisik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1.
Bobot Indikator Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia
menurut Penelitian KPPOD Tahun 2005

Indikator	Bobot
Keamanan, Sosial Politik dan Budaya	27%
Ekonomi Daerah	23%
Tenaga Kerja	18%
Infrastruktur Fisik	17%
Kelembagaan	15%

Sumber: KPPOD, 2005

Dari Tabel 1.1 di atas, diketahui bahwa bobot indikator daya tarik investasi yang paling tinggi adalah keamanan, sosial politik dan budaya suatu daerah. Selain itu, faktor lain yang dapat menarik investor untuk datang ke suatu daerah adalah kekayaan alam yang dimiliki oleh suatu daerah.

Kalimantan Utara (Kaltara) adalah Provinsi Indonesia ke-34 yang memiliki banyak kekayaan alam. *Pertama*, energi listrik dan *hydro energy*. Kekayaan alam berupa 20 sungai membuat Kaltara memiliki potensi sumber energi listrik berkapasitas ribuan megawatt, *hydro energy*. *Kedua*, minyak dan gas bumi. Kaltara memiliki 9 titik ladang minyak yang mengandung 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun *cubic feet* gas. Potensi gas Kaltara tersebar di Kabupaten Bulungan, Tana Tidung, dan Nunukan. Kementerian ESDM mencatat Provinsi Kaltara memiliki cadangan minyak dan gas pada lahan

seluas 2.750 kilometer. *Ketiga*, energi biofeul dan kelapa sawit. Kaltara memiliki lahan perkebunan seluas 808 ribu hektar yang tersebar di 4 Kabupaten yakni Bulungan, Nunukan, Malinau, dan Tana Tidung. *Keempat*, Kawasan Industri Terpadu, Tanah Kuning. Di kawasan seluas 15.000 hektar akan menjadi industri pengolahan logam atau *smelter*. *Kelima*, Kaltara menyimpan potensi cadangan batubara. Pada 2015, sumber daya batu bara di Kaltara sebesar 638,18 juta ton dan cadangan sebesar 1,03 milyar ton. *Keenam*, potensi lain di antaranya adalah batu gamping sebanyak 654 ribu ton di Malinau dan 25 ribu ton di Nunukan. *Ketujuh*, potensi adanya sirtu dengan kapasitas 2,50 juta ton dan pasir kuarsa sebanyak 1 milyar ton di Nunukan. *Kedelapan*, Kaltara menyimpan potensi kelautan dan perikanan yang luar biasa seperti ikan, rumput laut ataupun *cold storage*, kepiting sampai udang hasil tambak.

Kekayaan potensi sumber daya alam tersebut membuat Kaltara memiliki peluang besar dalam mendatangkan investasi. Hal ini terbukti dari perkembangan investasi di Provinsi Kaltara dari tahun 2015-2016 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan investasi di Kaltara dapat dilihat pada Tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2.
Perkembangan Investasi di Provinsi Kaltara Tahun 2015 – 2016

No.	Tahun	Realisasi			
		PMDN		PMA	
1.	2014	Rp 642,79 milyar	-	-	-
2.	2015	Rp 921,79 milyar	21 proyek	USD 230,92 juta	58 proyek
3.	2016	Rp 3.345,7 milyar	56 proyek	USD 160,8 juta	65 proyek
4.	2017	Rp 145 milyar	-	Rp 69,9 milyar	-

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltara, 2018

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas diketahui bahwa pada tahun 2015 realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Kaltara sebanyak 21 proyek dengan nilai investasi sekitar Rp 921,79 milyar, meningkat sebesar 43,40 persen dibandingkan nilai investasi pada 2014, yang hanya sekitar Rp 642,79 milyar. Sementara itu realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Kaltara pada 2015 sebanyak 58 proyek, dengan total nilai investasi sekitar USD 230,92 juta. Nilai investasi pada 2015 mengalami peningkatan sekitar 113,18 persen dibandingkan 2014. Pada tahun 2016 juga realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) meningkat sebesar 27,55% dibandingkan nilai investasi pada 2015. Sementara itu pada triwulan II atau semester I 2017, realisasi investasi di Kaltara mencapai Rp 214,9 milyar. Rincian, nilai PMDN adalah sebesar Rp 145 milyar dan PMA atau investasi dari luar negeri sebesar Rp 69,9 milyar.

Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI nilai investasi PMDN di Provinsi Kaltara hingga triwulan I (Januari hingga Maret) sebesar Rp 83 milyar, dengan jumlah proyek investasi sebanyak 45 kegiatan. Sementara itu, untuk PMA pada periode yang sama tercatat sebesar Rp 45,5 milyar, dengan jumlah 36 kegiatan. Dengan catatan tersebut, Kaltara berada pada posisi ke-26 dari 34 provinsi di Indonesia untuk realisasi PMDN, dan urutan ke-21 untuk realisasi PMA. Berdasarkan data BKPM RI sejak Januari hingga Juni 2017 realisasi PMDN Kaltara berada pada urutan ke-30 dengan nilai investasi mencapai Rp 145 milyar untuk 55 proyek. Sedangkan untuk PMA Kaltara berada di urutan ke-23, dengan nilai investasi Rp 69,9 milyar

untuk 63 proyek. Rincian realisasi investasi per kabupaten dapat dilihat pada Tabel 1.3 di bawah ini.

Tabel 1.3.
Realisasi Investasi Kabupaten/Kota Setiap Kabupaten/Kota
di Provinsi Kaltara

No.	Kabupaten/Kota	Realisasi	
		Dana	Proyek
1.	Tarakan	Rp 35,51 milyar	9 proyek
2.	Bulungan	Rp 536,29 milyar	8 proyek
3.	Nunukan	Rp 349,98 milyar	4 proyek
4.	Malinau	-	-
5.	Tana Tidung	-	-

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltara, 2018

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas maka diketahui bahwa Kota Tarakan memiliki jumlah proyek terbanyak, 9 proyek dengan nilai investasi Rp 35,51 milyar. Walaupun kota Tarakan memiliki jumlah proyek yang terbanyak, namun Kabupaten Bulungan merupakan kabupaten yang memiliki nilai investasi paling besar yaitu sekitar Rp 536,29 milyar dengan 8 proyek. Disusul oleh Kabupaten Nunukan dengan 4 proyek dan nilai investasi sebesar Rp 349,98 milyar. Pada 2015, Kabupaten Bulungan memiliki jumlah proyek investasi PMA terbanyak, yaitu 27 proyek, dengan nilai investasi sebesar USD 176,02 juta, dan nilai tersebut merupakan nilai investasi terbesar dibandingkan dengan investasi di kabupaten dan kota lainnya.

Tabel 1.4.
Realisasi Investasi Provinsi Kaltara dilihat dari Sektor Investasi

No.	Sektor	Realisasi	
		Dana	Proyek
1.	Tanaman pangan dan perkebunan	Rp 550,86 milyar	9 proyek
2.	Industri makanan	Rp 337,02 milyar	3 proyek

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltara, 2018

Dari Tabel 1.4 di atas, realisasi investasi terbesar dilakukan di sektor tanaman pangan dan perkebunan dengan jumlah 9 proyek dengan nilai investasi untuk sektor tersebut adalah sebesar Rp 550,86 milyar. Jumlah proyek tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan investasi di sektor lainnya. Selain itu, realisasi investasi yang cukup besar juga dilakukan di sektor industri makanan, yaitu sebanyak 3 proyek dengan nilai investasi Rp 337,02 milyar.

Dari data realisasi investasi Provinsi Kaltara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi investasi Provinsi Kaltara dari tahun ke tahun semakin meningkat. Namun kenaikan realisasi investasi itu belum didukung oleh adanya pelayanan perizinan yang prima. Hal ini terbukti pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi Kaltara menjadi salah satu dari enam provinsi yang diberikan bendera merah oleh Ombudsman Republik Indonesia karena pelayanan publik yang buruk. Akibatnya, masih banyak investor yang mengurungkan niatnya berinvestasi ke Kaltara karena pelayanan perizinan yang buruk.

Selama ini, pelayanan perizinan di Indonesia pada umumnya dan Kaltara pada khususnya mendapatkan predikat pelayanan perizinan yang buruk

dibandingkan dengan negara berkembang lainnya di Asia. Hasil Penelitian Bank Dunia menunjukkan bahwa untuk berinvestasi di Indonesia memerlukan jangka waktu paling lama, dan biaya paling mahal dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia. Selain itu, berdasarkan Laporan dari *The Indonesia Competitiveness Report 2013* diketahui bahwa pelaku bisnis enggan menanamkan bisnis ke Indonesia karena birokrasi pemerintah Indonesia yang tidak efisien, dan adanya ketidakpastian hukum di tingkat pemerintah daerah, permasalahan pajak, isu tenaga kerja, lahan dan infrastruktur serta data-data investor di daerah belum dibuat secara *online* (Budi, 2010:67). Menurut WEF (2007) penyebab investor enggan menanamkan modal ke Indonesia adalah karena (1) kriminal dan pencurian), (2) etika kerja tenaga kerja buruk, (3) pajak terlalu besar, (4) pemerintah yang tidak stabil, (5) regulasi uang asing, (6) korupsi, (7) inflasi, (8) keterbatasan tenaga kerja terdidik, (9) regulasi perpajakan tidak kondusif, (10) peraturan ketenaga kerjaan yang restriktif, (11) kebijakan tidak stabil, (12) akses terbatas untuk pendanaan, (13) birokrasi tidak efisien, (14) infrastruktur buruk, (15) birokrasi yang berbelit-belit dan membuat banyak waktu yang terbuang serta besarnya biaya yang harus ditanggung oleh pengusaha, (16) pembebasan lahan yang sulit karena menyangkut tanah adat dan hak ulayat, (17) terbatasnya sarana dan prasarana seperti jalan, pelabuhan, telekomunikasi, air bersih, sarana kesehatan, sarana pendidikan, listrik, dll, (18) percepatan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil/*skilled labor*.

Sementara itu, permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam menarik investasi baik dalam dan luar negeri di Provinsi Kaltara adalah (1) Strategi penanaman modal dan perizinan yang dilakukan oleh Provinsi Kaltara belum efektif dan efisien. Hal ini terkendala oleh beberapa permasalahan, seperti masih rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang ada di Kaltara, diketahui dari masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Kaltara, karena terbatasnya jumlah perguruan tinggi yang berkualitas; (2) Promosi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang masih minim; (3) Minimnya infrastruktur daerah yang ada di Kaltara seperti air bersih, listrik dan infrastruktur jalan; (4) Strategi penanaman modal dan pelayanan terpadu belum mengembangkan sistem informasi berbasis IT yang baik.

Dari sisi pelayanan publik, permasalahan penanaman modal dan perizinan di Kaltara adalah sebagai berikut (1) Birokrasi yang rumit telah mengakibatkan permasalahan perizinan dan penanaman modal yang mudah sekalipun menjadi rumit. Buruknya pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltara kepada investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pada tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltara mendapatkan bendera merah dari Ombudsman Perwakilan Kaltara karena buruknya pelayanan tersebut. Akibat buruknya pelayanan perizinan tersebut menjadi alasan investor baik dari dalam negeri dan luar negeri untuk mengurungkan niat menanamkan modalnya ke Kaltara. (2) Tenggat waktu untuk penyelesaian

belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltara yang belum memiliki standar pelayanan publik untuk mendukung pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan tepat. (4) DPMPTSP Provinsi Kaltara belum memiliki pedoman atau acuan yang jelas untuk mendukung peningkatan pelayanan perizinan yang mudah, murah, cepat, dan tepat. Komitmen yang ditunjukkan DPMPTS belum maksimal dalam memberikan pelayanan, serta memberikan kompensasi bila pelayanan tidak sesuai standar.

Berdasarkan permasalahan di atas, Pemerintah Provinsi Kaltara berkomitmen untuk memperbaiki pelayanan perizinan yang diberikan kepada investor. Pelayanan perizinan adalah sebuah pelayanan yang berkaitan dengan pemberian suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang (Bagir Manan dalam Andrian Sutedi, 2010: 170).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melakukan reformasi pelayanan perizinan guna menarik investasi. Salah satu langkah untuk menarik investasi adalah dengan membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu di Provinsi Kaltara. Pembentukan dinas ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Dengan dibentuknya Kantor/Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ini sebagai institusi khusus yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang untuk

memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu atau *One Stop Service* (OSS) salah satu tujuannya adalah memberikan kemudahan bagi para pengusaha untuk mengurus izin usaha, terutama bagi para usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM). Bentuk pelayanan ini diharapkan dapat semakin menarik investor ke daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Strategi Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Utara dalam Menarik Investor Dalam dan Luar Negeri”**.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi permasalahan pada penelitian ini adalah menekankan pada permasalahan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang ada di Provinsi Kaltara. Berdasarkan pengamatan awal di lapangan, permasalahan-permasalahan tersebut sebagai berikut.

1. Kualitas sumber daya manusia (tenaga kerja) yang masih rendah.
2. Promosi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang masih minim.
3. Minimnya infrastruktur daerah yang ada di Kaltara.

4. Strategi penanaman modal dan pelayanan terpadu belum mengembangkan sistem informasi berbasis IT yang baik.
5. Buruknya pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltara kepada investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri seperti pelayanan yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang sangat lama.
6. Tenggat waktu untuk penyelesaian belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltara yang belum memiliki standar pelayanan publik untuk mendukung pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan tepat.
8. DPMPTSP Provinsi Kaltara belum memiliki pedoman atau acuan yang jelas untuk mendukung peningkatan pelayanan perizinan yang mudah, murah, cepat, dan tepat.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik perumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimanakah strategi penanaman modal Provinsi Kalimantan Utara dalam menarik investor dalam dan luar negeri?”

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu menganalisis mengenai strategi penanaman modal Provinsi Kalimantan Utara dalam menarik investor dalam dan luar negeri.

E. Manfaat Penelitian

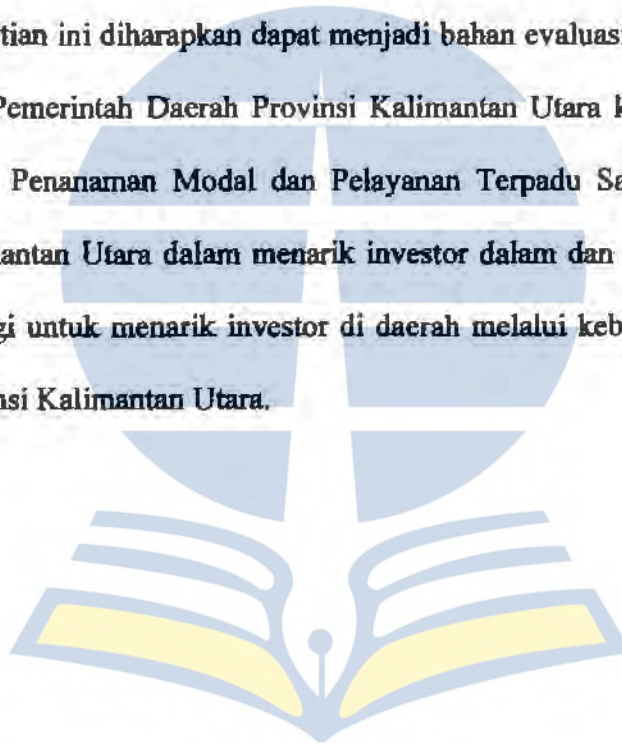
Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi khasanah ilmu administrasi publik mengenai strategi kebijakan guna menarik investasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara khususnya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara dalam menarik investor dalam dan luar negeri terkait strategi untuk menarik investor di daerah melalui kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. *New Public Service*

Paradigma *New Public Service* dikenalkan oleh Janet V. Denhart dan Robert B. Denhart (2003) melalui buku mereka yang berjudul “*The New Public Service, Serving not Steering*”. Buku ini diawali dengan kalimat “*Government shouldn't be run like a business ; it should be run like a democracy*”. *The New Public Service* dimaksudkan sebagai *counter* paradigma dengan men’dekonstruksi’ prinsip-prinsip *New Public Management*, khususnya prinsip yang dikemukakan Osborne dan Gaebler. Prinsip-prinsip *The New Public Service* tersebut sebagai berikut.

1. Melayani warga negara, bukan *customer* (*serve citizens, not customers*)

Publik sebagai klien adalah pihak yang tergantung, pihak yang membutuhkan pelayanan. Pemerintah berperan sebagai pihak yang berupaya memenuhi apa yang dibutuhkan publik melalui administrasi publik. *New Public Service* memandang publik sebagai ‘*citizen*’ atau warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban publik yang sama. Tidak hanya sebagai *customer* yang dilihat dari kemampuannya membeli atau membayar produk atau jasa. *Citizen* adalah penerima dan pengguna pelayanan publik yang disediakan pemerintah dan sekaligus juga subyek dari berbagai kewajiban publik seperti mematuhi peraturan perundang-undangan, membayar pajak, membela negara, dan sebagainya.

New Public Service melihat publik sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban dalam komunitas yang lebih luas. Adanya unsur paksaan dalam mematuhi kewajiban publik menjadikan relasi negara dan publik tidak bersifat sukarela. Oleh karena itu, abdi negara tidak hanya responsif terhadap '*customer*', tapi juga fokus pada pemenuhan hak-hak publik serta upaya membangun hubungan kepercayaan (*trust*) dan kolaborasi dengan warga negara.

2. Mengutamakan kepentingan publik (*seeks the public interest*)

Administrator publik berperan dalam membangun nilai kolektif dan kebersamaan dalam kepentingan publik. Tujuannya tidak untuk menemukan solusi berdasarkan pada pilihan individu, tetapi merupakan hasil kepentingan bersama dan berbagi tanggung jawab.

New Public Service berpandangan aparaturnya bukan aktor utama dalam merumuskan apa yang menjadi kepentingan publik. Administrator publik adalah aktor penting dalam sistem pemerintahan yang lebih luas yang terdiri dari warga negara (*citizen*), kelompok, wakil rakyat, dan lembaga-lembaga lainnya. Administrator negara mempunyai peran membantu warga negara mengartikulasikan kepentingan publik. Warga negara diberi suatu pilihan di setiap tahapan proses pemerintahan, bukan hanya dilibatkan pada saat pemilihan umum. Administrator publik berkewajiban memfasilitasi forum bagi terjadinya dialog publik. Argumen ini berpengaruh terhadap peran dan tanggung jawab administrasi publik yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan-tujuan ekonomis,

tetapi juga nilai-nilai yang menjadi manifestasi kepentingan publik, seperti kejujuran, keadilan, kemanusiaan, dan sebagainya.

3. Kewarganegaraan lebih berharga daripada kewirausahaan (*value citizenship over entrepreneurship*)

New Public Service memandang keterlibatan *citizen* dalam proses administrasi dan pemerintahan lebih penting ketimbang pemerintahan yang digerakan oleh semangat wirausaha. *New Public Service* berargumen kepentingan publik akan lebih baik bila dirumuskan dan dikembangkan oleh aparatur negara bersama-sama dengan warga negara yang punya komitmen untuk memberi sumbangan berarti pada kehidupan bersama daripada oleh manajer berjiwa wirausaha yang bertindak seolah uang dan kekayaan publik itu milik mereka.

Prinsip ini berimplikasi pada peran pemerintah dan relasinya dengan masyarakat. Peran pemerintah di masa lalu lebih bersifat mengarahkan masyarakat melalui fungsi-fungsi yang bersifat langsung dan pengendalian seperti fungsi pengaturan atau regulasi, pemberian layanan, menetapkan aturan dan insentif. Kehidupan masyarakat modern yang makin kompleks menuntut peran pemerintah bergeser dari fungsi *controlling* ke agenda *setting*, fasilitasi, negosiasi atau "*brokering*" solusi untuk memecahkan *problem-problem* publik (seringkali dengan melibatkan koalisi badan – badan pemerintah, privat dan nonprofit). Oleh karena itu, administrator publik tidak cukup hanya menguasai keahlian kontrol manajemen, tetapi juga keahlian bernegosiasi dan resolusi konflik.

4. Berpikir strategis, bertindak demokratis (*think strategically, act democratically*)

Ide utama prinsip ini adalah bahwa kebijakan dan program untuk menjawab kebutuhan publik akan dapat efektif dan responsif apabila dikelola melalui usaha kolektif dan proses kolaboratif. Prinsip ini berkaitan dengan bagaimana administrasi publik menerjemahkan atau mengimplementasikan kebijakan publik sebagai manifestasi dari kepentingan publik. Model implementasi kebijakan dalam paradigma administrasi publik lama bersifat *top-down*, hierarkis, dan satu pengarahan/komando (*unidirectional*). Karena pengaruh manajemen ilmiah dan organisasi formal (birokrasi), maka fokus implementasi pada pengendalian perilaku agar sesuai dengan aturan atau standar kebijakan atau program.

Fokus utama implementasi dalam *New Public Service* pada keterlibatan *citizen* dan pembangunan komunitas (*community building*). Keterlibatan *citizen* dilihat sebagai bagian yang harus ada dalam implementasi kebijakan dalam sistem demokrasi. Keterlibatan di sini mencakup keseluruhan tahapan perumusan dan proses implementasi kebijakan. Melalui proses ini, warga negara merasa terlibat dalam proses pemerintahan, bukan hanya menuntut pemerintah untuk memuaskan kepentingannya. Organisasi menjadi ruang publik di mana manusia (*citizen* dan *administrator*) dengan perspektif yang berbeda bertindak

bersama demi kebaikan publik. Interaksi dan keterlibatan dengan warga negara ini yang memberi tujuan dan makna pada pelayanan publik.

5. Akuntabilitas bukan hal sederhana (*recognize that accountability is not simple*)

Aparatur publik harus tidak hanya mengutamakan kepentingan pasar, mereka harus juga mengutamakan ketaatan pada konstitusi, hukum, nilai masyarakat, nilai politik, *standard* profesional, dan kepentingan warga negara. Menurut *New Public Service*, efisiensi, efektivitas, dan kepuasan *customer* penting, tetapi administrasi publik juga harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dari sisi etika, prinsip demokrasi, dan kepentingan publik. Administrator publik bukan wirausaha atas bisnisnya sendiri di mana konsekuensi ataupun kegagalan akibat keputusan yang diambilnya akan ditanggungnya sendiri. Risiko atas kegagalan suatu implementasi kebijakan publik akan ditanggung semua warga masyarakat. Oleh karena itu akuntabilitas administrasi publik bersifat kompleks dan *multifacet* atau banyak dimensi, seperti pertanggungjawaban profesional, legal, politis, dan demokratis.

6. Melayani ketimbang mengarahkan (*serve rather than steer*)

Aparatur publik dituntut menerapkan kepemimpinan yang berlandaskan nilai kebersamaan dalam membantu warga negara mengartikulasikan dan memenuhi kepentingan bersama bukan sekadar mengendalikan atau mengarahkan masyarakat menuju arah/tujuan baru. Prinsip ini berkenaan dengan peran atau kepemimpinan manajer di organisasi sektor publik.

Kepemimpinan dalam *New Public Service* terfokus pada energi manusia untuk kemanfaatan kemanusiaan. Kepemimpinan sektor publik berlandaskan pada nilai disebut moral atau *transformational leadership*, bukan *transactional leadership*. Kepemimpinan transaksional digerakan atas dasar motif timbal balik atau saling menguntungkan antara pimpinan dan pengikut, atasan, dan bawahan. Kepemimpinan moral atau transformasional adalah kepemimpinan yang mampu menjadi aspirasi dan keteladanan moral baik bagi pimpinan, bawahan, maupun publik secara keseluruhan. Kepemimpinan moral menghasilkan tindakan yang konsisten dengan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi pengikut maupun tindakan-tindakan yang secara fundamental merubah moral dan kondisi sosial. Pada akhirnya kepemimpinan ini mempunyai kapasitas untuk menggerakkan kelompok, organisasi, dan masyarakat menuju pencapaian tujuan yang lebih tinggi. Kepemimpinan dalam *New Public Service* merupakan *shared leadership* di mana kendali kepemimpinan tidak terpusat di tangan atasan, tetapi melibatkan banyak orang, banyak kelompok. Kedudukan pimpinan bukan sebagai pemilik, tetapi pelayan publik atau abdi masyarakat (*servant, not owner*).

7. Menghargai manusia, bukan sekadar produktivitas (*value people, not just productivity*)

Organisasi publik dan jaringannya akan lebih berhasil dalam jangka panjang jika mereka beroperasi melalui proses kolaborasi dan kepemimpinan bersama berlandaskan penghormatan pada semua orang.

Menyimak prinsip-prinsip *New Public Service* di atas bisa disimpulkan bahwa sifat dan misi publik (*publicness*) dari administrasi publik adalah melayani *citizen* yakni masyarakat sebagai warga negara, sebagai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban publik yang sama terlepas dari identitas dan kapasitas sosial, politik maupun ekonomi.

B. Teori Strategi

Menurut David (2011:18-19), strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Menurut Pringgowidagda (dalam Mulyadi dan Risminawati, 2012:4), bahwa strategi diartikan suatu cara, teknik, taktik, atau siasat yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Surtikanti dan Santoso (2008:28), strategi mempunyai pengertian suatu garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Rangkuti (2013:183) berpendapat bahwa strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif, yang menjelaskan **bagaimana perusahaan akan mencapai semua** tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hax dan Majluf (dalam J.Salusu, 2006:100-101) merumuskan secara komprehensif tentang strategi sebagai berikut:

1. strategi ialah suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu, dan integral;
2. menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi sumber daya;
3. menyeleksi bidang yang akan digeluti atau akan digeluti organisasi;

4. mencoba mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama, dengan memberikan respons yang tepat terhadap peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi, dan kekuatan serta kelemahannya;
5. melibatkan semua tingkat hierarki dari organisasi.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan suatu cara, teknik, taktik, siasat, kiat dan ilmu didalam memanfaatkan segala sumber yang berisi garis besar haluan yang dilakukan seseorang untuk bertindak dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

Assauri (2013:9) berpendapat bahwa manajemen strategi merupakan suatu proses dari organisasi atau perusahaan untuk menata perumusan dan pengimplementasian strateginya. Keputusan strategi merupakan keputusan yang berkenaan dengan pengembangan organisasi perusahaan dalam jangka panjang, dalam rangka peningkatan kompetensi yang nyata berbeda dari organisasi perusahaan tersebut. Sedangkan menurut Rachmat (2014:16), manajemen strategi adalah suatu proses dari pengambilan keputusan dan tindakan yang mengarah pada pengembangan strategi yang efektif atau yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Menurut Hubeis dan Najib (2014:10), konsep manajemen strategi adalah sebagai suatu metode diagnosis untuk mengelola perubahan lingkungan *turbulence* ditentukan oleh persepsi yang jelas dari lingkungan mendatang yang bias dengan berbagai kesuksesan, identifikasi sistematis dan kreatif dari respons strategi, desain proses struktur internal dan dinamis dari institusi untuk merespons tantangan lingkungan

mendatang, efektivitas dari jawaban strategi yang dipilih dan antisipasi daya tahan terhadap perubahan *discontinue*. Berdasarkan situasi dan kondisi tersebut, terlihat bahwa implementasi manajemen strategi tidak terlalu ditentukan oleh ukuran perusahaan, tetapi oleh kebutuhan langsung dan keterlibatan seluruh manajer dalam merumuskan strategi dan memproses implementasi.

Lebih lanjut Hubeis dan Najib (2014) menjelaskan tujuan utama manajemen strategi adalah untuk mempelajari mengapa banyak perusahaan sukses dan mengapa banyak perusahaan lainya gagal, serta bagaimana perusahaan mengelola kesuksesan ditengah situasi persaingan serta bagaimana perusahaan menghadapi kegagalan dan bangkit dari kegagalan untuk menjadi perusahaan yang maju. Sementara itu, manfaat manajemen strategi adalah mendorong perusahaan untuk senantiasa menyadari adanya perubahan perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis dan membuat perusahaan mampu merumuskan strategi yang tepat secara sistematis untuk mengantisipasi berbagai pengaruh negatif yang muncul dan memanfaatkan pengaruh positif yang tersedia dari perubahan-perubahan yang ada.

Amirullah (2015:7) berpendapat bahwa manfaat yang dapat diperoleh perusahaan jika menerapkan manajemen strategi adalah sebagai berikut.

1. Memberikan pengarahan jangka panjang yang dituju.
2. Membantu perusahaan dalam beradaptasi pada perubahan yang terjadi.
3. Membuat perusahaan menjadi lebih efektif.

4. Mengidentifikasi keunggulan perusahaan dalam lingkungan yang beresiko.
5. Dengan adanya pembuatan strategi, maka akan mencegah munculnya masalah dimasa mendatang.
6. Adanya keterlibatan karyawan dalam pembuatan strategi akan lebih membuat karyawan termotivasi.
7. Berkurangnya aktivitas tumpang tindih.
8. Adanya keraguan pada karyawan lama untuk melakukan perubahan dapat dikurangi.

Menurut Hubeis dan Najib (2014) strategi di tingkat bisnis adalah sekumpulan komitmen dan tindakan perusahaan yang terpadu dan terkoordinasi yang digunakan untuk mendapatkan keunggulan bersaing dengan mengeksploitasi kompetisi inti dalam pasar produk yang spesifik. Pada tingkatan korporat menurut Hubais dan Najib (2014) ada empat tipe strategi alternatif yang dapat digunakan dalam mengembangkan dan mempertahankan kemampuan bersaing, yaitu strategi integrasi, strategi intensif, strategi disersifikasi, dan strategi defensif.

1. Strategi Integrasi

Strategi ini memungkinkan sebuah perusahaan untuk mendapatkan kontrol atas distributor, pemasok, dan pesaing.

a. Integrasi ke depan (*forward integration*)

Integrasi ke depan adalah strategi perusahaan dalam mencari kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas distributor atau pengecer.

Strategi ini dipilih jika distributor organisasi sangat mahal, mutu

distributor terbatas, organisasi bersaing dalam industri sedang bertumbuh, organisasi mempunyai modal dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mengelola bisnis baru, keunggulan produk stabil sangat tinggi, distributor memperoleh laba yang besar.

b. Integrasi ke belakang (*backward integration*)

Integrasi ke belakang, yaitu menunjuk pada strategi mencari kepemilikan atau kendali besar pada perusahaan pemasok. Strategi ini terutama tepat bila perusahaan pemasok saat ini tidak dapat diandalkan, terlalu mahal, atau tidak dapat memenuhi kebutuhan perusahaan. Strategi perusahaan yang mencari kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pemasok perusahaan, dengan tujuan untuk memastikan pasokan produk yang dibutuhkan sesuai spesifikasi dan terpenuhi tepat waktunya.

c. Integrasi horisontal

Integrasi horisontal, yaitu merujuk pada strategi mencari kepemilikan dari atau kendali besar atas perusahaan pesaing. Hal ini dilakukan jika organisasi dapat memperoleh karakteristik monopolistik atau dalam bidang atau wilayah tertentu, organisasi bersaing dalam industri yang sedang bertumbuh, meningkatnya skala ekonomis memberikan keunggulan bersaing yang besar, organisasi mempunyai modal dan sumber daya manusia yang berbakat yang diperlukan untuk perluasan perusahaan, pesaing ragu karena tidak ada kemampuan manajerial.

2. Strategi Intensif

Kelompok strategi ini disebut sebagai intensif karena mensyaratkan berbagai upaya yang intensif untuk meningkatkan posisi kompetitif perusahaan dengan produk yang sudah ada. Kelompok strategi ini meliputi tiga strategi (Hubeis dan Najib, 2014) yaitu :

a. Penetrasi pasar (*market penetration*)

Strategi perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasar atas produk atau jasa yang ada dengan cara meningkatkan usaha-usaha pemasaran secara intensif. Strategi ini dipakai tatkala perusahaan sedang berkembang, sedangkan pesaing mengalami penurunan.

b. Pengembangan pasar (*market development*)

Strategi ini berusaha memperkenalkan produk atau jasa saat ini ke pasar-pasar yang baru. Strategi ini dilakukan manakala jaringan distribusi tersedia, bermutu, dan tidak mahal.

c. Pengembangan produk (*product development*)

Strategi perusahaan dengan meningkatkan penjualan melalui perbaikan produk atau jasa saat ini atau mengembangkan produk atau jasa baru.

3. Strategi Diversifikasi

Ada tiga tipe umum dari strategi diversifikasi, yaitu konsentrik (terfokus), horisontal, dan konglomerat. Dalam kategori ini menurut Hubeis dan Najib (2014), tipe strategi dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. Diversifikasi konsentrik

Strategi perusahaan dengan cara menambahkan produk atau jasa baru yang masih berkaitan dengan produk atau jasa lama. Strategi ini dilakukan manakala pertumbuhan lambat dan produk yang ada mengalami penurunan.

b. Diversifikasi konglomerat

Strategi perusahaan dengan cara menambahkan produk atau jasa baru yang tidak berkaitan dengan produk atau jasa lama. Strategi ini dipakai ketika produk mengalami stagnasi atau penurunan sampai titik jenuhnya.

c. Diversifikasi horizontal

Strategi perusahaan yang menambahkan produk atau jasa baru yang tidak berkaitan untuk memuaskan pelanggan yang sama.

4. Strategi Defensif

Strategi defensif adalah strategi yang bertujuan untuk bertahan. Dalam kategori ini, strategi defensif dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. *Joint venture*

Strategi dua perusahaan atau lebih membentuk kerja sama sementara atau konsorsium membentuk perusahaan baru yang terpisah dari perusahaan induk guna memanfaatkan peluang. Strategi ini dipakai ketika perusahaan tidak mampu bersaing dengan *market leader* yang ada.

b. Pengurangan (*Retrenchment*)

Strategi ini dilakukan perusahaan dengan mengelompokkan ulang bisnis melalui pengurangan biaya dan aset perusahaan untuk menanggulangi turunnya penjualan dan keuntungan. Strategi ini dilakukan ketika perusahaan mempunyai kemampuan tertentu, tetapi selalu gagal memenuhi tujuan dan sasaran.

c. Divestasi

Divestasi adalah menjual sebuah unit bisnis atas sebagian perusahaan kepada pihak lain. Ini dilakukan setelah strategi pengurangan tidak berhasil.

d. Likuidasi

Likuidasi adalah menjual seluruh aset perusahaan atau menutup sebuah perusahaan. Strategi ini dilakukan setelah pengurangan dan divestasi tidak berhasil.

Menurut Hubeis dan Najib (2014), perusahaan menggunakan proses manajemen **strategik** yang terdiri atas enam langkah:

1. Melakukan analisis lingkungan internal

Hubeish dan Najib (2014:45) menyatakan bahwa lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang berada dalam organisasi dan secara normal memiliki implikasi langsung dan khusus bagi perusahaan. Perusahaan sendiri memiliki pola pikir sekarang merupakan kumpulan dari berbagai macam sumber daya, kapabilitas dan kompetensi yang nantinya dapat digunakan untuk membentuk *market position* tertentu.

Mencari tahu kekuatan internal perusahaan dan mengembangkannya untuk mengatasi kelemahannya. Kekuatan merupakan kondisi internal positif yang memberikan keuntungan relatif dari pesaing kepada perusahaan.

2. Melakukan analisis lingkungan eksternal

Menurut Pearce dan Robinson (2013:92), lingkungan eksternal merupakan faktor-faktor diluar dari kendali yang dapat mempengaruhi pilihan perusahaan mengenai arah dan tindakan, di mana pada akhirnya juga akan mempengaruhi struktur organisasi dan juga proses internal perusahaan. Pada proses ini, perusahaan mengidentifikasi peluang dan ancaman dari luar. Peluang adalah kondisi sekarang atau masa depan lingkungan yang menguntungkan organisasi pada saat ini atau pada luaran potensial. Ancaman adalah kekuatan eksternal negatif yang merintangi kemampuan perusahaan untuk mencapai misi, sasaran, dan tujuan perusahaan.

3. Mengembangkan visi dan misi yang jelas

Proses mengembangkan visi dan misi agar visi dan misi mudah dipahami, dapat memberikan *spirit* bagi anggota dan berdimensi jangka panjang.

4. Menyusun sasaran dan tujuan perusahaan

Proses menetapkan sasaran dan tujuan perusahaan serta memberikan target yang dicapai dan menyediakan dasar untuk mengevaluasi kinerja perusahaan.

5. Merumuskan pilihan-pilihan strategi dan memilih strategi yang tepat

Proses perumusan strategi ini, pengelola perusahaan harus memiliki strategi dan kebijakan yang baik dan juga harus mengetahui kelemahan

dan keterbatasan pesaing, sesudah itu memilih strategi yang terbaik untuk mencapai misi dan tujuan perusahaan.

6. Menentukan pengendalian

Pengendalian meliputi proses evaluasi dan pemberian umpan balik terhadap proses manajerial yang tengah berlangsung sehingga rencana dapat direalisasi dengan baik.

C. Analisis SWOT

SWOT adalah singkatan dari *Strength*, *Weakness*, *Opportunities*, dan *Threats*. Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) dalam suatu organisasi atau proyek, baik proyek yang sedang berlangsung maupun dalam perencanaann proyek baru.

Analisis SWOT terdiri dari 4 komponen dasar, yaitu:

1. *Strength* (Kekuatan) atau “S”, yaitu karakteristik organisasi ataupun proyek yang memberikan kelebihan/keuntungan dibandingkan dengan yang lainnya.
2. *Weakness* (Kelemahan) atau “W”, yaitu karakteristik yang berkaitan dengan kelemahan pada organisasi ataupun proyek dibandingkan dengan yang lainnya.
3. *Opportunities* (Peluang) atau “O”, yaitu peluang yang dapat dimanfaatkan bagi organisasi ataupun proyek untuk dapat berkembang di kemudian hari.

4. *Threats* (Ancaman) atau “T”, yaitu ancaman yang akan dihadapi oleh organisasi ataupun proyek yang dapat menghambat perkembangannya.

Dari keempat komponen dasar tersebut, *Strength* (kekuatan) dan *Weakness* (kelemahan) adalah faktor internal organisasi/proyek itu sendiri, sedangkan *Opportunities* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman) merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan organisasi ataupun proyek. Oleh karena itu, Analisis SWOT juga sering disebut dengan Analisis Internal-Eksternal (Internal-External Analisis) dan Matriks SWOT juga sering dikenal dengan Matriks IE (IE Matrix).

Menurut Rangkuti (2005) matriks IFAS dan EFAS diolah dengan menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi faktor internal dan eksternal perusahaan

Langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi faktor internal yaitu dengan mendaftarkan semua kelemahan dan kekuatan usaha. Faktor internal diidentifikasi dengan mendata semua peluang dan ancaman suatu usaha.

- 2) Penentuan bobot setiap peubah

Penentuan bobot dilakukan dengan jalan mengajukan identifikasi faktor-faktor strategis eksternal dan internal tersebut kepada pihak yang memiliki pengetahuan yang kuat akan faktor internal dan eksternal usahanya dengan menggunakan metode perbandingan berpasangan.

- 3) Penentuan peringkat (rating)

Penentuan rating dilakukan terhadap peubah-peubah hasil analisis situasi perusahaan. Hasil pembobotan dan rating dimasukkan dalam matriks IFAS

dan EFAS. Selanjutnya nilai dari pembobotan dikalikan dengan nilai rata-rata rating pada tiap-tiap faktor dan semua hasil kali tersebut dijumlahkan secara vertikal untuk memperoleh total skor pembobotan. Skala nilai rating yang digunakan untuk matriks IFAS, yaitu: 1 = kelemahan utama, 2 = kelemahan kecil, 3 = kekuatan kecil, dan 4 = kekuatan umum. Matriks IFAS dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Matriks Internal Factors Analysis Summary

Kekuatan (Strength)		Bobot	Rating	Skor
1				
2				
3				
4				
Sub Total Kekuatan Internal				

Kelemahan (Weakness)		Bobot	Rating	Skor
1				
2				
3				
4				
Sub Total Kelemahan Internal				
Total				

Sumber: Rangkuti (2005)

Skala rating yang digunakan untuk matriks EFAS, yaitu: 1 = ancaman utama, 2 = ancaman kecil, 3 = peluang kecil dan 4 = peluang utama. Matriks EFAS dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Matriks Eksternal Factors Analysis Summary

Peluang (Opportunity)		Bobot	Rating	Skor
1				
2				
3				
4				
Sub Total Peluang Eksternal				

Ancaman (Threat)		Bobot	Rating	Skor
1				
2				
3				
4				
Sub Total Ancaman Internal				
Total				

Sumber: Rangkuti (2005)

Berdasarkan matriks di atas, maka dapat disusun matriks SWOT yang digunakan untuk menyusun strategi organisasi atau perusahaan yang menggambarkan secara jelas peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi/perusahaan sehingga dapat disesuaikan dengan kekuatan dan

kelemahan organisasi/perusahaan. Matriks ini menghasilkan empat kemungkinan alternatif strategi, yaitu Strategi S-O, Strategi W-O, Strategi S-T, dan Strategi W-T, yang dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3

Matriks SWOT

	<i>STRENGTHS (S)</i>	<i>WEAKNESSES (W)</i>
<i>OPPORTUNITIES (O)</i>	STRATEGI (SO)	STRATEGI (WO)
<i>THREATS (T)</i>	STRATEGI (ST)	STRATEGI (WT)

Keterangan:

- a. Strategi SO: Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
- b. Strategi ST: Merupakan strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.
- c. Strategi WO: Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
- d. Strategi WT: Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat *defensive* dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

D. Investasi Daerab

Menurut Lipsey (1995), investasi merupakan penyaluran sumber dana yang ada sekarang dengan mengharapkan keuntungan di masa yang akan

datang. Menurut Sukirno (2011:121), investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi dan menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Menurut Sunariyah (2003:4), investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Berdasarkan pengertian para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa investasi adalah suatu upaya mengelola uang dengan cara menyisihkan sebagian dari uang tersebut untuk di tanam pada bidang-bidang tertentu dengan harapan mendapat keuntungan di masa datang.

Tujuan investasi pemerintah daerah adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya adalah sebagai berikut:

1. keuntungan berupa deviden, bunga, dan pertumbuhan nilai perusahaan yang mendapatkan investasi pemerintah sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
2. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3. peningkatan pemasukan pajak bagi negara/daerah sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi bersangkutan dan/atau; serta

4. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi bersangkutan.

Menurut Mankiw (2003) investasi pemerintah dapat dilihat dari dua segi, yaitu investasi fisik dan investasi nonfisik. Investasi fisik antara lain berupa pembangunan infrastruktur yang bertujuan menyediakan sarana dan prasarana bagi pertumbuhan perekonomian serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Investasi nonfisik adalah pengembangan kapasitas sumber daya manusia di daerah berupa penyediaan layanan kesehatan dan peningkatan gizi masyarakat, penyediaan kesempatan pendidikan bagi anak usia sekolah, serta jaminan sosial lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal terbagi menjadi dua yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

1. Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman Modal Asing menurut Undang Undang No.25 tahun 2007 adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing seutuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri menurut Undang undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah kegiatan penanaman modal usaha di wilayah negara

Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Menurut Harjono (2013), faktor-faktor yang mempengaruhi investasi ada 2, yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal yang mempengaruhi investasi, antara lain adalah:

- a. Stabilitas politik dan perekonomian,
- b. Kebijakan dan langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi yang secara terus-menerus telah diambil oleh pemerintah dalam rangka pengkairahan iklim investasi.
- c. Diberikannya fasilitas perpajakan khusus untuk daerah tertentu, seperti penundaan pajak pertambahan nilai di Indonesia Bagian Timur.
- d. Tersedianya sumber daya alam yang berlimpah seperti minyak bumi, gas, bahan tambang dan hasil hutan maupun iklim dan letak geografis serta kebudayaan, dan keindahan alam.
- e. Tersedianya sumber daya manusia dengan upah yang kompetitif.

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal yang mempengaruhi investasi, antara lain adalah:

- a. Apresiasi mata uang dari negara-negara yang jumlah investasinya di Indonesia cukup tinggi. Adanya apresiasi mata uang negara asal investor terhadap mata uang rupiah, dapat mendorong para investor asing melakukan investasi langsung.

- b. Meningkatnya biaya produksi di luar negeri. Dengan pertimbangan ingin memperoleh tingkat keuntungan yang besar, maka para investor mulai berfikir untuk mengalihkan usahanya di luar negeri terutama di negara berkembang yang masih rendah upah tenaga kerjanya dan untuk mendekatkan produk dengan pasar, sehingga bagi perusahaan yang padat karya, dengan upah tenaga kerja yang rendah dan ongkos distribusi rendah akan menghemat biaya produksi.

Menurut *World Bank* indikator-indikator kemudahan berbisnis adalah sebagai berikut.

1. *Starting a business* (kemudahan memulai usaha)

Mencakup bagaimana prosedur yang harus dilakukan investor untuk memulai bisnis, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan prosedur-prosedur tersebut, dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus perizinan tersebut.

2. *Dealing with construction permits* (izin pembangunan)

Mencakup prosedur untuk mendirikan bangunan, waktu, biaya, serta penilaian atas kualitas pembangunan, keamanan pembangunan, dan asuransi.

3. *Getting electricity* (kemudahan mendapatkan energi listrik)

Mencakup ketersediaan energi listrik untuk menunjang bisnis yang akan dijalankan kedepannya.

4. *Registering property* (pendaftaran kepemilikan aset)

Mencakup mengenai kemudahan mengurus dokumen kepemilikan aset.

5. *Getting credits* (kemudahan mendapatkan pinjaman bank)

Kemudahan Mendapatkan Pinjaman Bank dilihat dari informasi yang tersedia mengenai kemudahan mendapatkan pinjaman, dan kepastian hukum yang mengatur hak peminjam dan pemberi pinjaman.

6. *Protecting minority investor* (perlindungan bagi penanam modal)

Kepastian hukum mengenai kegiatan penanaman modal dan hak serta kewajiban bagi para investor.

7. *Paying tax* (membayar pajak)

Mencakup bagaimana pembayaran pajak dan banyaknya yang harus dibayarkan, serta bagaimana pajak tersebut diajukan dan dibayar.

8. *Trading across borders* (perdagangan lintas negara)

Mencakup bagaimana proses dan ketentuan mengekspor, mengimpor barang, termasuk biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut.

9. *Enforcing contracts* (pemenuhan kontrak)

Mencakup bagaimana kemudahan mengurus kontrak kerja sama dalam berbisnis sesuai dengan hukum yang berlaku, dan berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurusnya.

10. *Resolving insolvency* (penyelesaian kepailitan)

Mencakup bagaimana proses penyelesaian kepailitan baik waktu, biaya, serta prosedurnya.

11. *Labour market regulation* (ketenagakerjaan)

Mencakup informasi mengenai sistem ketenagakerjaan, upah, dan jam kerja yang berlaku di daerah tersebut.

Menurut Kotler et al (2002), enam isu pokok yang akan menentukan keberhasilan suatu upaya pemasaran daerah adalah :

1. kebutuhan daya tarik dalam bentuk *place excellence*;
2. setiap daerah mengalami peningkatan tanggung jawab terhadap upaya pemasarannya sendiri;
3. integrasi teknologi informasi dan infrastruktur ke dalam rencana pemasaran. Teknologi memberikan kemampuan bagi daerah untuk bersaing memperebutkan peluang *Trade, Tourisme, dan Investment* (TTI);
4. semakin tingginya arti penting pengelolaan proses komunikasi pemasaran. *Marketing of places* merupakan disain aktivitas pencitraan daerah (*image*), promosi, dan distribusi informasi;
5. kecenderungan munculnya konflik antara *localisme* dan *regionalism* yang disebut dengan divergen di satu sisi, dan di sisi lain kecenderungan munculnya harmonisasi aturan di suatu daerah dan di dunia yang disebut dengan konvergen;
6. semakin terbatasnya tenaga kerja terlatih dan kebutuhan daerah untuk melakukan rekrutmen, penempatan kerja, dan pengembangan sumber daya manusia.

Menurut Kotler et al (2000), pemasaran daerah merupakan suatu aktivitas yang dikembangkan atas dasar empat kegiatan mendasar, yaitu:

1. mengembangkan *positioning* dan *image* daerah yang kuat dan atraktif;
2. menentukan insentif yang atraktif bagi *customers* saat ini maupun *potential customers*;
3. menyampaikan produk dan jasa berupa daerah dengan suatu cara yang dapat dilakukan secara efisien;
4. mempromosikan aktivitas dan manfaat yang dimiliki daerah untuk meyakinkan bahwa *customers* dan *potential customers* menyadari sepenuhnya keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh daerah.

E. Strategi Penanaman Modal dalam Menarik Investor dalam dan Luar Negeri

Strategi merupakan suatu cara, teknik, taktik, siasat, kiat dan ilmu didalam memanfaatkan segala sumber yang berisi garis besar haluan yang dilakukan seseorang untuk bertindak dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Investasi adalah suatu upaya mengelola uang dengan cara menyisihkan sebagian dari uang tersebut untuk ditanam pada bidang-bidang tertentu dengan harapan mendapat keuntungan di masa datang. Strategi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam menarik investor dalam dan luar negeri adalah sebagai berikut.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Strategi SDM adalah kebijakan pengelolaan karyawan yang diintegrasikan dengan strategi organisasi dan digunakan untuk mendorong budaya organisasi, agar karyawan memiliki nilai dan menjadi sumber keunggulan

bersaing. Sumber daya manusia sebagai salah satu strategi dalam menangani berbagai masalah manajemen yang lahir dari sistem aktivitas manusia (*human activity system*) (Bergvall-Kareborn, 2002; Martin, 2008).

Adanya sumber daya manusia yang terampil dan penuh dedikasi serta mempunyai kualitas yang diandalkan, lembaga atau instansi pemerintah diharapkan bisa terus mencapai kinerja yang tinggi. Pemberdayaan sumber daya manusia merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan agar sumber daya manusia dalam organisasi dapat digunakan untuk mencapai berbagai tujuan organisasi. Pemberdayaan sumber daya manusia merupakan cara yang praktis dan produktif untuk mendapatkan yang terbaik dari pimpinan dan dari stafnya.

Pemberdayaan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, mutasi, bahkan promosi. Hal ini dilakukan dengan atau tanpa melihat struktur organisasi, disamping itu tujuan dari pemberdayaan itu sendiri untuk memberikan dorongan, motivasi serta kemampuan yang dimiliki supaya sumber daya manusia dapat dikembangkan guna kepentingan instansi yang berkaitan dengan cara memberikan keleluasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain, yang tentunya berkaitan dengan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pekerjaannya.

Dalam kaitan ini, terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM antara lain, pertama adalah sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, maka

diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang efektif dan efisien, berorientasikan pada penguasaan iptek, serta merata di seluruh pelosok tanah air.

2. Promosi

Menurut Fandy Tjiptono, strategi promosi penjualan adalah perencanaan aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan permintaan dari para konsumen untuk meningkatkan volume dan omset penjualan. Aktivitas tersebut dilakukan dengan mempengaruhi secara langsung konsumen dalam keputusan pembelian. Sementara Cravens mengemukakan bahwa strategi promosi penjualan merupakan rencana dan proses pengendalian komunikasi dalam perusahaan yang ditujukan pada target konsumen. Berdasarkan pengertian strategi promosi yang dikemukakan oleh kedua ahli tersebut maka dapat ditarik kesimpulan. Strategi promosi penjualan atau pemasaran adalah proses perencanaan akan aktivitas perusahaan untuk meraih tujuan pemasaran yaitu peningkatan omzet dan volume penjualan dengan mempengaruhi keputusan pembelian dari target konsumen.

Strategi promosi bertujuan untuk merangsang pembelian kembali, meraih para konsumen baru, memberi pengaruh terhadap pembelian produk baru, serta menyaingi strategi promosi penjualan yang dilakukan pesaing. Penjelasan lain tentang tujuan strategi promosi, yaitu memusatkan pada

pengaruhnya terhadap keputusan konsumen dalam rangka peningkatan volume penjualan. Strategi ini berlaku bagi strategi promosi produk baik barang maupun strategi promosi jasa.

Terdapat empat jenis kegiatan promosi yang dapat dilakukan, di antaranya:

a. *Advertising*/periklanan

Bentuk promo secara tidak langsung melalui bermacam-macam media yang digunakan dengan maksud untuk mengajak konsumen dalam melakukan transaksi pembelian.

b. *Direct selling*/penjualan dengan tatap muka

Promosi penjualan yang dilakukan secara langsung dengan tatap muka/bertemu antara penjual dan pembeli. Langkah ini ditujukan untuk mengenalkan produk tertentu kepada konsumen. Selain itu *direct selling* juga membentuk pemahaman konsumen pada produk supaya konsumen terdorong untuk mencoba dan membeli produk.

c. *Publication*/publikasi

Langkah promosi untuk mendorong permintaan pelanggan akan suatu produk secara tidak personal/tidak langsung yang berisi konten komersial. Konten tersebut digunakan untuk mempromosikan produk yang disebarkan melalui media cetak, elektronik, atau hasil wawancara/diskusi pada media tersebut.

d. *Sales promotion*/promosi penjualan

Bentuk kegiatan promosi selain ketiga langkah sebelumnya yang bertujuan mendorong pelanggan untuk membeli produk tertentu.

Contoh jenis promosi ini seperti melalui pameran, demonstrasi atau peragaan.

3. Pengembangan infrastruktur daerah

Pengertian infrastruktur menurut *American Public Works Association* (Stone, 1974 dalam Kodoatie, R.J., 2005), adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Jadi, infrastruktur merupakan sistem fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Komponen-komponen di dalam infrastruktur menurut APWA (*American Public Works Association*) adalah Sistem penyediaan air, seperti waduk, penampungan air, transmisi dan distribusi, fasilitas pengolahan air (*water treatment*). Sistem pengelolaan air limbah, seperti pengumpul, pengolahan, pembuangan, daur ulang; Fasilitas pengelolaan limbah padat; Fasilitas pengendalian banjir, drainase dan irigasi; Fasilitas lintas air dan navigasi; Fasilitas transportasi, seperti jalan, rel, bandar udara (termasuk tanda-tanda lalu lintas dan fasilitas pengontrol; Sistem transit publik; Sistem kelistrikan, seperti produksi dan distribusi listrik; Fasilitas gas alam; Gedung public, seperti sekolah, rumah sakit; Fasilitas perumahan public, seperti taman kota sebagai daerah resapan, tempat bermain termasuk stadion; dan Komunikasi.

Dilihat dari input - output bagi penduduk, komponen-komponen tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga karakteristik sebagai berikut.

- a. Komponen yang memberi input kepada penduduk. Jenis infrastruktur yang termasuk dalam kategori ini adalah prasarana air minum dan listrik.
 - b. Komponen yang mengambil output dari penduduk. Jenis infrastruktur yang termasuk dalam kelompok ini adalah prasarana drainase/pengendalian banjir, pembuangan air kotor/sanitasi, dan pembuangan sampah.
 - c. Komponen yang dapat dipakai untuk memberi input maupun mengambil output. Jenis infrastruktur yang termasuk dalam kelompok ini meliputi prasarana jalan dan telepon.
4. Sistem Informasi Berbasis IT/Internet

Sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustēma*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan pendapat O'Brien (2003: 29), sistem adalah sekelompok komponen yang saling berhubungan, bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima input serta menghasilkan output dalam proses transformasi yang teratur. Sistem informasi dapat merupakan kombinasi teratur dari orang-orang, *hardware*, *software*, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan,

mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi (O'Brien, 2003:5).

Berdasarkan pendapat Bysinger (1996:44), teknologi dapat menciptakan keuntungan strategis untuk sebuah organisasi dalam kemajuan pada beberapa daerah dan kemampuannya, contohnya:

- a. pelayanan terhadap pelanggan;
- b. kemampuan untuk mempercepat kemajuan;
- c. menyesuaikan produk dan pelayanan;
- d. mendapatkan pesan untuk stakeholder;
- e. biaya operasi dan biaya tambahan.

Menurut O'Brien (2003:10) terdapat tiga peran utama dari sistem informasi aplikasi bisnis, yaitu :

- a. mendukung proses dan operasi bisnis;
- b. mendukung pengambilan keputusan para pegawai dan manajernya ;
- c. mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif;
- d. mendapatkan kelebihan strategis atas para pesaing membutuhkan penggunaan yang inovatif atas teknologi informasi.

5. Kualitas Pelayanan

Menurut Supranto, kualitas pelayanan adalah sebuah hasil yang harus dicapai dan dilakukan dengan sebuah tindakan. Menurut Tjiptono, kualitas pelayanan adalah suatu keadaan dinamis yang berkaitan erat dengan produk, jasa, sumber daya manusia, serta proses dan lingkungan yang setidaknya

dapat memenuhi atau malah dapat melebihi kualitas pelayanan yang diharapkan.

Dalam kualitas pelayanan yang baik, terdapat beberapa jenis kriteria pelayanan, antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Ketepatan waktu pelayanan, termasuk didalamnya waktu untuk menunggu selama transaksi maupun proses pembayaran.
- b. Akurasi pelayanan, yaitu meminimalkan kesalahan dalam pelayanan maupun transaksi.
- c. Sopan santun dan keramahan ketika memberikan pelayanan.
- d. Kemudahan mendapatkan pelayanan, seperti tersedianya sumber daya manusia untuk membantu melayani konsumen, dan fasilitas pendukung seperti komputer untuk mencari ketersediaan suatu produk
- e. Kenyamanan konsumen, seperti lokasi, tempat parkir, ruang tunggu yang nyaman, aspek kebersihan, ketersediaan informasi, dan lain sebagainya.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian relevan terkait dengan strategi pemerintah dalam menarik investor untuk melakukan investasi di daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Mega Dayana Putri (2015)	Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Investasi di Kabupaten Cirebon (Kab.) Tahun 2015	Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat empat strategi yang dilakukan Pemerintah Kab. Cirebon untuk menarik investasi. Keempat strategi itu adalah <i>image</i> , <i>attraction</i> , <i>infrastruktur</i> dan <i>people marketing</i> . Secara keseluruhan strategi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Cirebon berjalan dengan baik hal ini ditempuh untuk menyejahterakan masyarakat. Tetapi, hasilnya belum optimal atau belum berhasil karena belum terdapat kepastian dan kejelasan aturan hukum mengenai penanaman modal serta perizinan. Selama ini proses pengurusan perizinan secara birokratis dirasa sangat sulit. Strategi yang telah dilakukan pemerintah hanya tampak pada peningkatan realisasi investasi, tetapi tidak berdampak signifikan terhadap pembangunan daerah dan masyarakat secara merata.	Penelitian mengenai strategi pemerintah daerah untuk menarik investasi.	Lokus penelitian Mega Dayana Putri di Kab. Cirebon, sedangkan lokus penelitian ini Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, penelitian ini juga meneliti mengenai kualitas pelayanan perizinan di Provinsi Kalimantan Utara dengan menggunakan Teori Musa Hubais dan Mukhamad Najib.

2	Ade Suhendra (2017)	Pro Investasi dalam Meningkatkan Investasi Daerah di Kab. Boyolali	Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Boyolali melakukan terobosan dengan menciptakan inovasi kebijakan dan inovasi teknologi. Wujud inovasi kebijakan meliputi pembuatan regulasi yang memudahkan mengurus perizinan di daerah. Adapun kebijakan pemerintah daerah Boyolali dalam menarik investor untuk berinvestasi. Kebijakan itu menyediakan kebijakan kompetitif, yaitu pengurusan tanpa biaya di 44 perizinan dari 46 perizinan. Selain itu Pemerintah Daerah Boyolali juga menciptakan inovasi teknologi, yaitu membuat tujuh aplikasi pelayanan perizinan, seperti (a) sistem informasi perizinan online (SIPO), (b) aplikasi SMS gateway, (c) aplikasi peta potensi, (4) Anjungan informasi, (5) e-dokumen, (6) cek status proses (<i>tracking</i>), dan (7) informasi rekap izin terbit.	Penelitian mengenai strategi pemerintah daerah untuk menarik investasi.	Ade Suhendra meneliti segi inovasi kebijakan perizinan, sedangkan penelitian ini melihat empat strategi memasarkan daerah secara umum. Selain itu, penelitian ini juga meneliti mengenai kualitas pelayanan perizinan di Provinsi Kalimantan Utara dengan menggunakan Teori Musa Hubais dan Mukhamad Najib.
3	Aurora Adereiny (2012)	Strategi Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah	Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas BPMPD adalah hambatan rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur, minimnya anggaran,	Penelitian mengenai strategi pemerintah daerah untuk	Aurora Adereiny meneliti strategi dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam investasi, sedangkan penelitian ini melihat empat strategi

		(BPMPD) Provinsi Riau dalam Meningkatkan Investasi di Provinsi Riau Tahun 2009-2011	kurangnya koordinasi antar institusi baik horizontal maupun vertikal serta kurangnya penerapan teknologi dan sistem informasi. Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan oleh BPMPD dilakukan melalui dua cara (a) peningkatan program/kegiatan yang disusun dalam rencana kerja badan yang terdiri dari dua belas item kegiatan, (b) peningkatan kapasitas aparatur pada BPMPD melalui tiga kegiatan pokok. Selain itu, masih terdapat hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh BPMPD, yaitu masih adanya <i>image negative</i> dari kalangan investor asing terhadap kondisi keamanan, ketertiban masyarakat, dan sosial politik di Indonesia.	menarik investasi.	memasarkan daerah secara umum. Selain itu, penelitian ini juga meneliti mengenai kualitas pelayanan perizinan di Provinsi Kalimantan Utara dengan menggunakan Teori Musa Hubais dan Mukhamad Najib.
4.	Harikah Maya Sari, Anwar As, Melati Dama (2017)	Strategi Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Meningkatkan Iklim Investasi di Kota Samarinda	Strategi yang digunakan oleh DPMPTSP dalam meningkatkan iklim investasi berpengaruh positif terhadap peningkatan iklim investasi dengan melihat jumlah total keseluruhan PMDN dan PMA setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan grafik garis pertumbuhan PMDN dan PMA yang terus mengalami peningkatan. Adapun strategi yang	Penelitian mengenai strategi pemerintah daerah untuk menarik investasi.	Harikah Maya Sari, Anwar As, Melati Dama meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi investasi, sedangkan penelitian ini melihat empat strategi memasarkan daerah secara umum. Selain itu, penelitian ini juga meneliti mengenai kualitas pelayanan perizinan di Provinsi Kalimantan Utara dengan menggunakan Teori

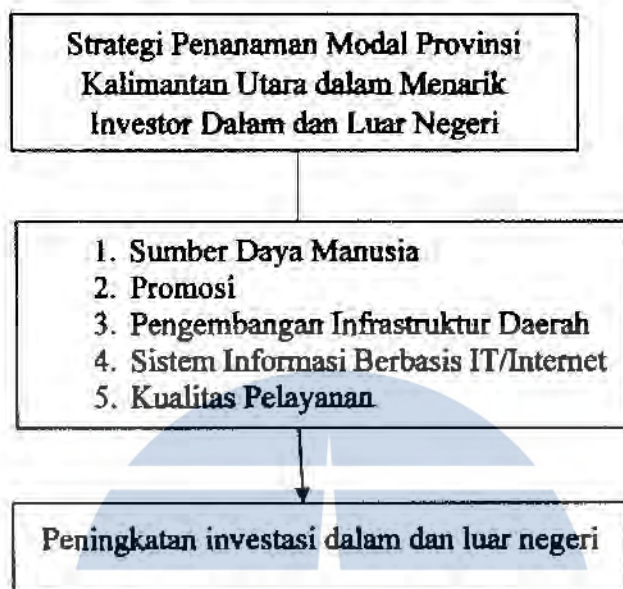
			digunakan adalah pelaksanaan promosi, memperbaiki kualitas pelayanan serta meningkatkan capaian investasi serta melihat faktor yang mempengaruhi peningkatan iklim investasi di Kota Samarinda.		Musa Hubais dan Mukhamad Najib.
5.	Leny Ismayanti (2015)	Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kab. Malang	Efektivitas penyelenggaraan pelayanan terpadu tidak dapat mencapai tujuan penyelenggaraannya. Hal ini dibuktikan dengan tidak tercapainya target retribusi dan penurunan jumlah izin terbit pada tahun 2014. Faktor yang mendukung adalah luas wilayah Kabupaten Malang dan adanya wewenang pelimpahan 61 izin dari Bupati. Dan faktor penghambatnya adalah terbatasnya anggaran sosialisasi dan publikasi, tim teknis yang tidak berada dalam satu gedung dan personil yang tidak sesuai kompetensi	Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Leny Ismayanti meneliti efektivitas penyelenggaraan pelayanan perizinan, sedangkan penelitian ini melihat empat strategi memasarkan daerah secara umum. Selain itu, penelitian ini juga meneliti mengenai kualitas pelayanan perizinan di Provinsi Kalimantan Utara dengan menggunakan Teori Musa Hubais dan Mukhamad Najib.
6.	Bagus Yoga Dwi G, Priyanto Susiloadi (2017)	Manajemen Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sepuluh indikator, 2 indikator belum mencapai target dengan tepat, yaitu kelengkapan dan kenyamanan infrastruktur. Infrastruktur yang tidak memadai hanya mencakup	Penelitian membahas mengenai pelayanan terpadu.	Bagus Yoga Dwi G, Priyanto Susiloadi menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Selain itu, penelitian ini juga meneliti mengenai

		Pintu dalam Pelayanan Perizinan di Kota Surakarta	1 unit mobil dinas yang tersedia, sedangkan mengenai indikator kenyamanan, ruang tunggu masih kecil. Sementara 8 indikator lainnya telah diimplementasikan dengan baik.		kualitas pelayanan perizinan di Provinsi Kalimantan Utara dengan menggunakan Teori Musa Hubais dan Mukhamad Najib.
7.	Nuria Siswi Enggarani	Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kab. Boyolali	Dari segi pelayanan sendiri, dari hasil survei BPMP2T menduduki peringkat ke-4 se Indonesia. Dari segi kedisiplinan pun, pelayanan sesuai dan tepat waktu dari jadwal yang telah ditentukan. Selain itu, ditinjau dari kapasitas pemberian pelayanan didukung dengan sebagian besar berasal dari lulusan S1. Ini cukup menunjang kinerja badan perizinan BPMP2T untuk mengutamakan segi kualitas dan kuantitas dalam pelayanan perizinan dalam rangka mewujudkan <i>bestuur zorg</i> untuk masyarakat.	Penelitian membahas mengenai kualitas pelayanan terpadu.	Nuria Siswi Enggarani meneliti kinerja badan perizinan BPMP2T, sedangkan penelitian ini membahas mengenai strategi investasi. Selain itu, penelitian ini juga meneliti mengenai kualitas pelayanan perizinan di Provinsi Kalimantan Utara dengan menggunakan Teori Musa Hubais dan Mukhamad Najib.
8.	Bimmor Faizal Risky (2017)	Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam Meningkatkan Investasi Daerah Tahun 2015 – 2016	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi sosial yang dilakukan dalam meningkatkan investasi adalah dengan merutinkan sosialisasi kepada masyarakat di daerah-daerah yang bermasalah tentang pentingnya investasi, strategi politik adalah menjaga stabilitas	Persamaan penelitian Bimmor Faizal Risky dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode	Bimmor Faizal Risky meneliti strategi politik, strategi ekonomi, dan strategi administratif, sedangkan penelitian ini membahas mengenai strategi investasi dengan indikator lain. Selain itu, penelitian ini juga meneliti mengenai kualitas pelayanan perizinan di Provinsi

			politik, strategi administratif yang dilakukan adalah memangkas regulasi perizinan, strategi ekonomi adalah menciptakan tenaga kerja yang berkompeten, namun dengan gaji tidak terlalu tinggi.	kualitatif deskriptif.	Kalimantan Utara dengan menggunakan Teori Musa Hubais dan Mukhamad Najib.
--	--	--	--	------------------------	---

G. Kerangka Berpikir

Era otonomi daerah memberi ruang bagi keikutsertaan pemerintah daerah dalam pengelolaan penanaman modal. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dijabarkan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya yang ruang lingkupnya antarkabupaten atau kota. Bentuk kewenangan pemerintah daerah dalam penanaman modal juga dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah pada matriks pembagian urusan pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten atau kota. Perwujudan keikutsertaan pemerintah daerah tersebut terlihat dengan dibentuknya Dinas Penanaman Modal Daerah pada masing-masing wilayahnya selaku Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal (PDPPM). Untuk lebih jelasnya kerangka berpikir dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini.

Gambar 2.1**Kerangka Berpikir**

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2011:5) adalah penelitian yang menggunakan latar belakang ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metode deskriptif menurut Nazir (2011:54) adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dengan demikian penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.

Penelitian kualitatif deskriptif ini menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih, hubungan antarvariabel, perbedaan antarfakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. Pada penelitian ini maka peneliti berusaha untuk menafsirkan dan menuturkan segala data mengenai Strategi Dinas Penanaman Modal Daerah dalam meningkatkan investasi di Provinsi Kalimantan Utara.

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Informan adalah objek penting dalam sebuah penelitian. Informan adalah orang-orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Dalam hal ini peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data.

Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1

Informan Penelitian

No.	Klasifikasi Informan	Contohnya
1.	Pengambil Kebijakan	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara
2.	Pelaksana Kebijakan	Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara
3.	User	Investor baik dalam negeri maupun luar negeri
4.	Pengawas Kebijakan	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Republik Indonesia Ombudsman Republik Indonesia

C. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian harus benar-benar dipertimbangkan sehingga dapat diperoleh data yang dibutuhkan dan tercapainya tujuan penelitian itu sendiri. Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian dilakukan. Lokasi dalam penelitian ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi baru yang sedang giat untuk mendorong masuknya investasi baik yang berasal dari investor asing maupun investor dalam negeri. Provinsi Kalimantan Utara juga merupakan provinsi termuda yang letaknya sangat strategis karena berbatasan dengan negara tetangga sehingga memiliki peluang besar untuk menarik investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, karena pada tahun 2017 yang lalu pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara dikatakan buruk oleh Ombudsman Perwakilan Kalimantan Utara sehingga sangat menarik untuk melihat proses pelayanan publik pada dinas ini.

D. Jenis Data

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Jenis-jenis data dapat dibagi berdasarkan sifatnya, sumbernya, cara memperolehnya, dan waktu pengumpulannya. Menurut sifatnya, jenis-jenis data dapat dibedakan sebagai berikut.

1. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka, misalnya hasil wawancara dan pengamatan serta dokumentasi selama penelitian.
2. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, misalnya rekapitulasi daftar investasi Provinsi Kalimantan Utara dari tahun ke tahun.

E. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto (2013:172), sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2013:142), sumber data adalah faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data disamping jenis data yang telah dibuat di muka. Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sumber data adalah faktor yang paling penting dalam penentuan metode pengumpulan data untuk mengetahui darimana subjek data tersebut diperoleh.

Sementara itu, sumber data terdiri dari dua sebagai berikut.

1. Data Primer

Menurut Husein Umar (2013:42), data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan, seperti hasil dari wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti. Sedangkan menurut Nur Indrianto dan Bambang Supono (2013:142) data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dari definisi di atas maka data primer adalah data yang langsung dapat dan disajikan sebagai sumber dari penelitian dan

pengamatan secara langsung pada objek atau perusahaan tempat penulis melakukan penelitian.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara melalui wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Menurut Husein Umar (2013:42), data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2013:143), data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Dari definisi data sekunder di atas, maka data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain yang sudah tersedia sebelum penulis melakukan penelitian. Contoh data sekunder adalah catatan atau arsip perusahaan, buku-buku mengenai investasi, dokumentasi, dan publikasi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data primer untuk kepentingan penelitian yang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam memperoleh data yang akurat, relevan, dan

dapat dipertanggungjawabkan dan diyakini kebenarannya. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. Wawancara

Menurut Emzir (2016:50), wawancara didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang terstruktur. Alasan wawancara terstruktur dipilih oleh peneliti adalah karena peneliti telah mempersiapkan instrumen pertanyaan dan alternatif jawaban (Sugiyono, 2009:319). Dengan demikian, informasi yang akan didapatkan oleh peneliti telah diketahui secara pasti oleh peneliti.

2. Observasi Non Partisipan

Observasi non partisipan (Emzir, 2016:40) adalah observasi yang menjadikan peneliti sebagai penonton atau penyaksi terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian. Dalam observasi non partisipan ini peneliti melihat atau mendengar pada situasi sosial tertentu tanpa partisipasi aktif di dalamnya. Peneliti berada jauh dari fenomena topik yang diteliti. Sebagai contoh, peneliti memerhatikan aktivitas para perumus kebijakan, pelaksana kebijakan dan investor mempergunakan kaca satu arah atau mendengarkan percakapan mereka di balik tabir.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2009:240) adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini, dokumen sangat diperlukan untuk pengumpulan data dengan mencatat atau melihat data dalam bentuk apapun dan dokumen yang tersedia yang erat kaitannya dengan objek penelitian dalam setiap penelitian.

G. Metode Analisis Data

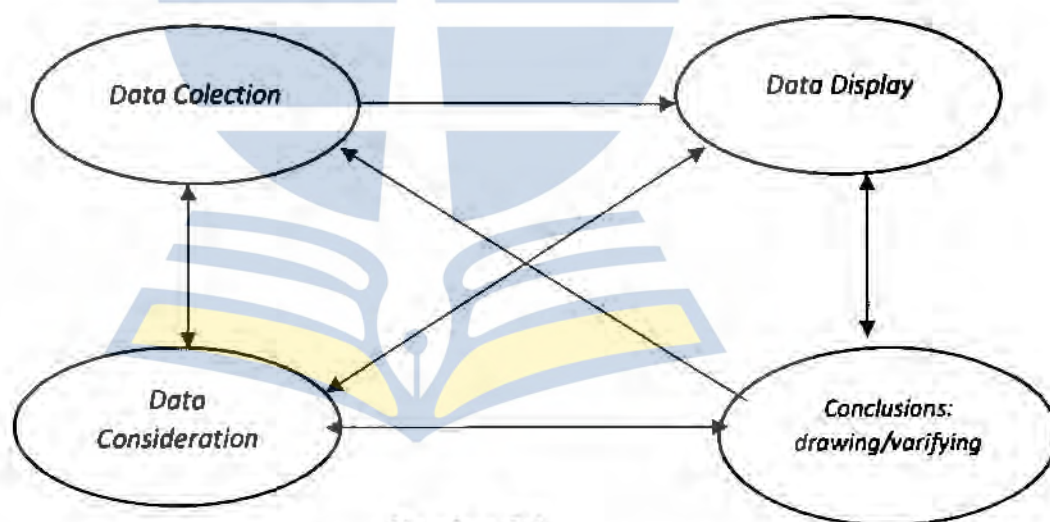
Analisis data menurut Moleong (2011:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014) melalui tahapan kondensasi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara dilakukan sejak sebelum terjun ke lapangan, observasi, selama pelaksanaan penelitian di lapangan dan setelah selesai penelitian di lapangan. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi data yang diperoleh ke dalam sebuah

kategori, menjabarkan data kedalam unit-unit, menganalisis data yang penting, menyusun atau menyajikan data yang sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar mudah untuk dipahami.

Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Adapun Analisis data model interaktif dapat dilihat pada Gambar 3.1 di bawah ini.



Gambar 3.1.
Komponen-Komponen Analisis dan Metode Interaktif
Sumber: Miles dan Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014:14)

Komponen-komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai berikut (Miles, Huberman dan Saldana, 2014:31-33).

1) Kondensasi data (*data condensation*)

Kondensasi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian dan pengubahan data-data yang muncul dalam keseluruhan dokumen-dokumen atau materi tertulis penelitian. Proses dari kondensasi data dimulai sejak peneliti memutuskan kerangka kerja, kasus untuk diteliti, pembuatan data pertanyaan, dan pendekatan pengumpulan data. Kemudian kondensasi data juga terjadi ketika menuliskan ringkasan, pengelompokan data, mengembangkan tema, dan penulisan memo analisis. Proses ini terus berjalan hingga penulisan penelitian selesai.

2) Penyajian data (*data display*)

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Penyajian data adalah upaya merangkai informasi hasil temuan yang terorganisir dalam upaya menggambarkan kesimpulan dan mengambil tindakan. Data dapat ditampilkan dalam rupa matriks, grafik, bagan, dan narasi, yang seluruhnya didesain untuk menghimpun data-data yang telah terorganisir menjadi bentuk yang padar dan mudah diakses agar peneliti dapat melihat apa yang terjadi dan mengambil kesimpulan.

3) Penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

Penarikan kesimpulan adalah aktivitas analisis di mana pada awal pengumpulan data, peneliti memutuskan bermakna tidaknya suatu hal, berikut juga dengan keteraturan, pola, penjelasan, kemungkinan konfigurasi, hubungan sebab akibat hingga preposisi. Penarikan kesimpulan juga diverifikasikan dalam proses analisis. Verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisis data yang

ditandai dengan menarik kesimpulan yang dianggap paling tepat untuk menggambarkan hasil penelitian.

H. Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal penelitian yang telah ditentukan. Jadwal penelitian pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini.



Tabel 3.2

Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Waktu Penelitian (2018)																															
		Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
1.	Penyusunan dan uji proposal																																
2.	Pengurusan izin administrasi penelitian																																
3.	Pengumpulan data																																
4.	Analisis dan penafsiran data																																
5.	Penyusunan laporan akhir																																
6.	Seminar hasil penelitian																																
7.	Perbaikan hasil seminar penelitian																																
8.	Sidang tesis																																
9.	Perbaikan hasil sidang tesis																																
10.	Pengumpulan tesis																																

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara)

1. Letak Geografis, Batas Wilayah, dan Kondisi Topografi

Kondisi topografi merupakan elemen dasar dari suatu wilayah untuk mengetahui karakteristik fisik suatu daerah. Karakteristik fisik akan mempengaruhi pola dan jenis pembangunan yang akan diterapkan di wilayah tersebut. Kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan air laut merupakan indikator untuk mengetahui kondisi topografi di suatu daerah. Hampir setengah dari total luasan wilayah provinsi ini memiliki kelas ketinggian antara 500-1.000 m di atas permukaan laut (38,77%), hanya sekitar 5,92% yang memiliki kelas ketinggian 0-7 m di atas permukaan laut. Perkembangan pembangunan diperkirakan akan mengelompok di wilayah yang memiliki ketinggian relatif lebih landai, sedangkan wilayah pegunungan di Provinsi Kalimantan Utara dapat dijadikan kawasan lindung dan *recharge area* (daerah resapan air). Sebagian besar wilayah Kabupaten Bulungan berada pada ketinggian 100-500 m di atas permukaan laut (31,61%). Kabupaten Malinau dan Nunukan didominasi oleh wilayah yang berada di kelas ketinggian 500-1.000 m di atas permukaan laut, yaitu masing-masing 58,46% dan 24,12%. Kabupaten Tana Tidung didominasi oleh wilayah dengan ketinggian 7-25 m di atas permukaan laut dan hanya sebagian kecil yang memiliki ketinggian 100-500 m di atas permukaan laut (0,01%). Sedangkan Kota Tarakan didominasi oleh kelas ketinggian 7-25 m di atas permukaan laut (72,41%), sementara sisanya (27,59%) berada pada ketinggian 0-7 m di atas permukaan laut (Kalimantan Utara dalam Angka, *bps.go.id*, diakses pada September 2018).

2. Kondisi Klimatologi

Kondisi klimatologi Provinsi Kalimantan Utara hampir sama dengan wilayah lain di Indonesia, yaitu beriklim tropis, terlebih letak provinsi ini berada di utara lintang 0° . Suhu udara maksimal terjadi pada bulan April dan Agustus dengan 34°C dan minimal terjadi pada bulan Januari, Februari, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan Desember, yaitu 24°C . Kondisi rata-rata kelembapan udara tahun 2016 di provinsi ini mencapai angka 83,75% serta memiliki tekanan udara rata-rata 1.009,83 Mbs. Untuk keadaan kecepatan angin terdapat dalam *range* yang tidak terlalu fluktuatif, yaitu 4,16 knot. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan September dengan $510,1 \text{ mm}^3$, sedangkan paling rendah terjadi pada bulan April dengan $98,5 \text{ mm}^3$. Rata-rata penyinaran matahari 55,75 % (Kalimantan Utara Dalam Angka, *bps.go.id*, diakses pada September 2018).

3. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi wilayah Provinsi Kalimantan Utara dapat berupa air permukaan dan air bawah permukaan (air tanah). Air permukaan tercermin sebagai aliran sungai yang terbagi menjadi beberapa DAS (daerah aliran sungai), mata air, dan air tanah. Kawasan resapan air terletak di daerah pegunungan dan perbukitan yang terletak di bagian barat, di antaranya terdapat di Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Nunukan, sedangkan kawasan tangkapan air terletak di bagian timur yang berupa dataran *aluvial* dan dataran *fluvial*. Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi Sumber Daya Air (SDA) yang sangat besar. SDA tersebut terdiri dari jumlah curah hujan di Kalimantan Utara yang cukup tinggi, sungai-sungai besar, mata air yang banyak, dan rawa yang luas. Potensi yang besar tersebut banyak dimanfaatkan untuk menunjang kesejahteraan dan membantu kehidupan masyarakat Kalimantan Utara. Namun, karena peran SDA sangat besar tersebut juga membuat potensi daya rusak dan pencemaran sangat mungkin meningkat.

Sungai merupakan bagian penting dari DAS, sangat berperan penting bagi kehidupan dan aktivitas masyarakat Provinsi Kalimantan Utara. Sungai-sungai yang ada di wilayah ini, antara lain Sungai Kayan, Sungai Sesayap, Sungai Pimping, Sungai Bandan, Sungai Sekatak, Sungai Jelarai, Sungai Linuang Kayan, Sungai Betayau, Sungai Sembakung, Sungai Mandul, Sungai Semandak, Sungai Mintut, Sungai Manguli. Sungai tersebut merupakan media transportasi air bagi masyarakat. Selain itu, sungai tersebut juga sebagai sumber mata pencaharian nelayan tradisional di wilayah ini.

Berdasarkan hasil inventarisasi jumlah sungai dalam dokumen SLHD tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Kalimantan Utara memiliki 123 sungai dengan sungai terpanjang, yaitu Sungai Pamusian dengan panjang 20.178 km, sedangkan sungai terpendek, yaitu Sungai Bebakin yang hanya memiliki panjang 1 km. Untuk kategori sungai terlebar, Sungai Kayan menjadi yang utama dengan lebarnya yang mencapai 550 km. Sementara Sungai Bebakil menjadi sungai tersempit karena hanya memiliki lebar 2 m. Walaupun bukan sungai yang terpanjang ataupun terlebar di Kalimantan Utara, Sungai Naha Aya memiliki debit maksimum, yaitu 1.992,52 m³/detik. Kalimantan Utara hanya memiliki Danau Kelaputan Mangkupadi yang terletak di Kabupaten Bulungan seluas 6 ha. Sementara untuk waduk dan embung semakin bertambah. Pada 2014, Kalimantan Utara memiliki 24 buah waduk dan 10 embung, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya terdapat 9 buah waduk dan 11 embung. Sedangkan situ tidak terdapat di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Waduk yang terluas dan volume paling besar, yaitu Waduk Irigasi Binusan di Kab. Nunukan dengan luas 3,6 ha dan volume 3000 m³. Sementara itu, Embung Air Baku Bolong di Kab. Nunukan menjadi embung terluas dan memiliki volume terbesar di provinsi ini. Luas embung tersebut, yaitu 13,44 ha dengan volume 294.500 m³.

4. Jumlah Penduduk

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, di samping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Penduduk berperan sebagai subyek dan obyek pembangunan. Selain itu, penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi, sebaliknya apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas pelayanan publik dan sebagainya. Jika dilihat secara umum, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2012 sampai 2017 selalu mengalami peningkatan, dengan total jumlah penduduk 691.058 jiwa tahun 2017. Jumlah penduduk terbanyak di Kota Tarakan (253.026 jiwa tahun 2017), sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di Kab. Tana Tidung (25.084 jiwa tahun 2017) (Kalimantan Utara dalam Angka, *bps.go.id*, diakses pada September 2018).

B. Potensi dan Peluang Investasi Provinsi Kalimantan Utara

1. Potensi Mineral dan Pertambangan

Ditinjau dari sudut geologi, Provinsi Kalimantan Utara terletak pada dua cekungan sedimen tersier utama yang mempunyai pengaruh besar terhadap proses pembentukan sumber daya mineral di wilayah ini. Kedua cekungan tersebut adalah (a)

cekungan nunukan yang meliputi daerah Kab. Nunukan dan Kab. Malinau, (b) cekungan tarakan yang meliputi daerah Kota Tarakan, Kab. Berau, dan Kab. Bulungan.

Potensi mineral dan pertambangan yang sudah terdeteksi di Kalimantan Utara, antara lain batu bara, emas, minyak dan gas bumi, serta batu gamping sebanyak 654 ribu ton di Kab. Malinau dan 25 ribu ton di Kab. Nunukan, pasir batu (sirtu) 2,50 juta ton di Kab. Nunukan dan pasir kuarsa sebanyak 1 milyar ton di Kab. Nunukan.

2. Potensi Sektor Kehutanan

Luas hutan Kalimantan Utara sekitar 9.306.346 ha. Terbagi menjadi 5 (lima) jenis hutan, yaitu hutan lindung, hutan suaka alam dan wisata, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan area penggunaan lain (non kawasan hutan). Luas dari 5 (lima) jenis hutan tersebut adalah hutan lindung 1.053.531 ha, hutan suaka alam dan wisata 1.695.474 ha, hutan produksi terbatas 1.872.556 ha, hutan produksi tetap 1.491.065 ha, dan hutan area penggunaan lain (non kawasan hutan) 3.193.720 ha. Daerah kabupaten/kota yang mempunyai kawasan hutan terluas, yaitu Kab. Malinau dengan luas areal hutan mencapai 5.921.398 ha, disusul Kab. Bulungan 1.806.924 ha, Kab. Nunukan 1.571.126 ha, dan Kota Tarakan 6.898 ha, sedangkan Kab. Tana Tidung datanya belum ada. Produksi hutan antara lain kayu bundar, kayu olahan, kayu olahan lainnya termasuk kayu gergajian, *blackboard*, *vaneer*, dan lainnya.

3. Potensi Sektor Pertanian

Pertanian merupakan bidang prioritas dalam program pembangunan di Kalimantan Utara, di mana Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan menjadikan Kalimantan Utara sebagai lumbung pangan di Indonesia. Untuk mewujudkan dan mendukung program tersebut pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan terus mengupayakan peningkatan di bidang pertanian. Potensi pertanian yang dapat

dikembangkan di Kalimantan Utara adalah padi kayan *food estate* dengan luas lahan ± 50.000 ha.

Terdapat beberapa perusahaan besar yang menanamkan investasinya di sektor pertanian berupa tanaman padi dan palawijaya. PT. Sang Hyang Sri (SHS) bergerak dalam bidang budidaya jagung dengan kebun inti direncanakan seluas 3.200 ha. PT. Nusa Agro Mandiri (Solaria Group) bergerak dibidang budidaya kedelai, jagung, dan air tawar dengan area 1.980 ha telah melakukan *demplo* seluas 3 ha.

Tabel 4.1
Luas Panen Hasil Per Hektar dan Produksi Padi Sawah
menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013

Kabupaten/Kota	Luas Panen (Ha)	Hasil Per Ha (Kw)	Produksi (Ton)
Malinau	2.957	39,67	10.548
Bulungan	12.691	42,40	53.810
Tana Tidung	468	40,48	1.894
Nunukan	5.470	46,99	25.704
Tarakan	69	48,04	331
Jumlah	21.655	42,62	92.287

Sumber Data: Profil dan Peluang Bisnis Kalimantan Utara

4. Potensi Sektor Perkebunan

Potensi Perkebunan yang bisa dikembangkan di Provinsi Kalimantan Utara antara lain:

a. Karet

Tanaman karet di Kaltara merupakan komoditi tradisional yang sudah relatif lama diusahakan sebagai perkebunan rakyat, namun karena pengaruh harga yang berfluktuasi sangat tajam usaha perkaretan beberapa waktu yang lalu sempat ditinggalkan oleh petani perkebunan untuk beralih kepada usaha lain yang dianggap lebih menguntungkan. Namun saat ini seiring dengan semakin membaiknya harga karet di pasaran, komoditi karet kembali banyak diusahakan oleh masyarakat dan di beberapa tempat komoditi tersebut merupakan sumber mata pencaharian utama

masyarakatnya. Luas areal tanam karet pada tahun 2013 tercatat seluas 941 ha yang terdiri dari areal perkebunan rakyat, perkebunan besar negara, dan perkebunan besar swasta.

b. Kelapa

Tanaman kelapa merupakan komoditi tradisional Kaltara yang tumbuh dengan baik pada semua tempat yang diusahakan oleh masyarakat sebagai tanaman perkarangan maupun yang diusahakan dalam hamparan yang cukup luas. Usaha perkebunan kelapa rakyat dalam hamparan yang luas terdapat di Kab. Nunukan (Kec. Nunukan dan Sebatik), Kab. Bulungan, Kab. Tana Tidung, Kab. Malinau, dan Kota Tarakan. Disamping itu di beberapa daerah lainnya tanaman kelapa juga banyak diusahakan namun dalam ukuran yang masih terbatas. Luas area kelapa rakyat di Kaltara tahun 2013 tercatat sebanyak 2.798 ha. Produksi dari tanaman kelapa rakyat tersebut di atas seluruhnya dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kelapa segar masyarakat di dalam daerah. Pertanian kelapa rakyat di Kaltara dewasa ini sudah berada dalam keadaan yang patut diremajakan, namun nampaknya animo kearah tersebut masih rendah, sehingga kondisi perkelapaan di Kaltara dalam keadaan yang kurang menguntungkan.

c. Kelapa Sawit

Era pengembangan kelapa sawit di Kalimantan Timur dan Kaltara dimulai pada tahun 1982 yang dirintis melalui Proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang dikelola oleh PTP VI. Pada tahun 2013 luas areal kelapa sawit di Kaltara baru mencapai 111,027 ha yang tersebar di beberapa kabupaten. Sejumlah perusahaan perkebunan besar swasta yang telah memperoleh izin untuk beroperasi membangun kebun alam skala besar. Area pertanaman kelapa sawit yang cukup luas saat ini berpusat di Kab.

Nunukan (Kec. Nunukan, Lumbis, dan Sebuku), Kab. Bulungan, Kab. Malinau, dan Kab. Tana Tidung.

d. Kakao

Kaltara merupakan salah satu penghasil kakao rakyat di Indonesia, meskipun arealnya relatif kecil dibanding dengan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, tetapi bagi petani di beberapa tempat di Kaltara, komoditi tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian yang utama. Beberapa daerah yang tercatat sebagai sentra penanaman kakao di Kaltara antara lain Kab. Nunukan (Kec. Lumbis dan Pulau Sebatik), Kab. Malinau (Kec. Malinau), Kab. Bulungan, Kab. Tana Tidung. Di beberapa tempat lainnya juga terdapat areal perkebunan kakao dalam luasan yang relatif kecil. Luas areal pertanaman kakao menurut statistik tahun 2013 sebesar $\pm$ 14.244 ha. Tanaman tersebut secara keseluruhannya merupakan pertanaman rakyat. Produksi biji kakao kering Kaltara dengan mutu *unfermented* sebagian besar dipasarkan di Sabah, Malaysia. Produk petani perkebunan kakao lainnya dipasarkan sebagai perdagangan antarpulau ke Makassar untuk selanjutnya dipasarkan ke pasaran Amerika Serikat. Sebagaimana komoditi pertanian lainnya, harga biji kakao kering selalu mengalami pasang surut yang tergantung kepada harga pasaran dunia. Ketika kurs dolar terhadap rupiah tinggi, maka harga kakao juga melambung sehingga pendapatan petani meningkat. Dalam upaya mendorong perluasan, tanaman kakao di Kaltara, Dinas perkebunan selain memberikan bimbingan juga bantuan bibit unggul, sarana produksi, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan.

e. Lada

Lada di Kaltara merupakan komoditi tradisional yang sudah cukup lama dikenal dan dikembangkan oleh rakyat. Beberapa waktu yang lalu komoditi lada merupakan

salah satu komoditi ekspor Kaltara yang cukup penting, yang dikenal dengan mutu *white pepper*. Setelah harga komoditi tersebut jatuh di pasaran dunia sampai pada titik yang paling rendah dan bencana kebakaran lahan serta kemarau panjang yang melanda tahun 1982 yang lalu produksi lada Kaltara menurun secara drastis sehingga sejak saat itu Kaltara tidak lagi tercatat sebagai pengeksport lada. Dalam beberapa tahun ini pertanaman lada rakyat kembali diintensifkan, lebih-lebih dipicu adanya kenaikan harga yang cukup signifikan di pasaran dunia. Areal tanaman lada di Kaltara yang cukup luas terdapat di Kab. Malinau (Kec. Malinau dan Mentarang), Kab. Nunukan (Kec. Lumbis, Sebatik, dan Sembakung). Luas areal lada rakyat di Kaltara tahun 2013 tercatat sebanyak 175 ha. Produksi dari tanaman lada tersebut di atas seluruhnya dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri dan ekspor.

f. Kopi

Komoditi juga merupakan komoditi yang telah lama diusahakan oleh masyarakat pedesaan di seluruh Kaltara. Areal pertanaman kopi di Kaltara yang cukup luas terdapat di Kab. Malinau (Kec. Malinau dan Mentarang), Kab. Nunukan (Kec. Nunukan, Lumbis, Sebatik, dan Sembakung), Kab. Tana Tidung, dan Kota Tarakan. Berdasarkan data statistik tahun 2013 luas areal tanaman kopi tercatat seluas 3.436 ha. Produksi biji kering seluruhnya dipasarkan untuk kebutuhan konsumsi dalam daerah yang pangsa pasarnya masih sangat terbuka. Usaha perluasan areal oleh pertanian dilakukan secara swadaya dalam jumlah relatif kecil, sehingga penambahan areal dari tahun ke tahun berjalan sangat lambat.

5. Potensi Sektor Perikanan dan Kelautan

Wilayah Kaltara secara geografis dikelilingi oleh pantai merupakan potensi yang mendukung pengembangan sektor perikanan di provinsi ini, terutama dari hasil

perikanan maupun budidaya rumput laut. Dalam beberapa tahun terakhir sektor ini telah memberikan sumbangan untuk PAD yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan penelitian, kualitas udang yang berada di wilayah perairan Tarakan, merupakan udang dengan kualitas terbaik (*borneo shrimp*). Selain perikanan yang diperoleh dari laut, juga telah dikembangkan budidaya ikan air tawar dan udang melalui cara pengolahan tambak. Investasi di sektor perikanan ini masih sangat terbuka lebar, dan pasarnya pun telah tersedia. Beberapa perusahaan lokal telah berinvestasi di sektor ini baik di bidang tambak, maupun *industry cold storage*.

Tabel 4.2
Produksi Perikanan menurut Sub Sektor Perikanan dan Kabupaten/Kota (Ton)
Tabun 2013

No.	Kabupaten/Kota	Perikanan Laut	Perikanan Umum	Tambak	Kolam	Keramba	Budidaya Pantai/Laut	Jumlah
1.	Malinau	-	331,1	-	395,7	-	-	726,8
2.	Bulungan	3.070,3	269,4	3.735,0	29,4	-	96,0	7.200,1
3.	Tana Tidung	899,9	236,6	5.227,0	-	-	-	8.363,5
4.	Nunukan	4.180,6	49,2	1.369,6	48,7	0,2	146.674,0	152.322,3
5.	Tarakan	4.318,5	-	3.913,7	18,6	-	25.551,0	33.801,8
Jumlah 2013		12.469,3	886,3	14.245,3	492,4	0,2	172.321,0	200.414,5

Sumber : BPS Kalimantan Timur

Tabel 4.3
Nilai Produksi Perikanan Menurut Sub Sektor Perikanan dan Kabupaten/Kota
Tabun 2013

No.	Kabupaten/Kota	Perikanan Laut	Perikanan Umum	Tambak	Kolam	Keramba	Budidaya Pantai/Laut	Jumlah
1.	Malinau	-	11.121	-	13.860	-	-	24.981
2.	Bulungan	107.691	9.047	87.825	698	-	576	205.836
3.	Tana Tidung	22.520	6.073	378.716	-	-	-	407.309
4.	Nunukan	83.718	1.061	24.276	1.296	5	76.698	187.054
5.	Tarakan	74.720	-	1.087	440	-	25.551	101.798
Jumlah 2013		288.649	27.302	491.904	16.294	5	102.825	926.978

Sumber : BPS Kalimantan Timur

6. Potensi Sektor Peternakan

Pemerintah Kaltara berkomitmen untuk mendukung program pemerintah pusat, yaitu pencapaian swasembada daging sapi dan kerbau (PSDSK) tahun 2014 yang ditetapkan Kementerian Pertanian. Melalui Dinas Peternakan (Disnak) berbagai upaya telah dilakukan di 5 kabupaten/kota se Kaltara. Pada sektor peternakan ini masih memiliki prospek untuk dikembangkan, karena sampai saat ini untuk pemenuhan daging ternak maupun unggas bagi masyarakat Kaltara masih didatangkan dari luar daerah, seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

Usaha yang cocok untuk dikembangkan adalah sapi perah, pembibitan dan penggemukan sapi, babi, domba/kambing, pembibitan ayam (petelur dan pedaging) dan industri pakan ternak. Beberapa program di bidang peternakan yang sudah dilaksanakan di antaranya adalah penyelamatan sapi betina produktif, penambahan indukan dengan melakukan pembelian sapi bibit, mengoptimalkan produk kawin suntik dan alam serta penambahan pejantan pemacek agar tidak terjadi kawin antarkeluarga. Potensi pengembangan sapi di Kaltara yang diintegrasikan dengan sawit dengan asumsi dua ekor sapi per hektar.

C. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Kalimantan Utara

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltara dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kaltara Nomor 08 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Inspektorat dan Lembaga Teknis pada Provinsi Kaltara. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltara sebagai instansi perencana di daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kaltara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kaltara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah;
2. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
3. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang kerja sama penanaman modal;
4. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang promosi penanaman modal;
5. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pelayanan penanaman modal;
6. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, dan pengendalian teknis di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
7. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, dan pengendalian teknis di bidang data dan sistem informasi penanaman modal;
8. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
9. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltara terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian, Kepala Bidang Perencanaan, Promosi Penanaman Modal dan Kerjasama dibantu oleh 3 (tiga) seksi, bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan data dan sistem informasi dibantu

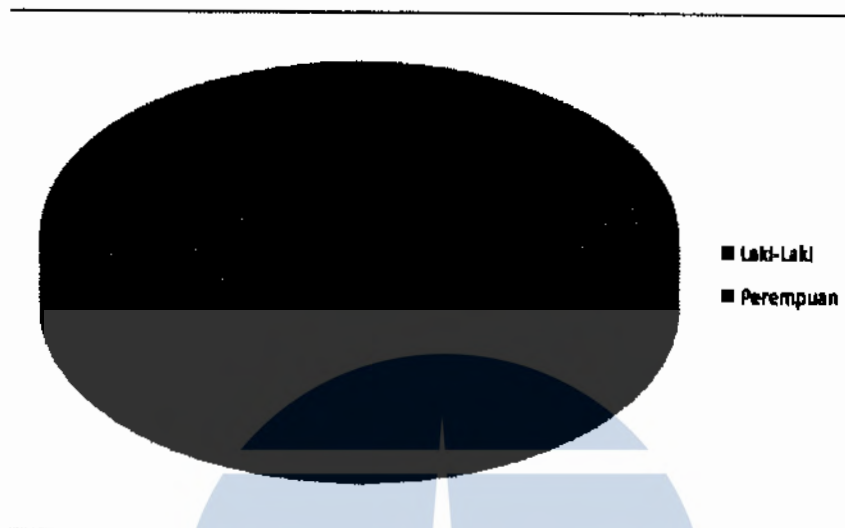
3 seksi, bidang penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan dibantu 3 seksi, bidang kajian kebijakan dan pengaduan layanan perizinan dan non perizinan dibantu 2 seksi.

Jumlah ASN DPMPTSP pada tahun 2017 adalah 29 orang dengan rincian pegawai Golongan II berjumlah 5 orang, Golongan III berjumlah 18 orang, dan Golongan IV berjumlah 6 orang, sedangkan jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) berjumlah 29 orang juga. Pada Gambar 4.1 dapat dilihat jumlah kualifikasi pendidikan ASN pada DPMPTSP tahun 2017 untuk SLTA berjumlah 4 orang, D3 berjumlah 3 orang, kualifikasi pendidikan S1 berjumlah 16 orang, dan S2 berjumlah 6 orang. Sementara itu sesuai jenis kelamin perempuan berjumlah 27 orang terdiri dari 11 ASN dan 16 PTT dan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 31 orang yang terdiri dari 18 ASN dan 13 orang PTT.

Gambar 4.1.
Komposisi Pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Kaltara



Gambar 4.2.

Komposisi ASN dan PTT berdasarkan jenis kelamin**D. Analisis Investasi Provinsi Kaltara**

Beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi investor dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di Provinsi Kaltara dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4
Faktor-faktor Strategis Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Investor Dalam dan Luar Negeri untuk Berinvestasi di Provinsi Kaltara

Faktor-faktor Strategis Internal				
STRENGTH		<i>Bobot</i>	<i>Rating</i>	<i>Skor</i>
1	Ketersediaan infrastruktur perdagangan dan jasa	0,23	4	0,92
2	Adanya regulasi dan perijinan yang sudah OSS (<i>One Stop Service</i>)	0,04	1	0,04
3	Memiliki tata ruang provinsi (RPJMD Provinsi Kaltara)	0,06	2	0,12
4	Adanya faktor kelembagaan, sebagai aspek daya saing daerah serta pemberian insentif dan disinsentif dalam investasi	0,08	2	0,16
5	Poleksosbudkam yang kondusif	0,13	3	0,39
6	Memiliki ikon kota	0,09	2	0,18
Sub Total		0,63		1,81

WEAKNESS		Bobot	Rating	Skor
1	Kurangnya sarana dan prasarana tempat promosi	0,24	4	0,96
2	Masih rumitnya prosedur perijinan serta koordinasi antarlembaga pemberi ijin yang masih belum optimal	0,02	1	0,02
3	Alih fungsi lahan, bangunan liar, ketidaksesuaian tata ruang	0,03	2	0,06
4	Fasilitas kerja badan perijinan dan investasi perdagangan dan jasa belum optimal	0,02	2	0,04
5	Masyarakat belum memiliki spirit dalam menyukseskan setiap program pembangunan (cenderung stagnan)	0,02	2	0,04
6	Penataan PKL, Revitalisasi pasar tradisional, dan Penataan pasar modern (retail modern)	0,04	4	0,16
Sub Total Kelemahan Internal		0,37		1,28
Total		1		3,09

Faktor-faktor Strategis Eksternal				
OPPORTUNITY		Bobot	Rating	Skor
1	Pengaruh perdagangan bebas	0,05	3	0,15
2	Mobilitas bahan baku maupun produk	0,025	2	0,05
3	Letak yang strategis	0,09	3	0,27
4	Sarana infrastruktur	0,12	3	0,36
5	Sebagai pintu gerbang sentra industri	0,03	2	0,06
Sub Total Peluang Eksternal		0,31		0,89

THREAT		Bobot	Rating	Skor
1	Masuknya produk Cina dan perdagangan bebas (CAFTA)	0,13	4	0,52
2	Adanya pusat perdagangan di provinsi lain (Kalimantan Timur)	0,24	4	0,96
3	Citra kota yang baik sebagai kota tujuan investasi di Kaltara	0,18	3	0,54
4	Kerusakan lingkungan	0,06	2	0,12

5	Fluktuasi harga komoditi	0,08	2	0,16
Sub Total Ancaman Eksternal		0,69		2,3
Total		1		3,19

Sumber : Hasil Analisis

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, dalam pembahasan hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan tujuan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan teori SWOT analisis, yaitu *Strengths*, *Weaknesses*, *Opportunities*, dan *Threats*. Pada bagian ini Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor strategis internal dalam kerangka *Strength* dan *Weakness* serta faktor-faktor strategis eksternal dalam kerangka *Opportunity* dan *Threat*. Selanjutnya untuk menentukan alternatif strategi dan penentuan pilihan strategi menarik minat investor dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di Provinsi Kaltara.

Dari analisis tabel di atas terlihat bahwa nilai total skor dari masing-masing faktor adalah *Strength* 1,81; *Weakness* 1,28; *Opportunity* 0,89; dan *Threat* 2,3. Dengan demikian nilai *Strength* di atas nilai *Weakness* dengan selisih plus 0,53 dan nilai *Opportunity* di bawah nilai *Threat*, dengan selisih minus 1,41. Dari hasil identifikasi faktor-faktor tersebut maka dapat digambarkan dalam Diagram SWOT. Selanjutnya dapat digambarkan dalam rumusan matriks SWOT, dapat dilihat pada Tabel 4.5 di bawah ini.

Tabel 4.5.
Perhitungan SWOT

	<i>STRENGTHS (S)</i>	<i>WEAKNESSES (W)</i>
<i>OPPORTUNITIES (O)</i>	STRATEGI (SO) $1,81 + 0,89 = 2,70$	STRATEGI (WO) $1,28 + 0,89 = 2,17$
<i>THREATS (T)</i>	STRATEGI (ST) $1,81 + 2,3 = 4,11$	STRATEGI (WT) $1,28 + 2,3 = 3,58$

Matriks SWOT untuk menganalisis rumusan alternatif strategi SO, WO, ST, dan WT yang hasil analisisnya seperti pada Tabel 4.6 di bawah ini.

Tabel 4.6.
Matriks IFAS dan EFAS

IFAS EFAS	Strength (S) • Ketersediaan infrastruktur • Adanya regulasi dan perijinan yang sudah OSS (<i>One Stop Service</i>) • Memiliki tata ruang provinsi • Adanya faktor kelembagaan • Poleksosbudkam yang kondusif • Memiliki ikon kota	Weakness (W) • Kurangnya sarana dan prasarana tempat promosi • Masih rumitnya prosedur perijinan • Alih fungsi lahan, bangunan liar, ketidaksesuaian tata ruang • Fasilitas kerja badan perijinan • Masyarakat cenderung stagnan • Revitalisasi ikon kota Perdagangan dan Jasa (<i>City Branding</i>)
Opportunity (O) • Pengaruh Perdagangan bebas • Mobilitas bahan baku maupun produk • Letak yang strategis • Sarana infrastruktur • Sebagai pintu gerbang sentra industri	STRATEGI (SO) Mengelola perdagangan dan jasa dengan konsep keunggulan yang dimiliki	STRATEGI (WO) • Mengatasi hambatan dalam perdagangan dan jasa terkait sarana dan prasarananya • Menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi • Menyiapkan tempat promosi (<i>trade center</i>) dan sarana promosi
Threat (T) • Masuknya produk Cina dan perdagangan bebas (CAFTA) • Adanya pusat perdagangan di provinsi lain (Kalimantan Timur) • Citra kota yang baik sebagai kota tujuan investasi • Kerusakan lingkungan • Fluktuasi harga komoditi	STRATEGI (ST) • Menciptakan daya saing dalam perdagangan dan jasa • Memperbaiki citra sebagai kota tujuan utama investasi • Menciptakan stabilitas perdagangan dan jasa • Mengutamakan pembangunan yang berkesinambungan	STRATEGI (WT) Memperbaiki semua fasilitas pendukung investasi yang ada, serta menciptakan pusat perdagangan dan jasa

E. Hasil Penelitian Mengenai Strategi Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Utara dalam Menarik Investor dalam dan Luar Negeri

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat yang disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya.

Konsep dasar dalam rangka mempercepat proses bangkitnya perekonomian daerah adalah semua pemanfaatan sumber daya termasuk aset-aset baik yang dimiliki oleh pemerintah daerah maupun swasta, memegang peranan penting dan menjadi tumpuan utama. Untuk mewujudkan transformasi sumber daya menjadi kekuatan ekonomi riil, maka kegiatan investasi merupakan kata kunci. Secara normatif, investasi daerah (*local investment*) dipahami sebagai salah satu kekuatan penting untuk akselerasikan pembangunan daerah. Keberhasilan kinerja investasi di dalam negeri yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi tentunya akan memberi kontribusi yang positif bagi pemulihan kondisi ekonomi daerah. Hal ini tergantung sejauh mana berbagai kendala ekonomis yang menghambat pemulihan investasi dapat diatasi dan menjadi tanggung jawab pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.

Untuk merangsang investasi dibutuhkan agenda-agenda yang jelas dan komprehensif yang secara internal dikreasikan sendiri oleh pemerintah daerah. Agenda-agenda yang dimaksud antara lain: merumuskan kebijakan investasi, memperbaiki peraturan dan regulasi, memperbaiki dukungan dan pelayanan birokrasi, mengembangkan promosi daerah, mengembangkan kemitraan, mengembangkan *regional management*, mengembangkan *business networking*, mempertajam strategi belanja publik.

Pada tingkatan korporat menurut Musa Hubais dan Mukhamad Najib ada empat tipe strategi alternatif yang dapat digunakan dalam mengembangkan dan mempertahankan kemampuan bersaing, yaitu strategi integrasi, strategi intensif, strategi diservikasi, dan strategi defensif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltara, sebagai berikut :

“Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi investasi di Kaltara seperti keadaan ekonomi kaltara sekarang, proyeksi perkembangan di masa yang akan datang, luasnya perkembangan teknologi yang berlaku, listrik, tingkat pendapatan Kaltara dan perubahan-perubahannya dan keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan” (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2018 Pukul 10.00 Wite di Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kaltara)

Pernyataan tersebut berarti bahwa apabila tingkat kegiatan ekonomi Kaltara saat ini mengalami kemajuan dan dimasa depan diramalkan perekonomian Kaltara akan tumbuh dengan cepat, maka para pengusaha akan melakukan banyak investasi. Sebaliknya, investasi tidak akan banyak dilakukan apabila barang-barang modal yang terdapat dalam perekonomian digunakan pada tingkat yang jauh lebih rendah dari kemampuan yang maksimal. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Sukirno (1994).

Salah satu pemilik modal yang menanamkan modal di Kaltara yang berinisial IA mengatakan bahwa salah satu strategi yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kaltara untuk menarik investor dalam negeri dan luar negeri adalah

“Pemerintah Provinsi Kaltara perlu memperhatikan faktor mikro dan makro ekonomi di wilayahnya. Faktor tersebut seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi daerah, dan kebijakan pemerintah provinsi di bidang perekonomian dan penanaman modal” Wawancara pada tanggal 2 Juli 2018 Pukul 09.00 Wite di Tanjung Selor).

Berdasarkan pernyataan di atas maka diketahui bahwa investasi di suatu daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat makro dan mikro. Faktor yang bersifat makro merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh perusahaan atau industri seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat bunga, tingkat inflasi, nilai tukar valuta asing dan

kebijaksanaan pemerintah dibidang ekonomi. Sedangkan faktor-faktor yang bersifat mikro adalah spesifik dan hanya mempengaruhi perusahaan atau industri tertentu saja, seperti struktur modal, struktur aktiva, dan tingkat likuiditas perusahaan (Nurdin, 1999 : 18).

Pengusaha lain juga memberikan pernyataan mengenai strategi yang harus ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Kaltara dalam rangka menarik investasi dalam negeri maupun luar negeri yaitu sebagai berikut :

“Strategi melakukan stabilitas politik, penegakan hukum, moralitas birokrat dan pengusaha, kebijakan fiskal dan moneter serta administrasi yang sederhana, cepat dan professional” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2018 Pukul 16.00 Wite di Tanjung Selor).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa faktor terpenting dalam mempengaruhi investasi adalah keamanan dan stabilitas masyarakat, moralitas birokrat dan pengusaha, kebijakan fiskal dan moneter, sistem administrasi yang sederhana, cepat dan professional (Shiddiq, 2007). Sedangkan Idris (2007), Fahri (2007) dan Ikhsan (2006) mengatakan bahwa berbagai faktor yang dihadapi oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dalam meningkatkan investasi di wilayah adalah (a) Stabilitas politik dan keamanan di dalam negeri. Terjadinya banyak gangguan keamanan seperti kerusuhan-kerusuhan baik yang ditimbulkan oleh aspek politik, kecemburuan sosial antar daerah ataupun karena ambisi pribadi/golongan serta ancaman teroris dapat memperlemah daya tarik investasi di wilayah tersebut; (b) Penegakan hukum. Tidak adanya kepastian hukum akan menyebabkan para investor enggan menanamkan modalnya di wilayah tersebut.

Pengusaha lain juga memberikan pernyataan mengenai strategi yang harus ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Kaltara dalam rangka menarik investasi dalam negeri maupun luar negeri yaitu sebagai berikut

“Selain itu, dalam upaya meningkatkan investasi ada empat nilai yang mempengaruhi daya tarik investor terhadap daerah, diantaranya: Keterbukaan masyarakat terhadap investor, tidak ada diskriminasi terhadap investor dalam masyarakat, etos kerja masyarakat yang tinggi serta adat

istiadat masyarakat". (Wawancara pada tanggal 1 April 2018 Pukul 13.00 Wite di Tanjung Selor).

Menurut Komisi Pengawas Pelaksana Otonomi Daerah (KPPOD, 2003:5), faktor yang mempengaruhi daya tarik investasi daerah meliputi faktor kelembagaan, faktor sosial politik, faktor ekonomi daerah, faktor tenaga kerja, dan faktor infrastruktur. Faktor kelembagaan berperan penting dalam menghadapi proyek investasi dan mengoperasikannya, investor cenderung menghadapi berbagai langkah-langkah dimana mereka harus berinteraksi dengan berbagai lembaga pemerintah untuk memperoleh bermacam perizinan yang diperlukan. Faktor sosial politik berperan karena berkaitan dengan hubungan sosial politik antar elemen-elemen masyarakat, pemerintah, dan pelaku bisnis di daerah tersebut. Stabilitas sosial politik dan keamanan penting bagi investor karena akan menjamin kelangsungan investasinya untuk jangka panjang. Sedangkan untuk faktor infrastruktur berpengaruh terhadap ketersediaan infrastruktur fisik di daerah yang mendukung investor akan menentukan biaya besarnya investasi awal, ketersediaan infrastruktur fisik tersebut meliputi sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, utilitas, pembuangan limbah dan lain-lain. Sarana dan prasarana transportasi contohnya antara lain: jalan, terminal, pelabuhan, bandar udara dan lain-lain. Sarana dan prasarana telekomunikasi contohnya: jaringan telepon kabel maupun nirkabel, jaringan internet, prasarana dan sarana pos. Sedangkan contoh dari utilitas adalah tersedianya air bersih, listrik dan lain-lain.

Pengusaha lain juga memberikan pernyataan mengenai strategi yang harus ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Kaltara dalam rangka menarik investasi dalam negeri maupun luar negeri yaitu sebagai berikut

"Selain ketersediaan infrastruktur, kualitas ini dimaksudkan layak atau tidaknya fasilitas serta infrastruktur itu digunakan, akses terhadap fasilitas dan infrastruktur juga perlu diperhatikan, semakin baik kualitas fasilitas dan infrastruktur dalam bentuk prasarana fisik, maka daya tarik investor terhadap

daerah tersebut semakin tinggi” (Wawancara pada tanggal 1 April 2018 Pukul 13.00 Wite di Tanjung Selor).

Berdasarkan hasil wawancara dan teori yang digunakan maka, faktor-faktor yang menjadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam strategi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Kaltara adalah sumber daya manusia, promosi, pengembangan infrastruktur daerah, sistem Informasi Berbasis IT/Internet dan kualitas pelayanan. Untuk lebih jelasnya akan diterangkan di bawah ini.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang harus diperhatikan dalam strategi penanaman modal dan pelayanan terpadu adalah para pegawai, dan tenaga kerja yang ada di Provinsi Kaltara. Ketersediaan tenaga kerja di Kaltara masih kurang. Cara provinsi Kaltara mempromosikan potensi dan keunggulan wilayahnya antara lain melalui promosi-promosi dengan mengikuti beberapa event pameran baik ditingkat nasional maupun internasional.

Praktisi Bisnis Rhenald Kasali mengungkapkan, modal penting bagi suatu organisasi pemerintahan bukanlah sumber daya alam (SDA) seperti tambang, melainkan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Jadi kalau tambangnya bagus, tetapi SDM tidak dibangun, yang menikmati bukan masyarakat sekitarnya. Tetapi yang menikmatinya adalah investor dan para pendatang dari luar, jadi modal terpenting kita adalah SDM,” (Dikutip dari <http://kaltara.prokal.co/read/news/10905-benahi-sdm-dulu-lalu-pembangunan.html>)

Selanjutnya Renald Kasali mengatakan bahwa

“Tetapi kita punya modal insani yang kuat. Jadi kalau saya amati di Kaltara memang masih butuh banyak SDM. Itu baru dari segi ilmu sosial. Kemudian dari segi ekonomi juga. Di Kaltara ini, engineering harus dikembangkan. Jadi nanti masyarakatnya bisa menikmati, karena keluarganya juga tinggal dan berada di sini. Jika ingin mendatangkan investor Kaltara tidak hanya harus pergi ke Jakarta untuk bertemu investor di sana. Tetapi harus pergi kemana uang tersebut ada. Seperti di Jepang, China, dan Amerika juga ada. Selain itu, pasar tersebut ada di tempat-tempat yang padat, seperti misalnya energi. Saat

ini semua daerah di Indonesia mencari energi. Harapannya agar tambang dapat menjadi energi yang bisa menjadi gas, listrik, pembangkit, dan lainnya yang semuanya dapat diolah. Investor memang harus didatangkan, lanjut Rhenald, namun jauh sebelum itu kualitas SDM-nya sudah harus ditingkatkan lebih dulu. Saya kira investasi pendidikan itu bisa dari mana saja. Bisa anak-anak di daerah disekolahkan ke luar negeri, sehingga berwawasan internasional serta memiliki rasa percaya diri yang kuat. Selama ini yang selalu dipikirkan adalah pendidikan SI hingga S3. Padahal bukan itu pendidikan yang disebut dengan kecerdasan untuk menggunakan kecerdasan yang disebut metakognisi. Anak-anak di Kaltara itu cerdas. Tetapi masih belum tahu bagaimana cara menggunakan kecerdasannya, karena dia tidak punya keterampilan hidup. Jadi yang dibangun hanya keterampilan akademisnya saja. Sehingga apa yang dia punya, seperti ilmu yang dia miliki itu bisa dipakai untuk memajukan Kaltara nantinya” (Dikutip dari <http://kaltara.prokal.co/read/news/10905-benahi-sdm-dulu-lalu-pembangunan.html>)

Baginya, membangun pendidikan yang kokoh lebih penting. Tidak masalah jika harus menikmati pembangunan sepuluh tahun lagi. Keterampilan akademis yang dimaksud itu hanya pintar pada nilai-nilai jasa saja, tetapi untuk keterampilan hidup. Termasuk dia harus bisa bicara, tidak gugup, punya rasa percaya diri, membangun hubungan dengan orang lain. Dan dia juga harus bisa menulis.

Seorang pengusaha berinisial AN memberikan pernyataan mengenai sumber daya manusia di Provinsi Kaltara.

“Menurut saya sumber daya manusia, tenaga kerja di Kaltara masih kurang. Kualitasnya masih kurang, masih belum sesuai dengan kebutuhan perusahaan” (Wawancara pada tanggal 10 Juli 2018 Pukul 15.00 Wite di Tanjung Selor).

Berdasarkan wawancara dengan pengusaha AN di atas diketahui bahwa kualitas sumber daya manusia di Kaltara masih tergolong rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan industry. Pendapat ini diperkuat oleh pendapat pengusaha berinisial WS, sebagai berikut :

“Kualitas tenaga kerja dan pegawai masih jauh dari harapan. Tapi lumayanlah, karena mereka tidak banyak menuntut dan mudah diajak kerjasama” (Wawancara pada tanggal 10 Juli 2018 Pukul 15.00 Wite di Tanjung Selor).

Pernyataan kedua pengusaha di atas, diperkuat oleh pernyataan salah satu pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut

"Kualitas memang diakui masih kurang. Karena itu, pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja merupakan bagian penting dari investasi SDM Indonesia yang berkualitas. Kompetensi sangat penting, tapi itu saja tidak cukup. Kami memiliki pelatihan bagi para teknisi seperti Technician Development Program untuk pengembangan keahlian dan kompetensi serta peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan" (Wawancara pada tanggal 1 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wite di Tanjung Selor).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa faktor terpenting dalam mempengaruhi investasi adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud disini adalah tenaga kerja yang ada di Kaltara. Tenaga kerja yang ada ini dilihat dari jumlah dan kualitasnya masih sangat kurang jika dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Masih minimnya tenaga kerja yang berkualitas, berpendidikan tinggi. Hal ini dapat disebabkan karena masih sedikitnya perguruan tinggi yang terdapat di Kaltara, sehingga tingkat kesadaran akan pendidikan pun masih jauh dari harapan.

Untuk memanfaatkan jumlah tenaga kerja yang ada, maka Pemerintah Provinsi Kaltara berusaha untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Sosial Provinsi Kaltara. Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara siap menyokong dan mendorong pihak swasta, untuk berkontribusi pada peningkatan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kaltara. Dalam usaha meningkatkan kualitas SDM Kaltara, telah melakukan beragam cara.

"Sewaktu saya masih Pj Gubernur, kita rintis program ADIK yang diprioritaskan untuk daerah Papua dan daerah 3T. Di Kaltara, Nunukan dan Malinau masuk dalam 3T. Di program ini, lulusan SMA/SMK bisa berkuliah di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Tahun ini, kita dapat

50, tapi yang lulus 47. Tahun sebelumnya, hanya 30 orang. Ini ada seleksinya, seperti IPDN”

Pemerintah Provinsi Kaltara juga merintis kerja sama dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan melalui yayasan Indonesia Tionghoa Culture Centre (ITCC).

“Ada 210 mahasiswa belajar di berbagai universitas di RRT. Tahun lalu, Kaltara dapat jatah paling banyak, sekitar 65 orang. Yang dikirim, ada dari Lumbis, Lumbis Ogong, Krayan, juga Tarakan”.

Kerja sama juga dijalin Pemprov Kaltara dengan sejumlah sekolah kedinasan. Seperti IPDN, STTD, STP dan lainnya. Dalam pelaksanaannya, Pemprov mengutamakan anak dari keluarga kurang mampu atau yang berprestasi. Juga ada bantuan beasiswa Kaltara Cerdas untuk menunjang kegiatan pembelajaran mereka selama di perkuliahan.

“Kita juga akan kirim dosen dan mahasiswa melalui dana Kaltara Cerdas ke luar negeri. Sekitar 10 hari travelling ke luar negeri dan dikelola profesional untuk menambah pengetahuan dan keahlian. Bisa ke Belanda, Australia, Malaysia dan lainnya”.

2. Promosi

Sikap pemimpin/Gubernur dalam menarik investasi di Kaltara adalah sangat mendukung terhadap para investor. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Provinsi Kaltara sebagai berikut:

“Sangat mendukung terhadap para investor, guna menarik para investor/pemimpin/gubernur telah beberapa kali melakukan presentasi baik di pusat maupun di luar negeri berupa penyajian yang ilahi, kaltara serta memberikan kemudahan-kemudahan perizinan terhadap investor yang akan berinvestasi di Kaltara” (Wawancara pada tanggal 10 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wite di Tanjung Selor).

Pemerintah Provinsi Kaltara memiliki Gubernur yang berkomitmen untuk menarik investor dalam dan luar negeri guna mempercepat pembangunan, sehingga

berbagai promosi investasi telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kaltara di antara nya adalah menggelar Kaltara Investment Forum 2017 di Hotel JS Luwansa, Jakarta. Acara tersebut menjadi ajang promosi potensi wilayah Kaltara, yang dihadiri 600 tamu undangan yang sebagian besar para investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengatakan, forum ini menjadi wadah untuk mempromosikan peluang investasi di wilayah tersebut. Meskipun patut diakui, meyakinkan investor untuk menanamkan modal di wilayah otonomi yang baru terbentuk tersebut tidak mudah.

"Meyakinkan investor itu tidak mudah. Hari ini promosikan, mungkin satu atau dua tahun mendatang baru terealisasi. Makanya kita tidak akan berhenti mempromosikan, dengan berbagai cara. Perlu dipahami, bukan hanya kita yang melakukan promosi untuk menggaet investor, semua daerah melakukan itu. Bahkan ada yang sudah sejak lima-sepuluh tahun lalu. Di samping promosi, sambung dia, Pemprov Kaltara juga perlu memperbaiki cara kerja aparaturnya, hingga mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan para calon investor. Mengapa kita sangat memerlukan investasi. Investasi itu penting, sebagai mesin pertumbuhan ekonomi daerah. Dampaknya nanti kepada masyarakat, terbukanya lapangan kerja, terbangunnya infrastruktur, dan efek positif lainnya"

Forum ini diharapkan tidak hanya dapat menarik investor lokal, namun juga menysar sejumlah investasi asing, khususnya industri padat energi dengan memanfaatkan energi berbasis konservasi. Kaltara yang memiliki potensi sumber daya alam (SDA) energi yang melimpah, khususnya keberadaan beberapa sungai besar di Kaltara. Pihaknya telah menyiapkan langkah jitu agar investor bisa komitmen menanamkan modal. Pertama, soal kemudahan perizinan lewat revisi Peraturan Gubernur No 43/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemprov Kaltara.

"Jangan sampai kalah dengan Singapura yang membeli bahan baku di Indonesia, diolah lalu dijual kembali kepada kita. Dari itu, KIF ini harus mampu memberikan kesan mendalam, hingga mampu mengundang investor untuk membangun Kaltara. Selain itu, perubahan kinerja birokrasi baik di Pemprov maupun di lingkup Pemkab/Pemkot juga akan dilakukan."

Tanpa didukung pola kerja birokrat yang berorientasi kerja, Irianto meyakini menjadi salah satu penghambat investor menanamkan modalnya. Makanya kami undang Bupoti/Walikota agar kita satu pemahaman, bagaimana investasi benar-benar menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Masyarakat akan diuntungkan, kesempatan kerja sangat terbuka lebar. Daerah sejahtera, infrastruktur juga terbangun memadai”

Pemerintah Provinsi Kaltara (Kaltara) telah menandatangani sejumlah nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) dengan investor terkait pembangunan berbagai proyek. Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengatakan berbagai kesepakatan itu menjadi bentuk komitmen dan keseriusan korporasi untuk menanamkan investasinya di provinsi tersebut. Di antaranya, PT Inalum (persero) yang akan membangun industri smelter di Kawasan Industri Pelabuhan Industri (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA). Ada pula investor dari luar negeri, seperti Shanghai Honghua dari China dan Hyundai Group dari Korea Selatan (Korsel). Perusahaan Indonesia yang telah menandatangani MoU tersebut antara lain PT Kayan Hidro Energy, PT Dragon Land, PT Kayan Energy Lestari, PT Kayan Hidro Power Nusantara, dan WIKA.

Berikut daftar perusahaan China-Indonesia yang menandatangani MoU untuk rencana investasi di Kaltara:

- a. PT Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri, melakukan MoU dengan China Gezhouba Group International Engineering Co. Ltd.
 - Support Pembangunan PLTA Kayan, Kaltara
 - Nilai Investasi: US\$10 miliar
- b. PT Adhidaya Suprakencana melakukan MoU dengan China Gezhouba Group International Engineering Co. Ltd
 - Rencana Proyek Kawasan Industri di Kaltara
 - Nilai Investasi: US\$10 miliar

- c. PT Dragon Land melakukan MoU dengan East China Engineering Science and Technology Co. Ltd
 - Persetujuan Pembangunan Industri Pengolahan Dimethyl Eter (DME) Coal ke Gas Berkapasitas 2 MTPA di KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi, Kaltara
 - Nilai Investasi: US\$700 juta
- d. PT Kayan Hydro Energy melakukan MoU dengan Sinchydro Corporation Ltd.
 - *Joint Venture* Rencana Kerjasama Pembangunan PLTA Kayan
 - Nilai Investasi: US\$17,8 miliar
- e. PT Prime Steel Indonesia melakukan MoU dengan Metallurgical Corporation of China Ltd.
 - *Joint Venture* Pengembangan Industri Steel Smelter di Kaltara Berkapasitas 3 x 1 juta ton per tahun
 - Nilai Investasi: US\$1,2 miliar

3. Pengembangan Infrastruktur Daerah

Faktor infrastruktur menjadi salah satu faktor yang menghambat penanaman modal di Provinsi Kaltara. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh HH, salah satu pengusaha yang menanamkan modal *"Masih kurangnya infrastruktur yang dimiliki"* (Wawancara pada tanggal 10 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wite di Tanjung Selor).

Kurang tersedianya sarana infrastruktur juga menjadi hambatan investor untuk menanamkan modalnya di Kaltara. Sara infrastruktur sendiri berkaitan dengan termasuk akses jalan menuju tempat-tempat tertentu. Walaupun saat ini, dari pihak Pemerintah Provinsi Kaltara sedang mengusahakan membuka jalan ke daerah-daerah terpencil terutama daerah yang menjadi tujuan pariwisata. Namun tetap harus didukung sarana lainnya, seperti lampu untuk penerangan jalan, rambu-rambu lalu

lintas di kawasan tersebut, karena pada umumnya jalan di Sabang berkelok, berkelok dan berbukit-bukit, maka akan sangat bahaya sekali jika rambu dan sarana penerangan jalan ini tidak benahi. Selain itu ketersediaan air bersih dan listrik yang belum mampu untuk menampung beban kebutuhan jika ada investor yang ingin berinvestasi dalam kategori besar

Menurut Komisi Pengawas Pelaksana Otonomi Daerah (KPPOD, 2003:5), faktor yang mempengaruhi daya tarik investasi daerah meliputi faktor faktor infrastruktur berpengaruh terhadap ketersediaan infrastruktur fisik di daerah yang mendukung investor akan menentukan biaya besarnya investasi awal, ketersediaan infrastruktur fisik tersebut meliputi sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, utilitas, pembuangan limbah dan lain-lain. Sarana dan prasarana transportasi contohnya antara lain : jalan, terminal, pelabuhan, bandar udara dan lain-lain. Sarana dan prasarana telekomunikasi contohnya: jaringan telepon kabel maupun nirkabel, jaringan internet, prasarana dan sarana pos. Sedangkan contoh dari utilitas adalah tersedianya air bersih, listrik dan lain-lain.

Pengusaha lain juga memberikan pernyataan mengenai strategi yang harus ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Kaltara dalam rangka menarik investasi dalam negeri maupun luar negeri yaitu sebagai berikut

"Selain ketersediaan infrastruktur, kualitas ini dimaksudkan layak atau tidaknya fasilitas serta infrastruktur itu digunakan, akses terhadap fasilitas dan infrastruktur juga perlu diperhatikan, semakin baik kualitas fasilitas dan infrastruktur dalam bentuk prasarana fisik, maka daya tarik investor terhadap daerah tersebut semakin tinggi" (Wawancara pada tanggal 1 April 2018 Pukul 13.00 Wite di Tanjung Selor).

Ketersediaan infrastruktur fisik di Kaltara seperti pelabuhan udara, pelabuhan laut, jalan, telepon dan listrik adalah perlu terus ditingkatkan agar memudahkan investasi masuk bagi pendatang dari luar Kaltara, pelabuhan laut perlu

dibuat guna mendukung program penderita terhadap tol laut, listrik, telepon sudah memadai. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh RA, salah satu pengusaha yang menanamkan modal di Kaltara

“Untuk jalan dan pelabuhan udara perlu terus ditingkatkan agar memudahkan investasi masuk bagi pendatang dari luar Kaltara, pelabuhan laut perlu dibuat guna mendukung program penderita terhadap tol laut, listrik, telepon sudah memadai” (Wawancara AA, pada tanggal 10 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wite di Tanjung Selor)

Dalam melakukan pemeringkatan bobot faktor penentu daya tarik investasi, dalam kondisi normal semestinya bobot yang lebih besar adalah faktor ekonomi daerah, faktor tenaga kerja dan faktor infratraktur fisik yang menjadi pertimbangan awal dalam menentukan keputusan berinvestasi. Bila faktor kelembagaan dan faktor sosial politik suatu daerah sudah normal, seharusnya dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi faktor utama yang dilihat oleh investor adalah pada faktor ekonomi daerah yang meliputi variabel potensi ekonomi dan variabel struktur ekonomi, serta faktor tenaga kerja dan faktor infrastruktur fisik (KPPOD, 2002:42).

4. Sistem Berbasis IT

Inovasi adalah cara yang bagus untuk sukses di era digital ini. Jalan inovasi dalam perusahaan berarti melakukan sesuatu yang berbeda, lebih pintar atau lebih baik yang akan membuat perbedaan positif dalam hal nilai, kualitas atau produktivitas dengan menggunakan teknologi yang muncul di dunia. Teknologi yang telah terbukti dalam dua dekade terakhir ini tentu saja teknologi informasi (TI). Ini telah secara jelas mengubah kehidupan individu dan organisasi. Saat ini belanja online, pemasaran digital, jejaring sosial, komunikasi digital adalah contoh terbaik dari perubahan yang datang melalui jaman teknologi informasi. Kini perencanaan perusahaan yang akurat, pemasaran yang efektif, penjualan global, manajemen yang sistematis, pemantauan real

time dan pertumbuhan bisnis jangka panjang tidak dapat dicapai pada tingkat optimal tanpa TI.

Teknologi informasi telah memainkan peran penting dalam mengotomatisasi masalah yang kompleks tersebut dengan memperkenalkan solusi yang mudah digunakan. Satu dekade yang lalu, sebagian besar solusi pengelolaan sumber daya berbasis desktop. Berkat teknologi internet yang memungkinkan para engineer perangkat lunak untuk memperkenalkan solusi ERP berbasis cloud (Enterprise Resource Planning). Kini, para manajer dapat mengelola atau memantau sumber daya organisasi mereka di manapun di dunia dengan menggunakan komputer pribadi, laptop, tablet, atau Smartphone mereka. Konsep ini telah memperkenalkan gagasan globalisasi.

Pemerintah daerah khususnya Badan Penanaman modal meskinnya memiliki sistem informasi spasial untuk promosi investasi. Dengan teknologi informasi berbasis spasial ini meskinnya mampu menyajikan lokasi dan luasan tanah yang akan ditawarkan kepada para calon investor. Dengan teknologi tersebut para calon investor dapat melihat melalui foto satelit letak lokasi secara relative terhadap objek-objek lain sehingga dapat tergambar secara sekilas seberapa menarik lokasi tersebut. Bahkan para investor juga dapat melihat apakah peluang investasi tersebut secara tata ruang sudah sesuai atau belum jika pihak pemerintah juga menyediakan peta tata ruang atau pola ruang. Tentu informasi ini akan sangat berharga sekali bagi para calon investor sebagai indikasi informasi awal.

Fakta tersebut mestinya ditangkap oleh pihak pemerintah yang akan menawarkan bentuk kerjasania dengan pihak swasta dalam mengembangkan perekonomian daerah. khususnya upaya-upaya pemerintah dalam menarik keterlibatan swasta dalam penawaran kerjasama melalui konsep PPP (*Private Public Partnership*). Dalam aplikasi tersebut meskinnya hasil pra studi kelayakan suatu proyek

investasi juga dapat ditampilkan dalam sebuah peta peluang investasi. Biasanya mencakup beberapa indikator pokok diantaranya desain proyek atau produk yang akan ditawarkan, masterplan, analisis pasar, dan indikator keuangan. Indikator keuangan suatu investasi meliputi nilai return on investment (ROI), break event point (BEP/nilai titik impas), IRR dan pay back period (lama pengembalian nilai investasi) serta nilai net present value (NPV) yaitu nilai proyeksi pendapatan bersih dimasa yang akan datang yang ditarik kewaktu sekarang dengan nilai diskonto tertentu misalnya 10%-15%.

Informasi indikator awal proyek yang akurat dan presisi merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi para calon investor. Upaya kegiatan promosi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui kegiatan investor gathering akan semakin tajam jika di support dengan teknologi visualisasi secara spasial. para calon investor dapat mempelajari dan menentukan seberapa menarik sebuah lokasi peluang investasi secara spasial yang dapat dilakukan secara virtual. Beberapa indikator data yang dapat menjadi daya tarik peluang investasi secara spasial adalah;

- a. Lokasi peluang investasi terletak dimana dan berapa luas lahan yang tersedia, jika sudah dapat disediakan **site plan** atau **master plan**, untuk kegiatan yang menjadi inisitif pemerintah.
- b. Lokasi peluang Investasi juga dapat dilihat secara tata ruang dengan menampilkan layer pola Ruang atau RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) untuk melihat apakah peluang investasi sudah sesuai dengan pola runag, sehingga akan meminimalisir kemungkinan terhambatnya atau tertolaknya perijinan karena factor peuntukan tanah yang tidak sesuai
- c. Layer Peta tematik lainnya yang berfungsi sebagai informasi pendukung para calon investor dalam membaca potensi investasi misalnya mengenai distribusi

usaha atau investasi yang eksisting, untuk melihat kecenderungan pembentukan kluster-kluster industry dan tingkat

5. Kualitas Pelayanan

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat yang masuk dalam kerangka negara Indonesia sebagai *welfare state* dengan tujuan *bestuur zorg* dan juga pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pemerintah sebagai perangkat negara harus mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Pemerintah yang juga akrab disebut birokrasi (termasuk pemerintah daerah) selama ini cenderung mendapatkan penilaian yang negatif dari masyarakat. Masyarakat menilai bahwa pelayanan publik yang diselenggarakan oleh birokrat cenderung lama, berbelit-belit, dengan persyaratan yang rumit dan regulasi yang tidak fleksibel. Anggota masyarakat yang sejahtera sesuai dengan tujuan pelayanan itu sendiri. Menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan sekaligus peluang.

"Ya belum adanya regulasi di bidang perizinan investasi, di antaranya belum adanya acuan hukum sebagai landasan operasional di bidang investasi dalam bentuk Peraturan Daerah, aturan-aturan/ kebijakan yang berkaitan dengan fasilitas kemudahan, fasilitasi investasi dan jaminan kepastian berusaha dan aturan-aturan yang sifatnya teknis operasional pelaksanaan penanaman modal di daerah. Sedangkan investor memerlukan regulasi yang pasti untuk menanamkan modalnya"(Wawancara pada tanggal 19 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wite di Tanjung Selor).

Pernyataan di atas senada dengan pernyataan Rs

"Belum adanya regulasi yang mengatur perizinan investasi, dan terbatasnya fasilitas promosi maupun materi promosi dan terbatasnya data dan informasi investasi. Untuk dapat meningkatkan promosi diperlukan media promosi dan materi promosi yang di dukung dengan data yang riil, akurat, up-to date dengan dukungan Studi Kelayakan, Detail Enginerring Data (DED), yang didasari dengan kajian-kajian secara ekonomis. Di samping dukungan sarana prasarana wilayah/infratraktur yang memadai, sehingga dapat meningkatkan

daya tarik investasi” (Wawancara pada tanggal 9 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wite di Tanjung Selor)

Pernyataan seorang pengusaha berinisial ZA mengenai kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltara.

“Menurut saya, Kantor Pelayanan Terpadu dan Kantor Penanaman Modal tidak sesuai dengan semangat pelayanan terpadu satu pintu mbak. Kemudian Kantor Pelayanan Terpadu dan Kantor Penanaman Modal Provinsi Kaltara digabung menjadi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Menurut saya idealnya digabung menjadi BPMPT Provinsi Kaltara agar dalam memberikan pelayanan publik bidang perizinan investasi bisa secara optimal dan lebih efektif dalam melakukan koordinasi lintas sektoral” (Wawancara pada tanggal 10 September 2018 Pukul 10.00 Wite di Tanjung Selor)

Pengusaha memberikan pernyataan mengenai kualitas pelayanan perizinan Pemerintah Provinsi Kaltara sebagai berikut

“Pemerintah daerah seharusnya menyadari bahwa ada hal yang harus dibenahi dalam proses administrasi publik terutama terkait dengan pemberian pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan publik secara cepat, efisien, dan bisa memenuhi harapan masyarakat.” (Wawancara pada tanggal 20 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wite di Tanjung Selor)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa selama ini posisi tawar masyarakat cenderung lemah, mereka hanya menerima produk layanan dari pemerintah tanpa bisa memberikan kontribusi langsung terhadap produk layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Hasil wawancara di atas senada dengan pendapat bapak Rs

“Kekurangan kita adalah kita belum bisa mengakses SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik). Penerapan SPIPISE didahului dengan pemberian Hak Akses SPIPISE dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. SPIPISE merupakan sistem elektronik pelayanan perizinan investasi yang terintegrasi antara BKPM dengan perangkat daerah yang membidangi penanaman modal dan perizinan sehingga proses pelayanan perizinan investasi yang diselenggarakan oleh BPMPT langsung dapat diakses dan terpantau oleh pemerintah. Layanan Perizinan secara Online ini merupakan bagian dari National Single Window for Investment (NSWI) yang memungkinkan pemohon izin dapat melakukan tracking terhadap proses perizinan yang diajukan. Selain itu SPIPISE juga terintegrasi dengan Sistem Informasi Perpajakan dan Bea Cukai, serta Badan

Pusat Statistik melalui Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)" (Wawancara pada tanggal 20 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wite di Tanjung Selor).

Berdasarkan wawancara dengan KB, salah satu kepala Bidang DPMPTSP Provinsi Kaltara adalah sebagai berikut :

"Memberikan kemudahan dalam hal perizinan terhadap para investor baik dalam maupun luar negeri" (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2018 Pukul 13.00 Wite di Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kaltara).

Kualitas pelayanan perizinan di Provinsi Kaltara berdasarkan pernyataan salah satu pengusaha *"Masih kurang memuaskan, mengingat keterbatasan SDM"* (Wawancara pada tanggal 10 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wite di Tanjung Selor). Pernyataan ini sama seperti yang diungkapkan oleh SH, berikut ini *"Kendala lainnya seperti belum adanya peraturan daerah yang mengatur perizinan investasi di daerah"* (Wawancara pada tanggal 20 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wite di Tanjung Selor)

Upaya yang dilakukan dihadapi pemerintah daerah Provinsi Kaltara melalui DPMPTSP Provinsi Kaltara mengatasi kendala-kendala dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang perizinan investasi adalah seharusnya dengan menerbitkan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan, Pemberian Insentif, dan Kemudahan Penanaman Modal dan mengenai masalah lahan maka DPMPTSP Provinsi Kaltara mengadakan sosialisasi tentang mega proyek kepada masyarakat yang akan terkena dampaknya, menambah sarana dan prasarana investasi. Hal ini sebagaimana hasil wawancara berikut ini.

"Tentang masalah regulasi, pemerintah daerah harus menerbitkan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan, Pemberian Insentif, dan Kemudahan Penanaman Modal dan mengenai masalah lahan maka DPMPTSP mengadakan sosialisasi tentang mega proyek kepada masyarakat yang akan terkena dampaknya, menambah sarana dan prasarana investasi" (Wawancara pada tanggal 12 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wite di Tanjung Selor)

Pernyataan ini senada dengan pendapat bapak Ha

“Upaya yang kami lakukan selaku bidang kerja sama dan promosi DPMPTSP Provinsi Kaltara yaitu Program DPMPTSP Provinsi Kaltara untuk meningkatkan promosi dan kerjasama investasi di antaranya dengan peningkatan faslilitasi terwujudnya kerjasama strategis antarusaha besar dan Usaha Kecil Menengah, pengembangan potensi unggulan daerah, fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT), koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA, koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal, peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan pelaksanaan penanaman moda , pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur Badan Penanaman Modal Daerah Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan. Penanaman Modal, penyelenggaraan pameran investasi, penyusunan data dan informasi Penanaman Modal, dan pengembangan sistem informasi penanaman Modal” (Wawancara pada tanggal 10 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wite di Tanjung Selor)

Masyarakat dapat melakukan pengaduan pelayanan sebagaimana diungkapkan oleh Rs

“Asas penyelesaian pengaduan adalah cepat dan tuntas. Masyarakat dapat mengadu di DPMPTSP Provinsi Kaltara, Jalan Rambutan, Tanjung Selor Hilir Bulungan. Masyarakat yang ingin mengadu dapat menggunakan sarana pengaduan melalui telepon, email, dan kotak pengaduan yang terdapat di DPMPTSP Pengaduan diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilkannya. Pengaduan dilakukan paling lambat 30 hari sejak pengadu menerima pelayanan” (Wawancara pada tanggal 20 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wite di Tanjung Selor).

F. Pembahasan mengenai Strategi Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Utara dalam Menarik Investor dalam dan Luar Negeri

Konsep dasar dalam rangka mempercepat proses bangkitnya perekonomian daerah adalah semua pemanfaatan sumber daya termasuk aset-aset baik yang dimiliki oleh pemerintah daerah maupun swasta, memegang peranan penting dan menjadi tumpuan utama. Untuk mewujudkan transformasi sumber daya menjadi kekuatan ekonomi riil, maka kegiatan investasi merupakan kata kunci. Keberhasilan kinerja investasi di dalam negeri, terutama pada masa krisis ekonomi, yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi tentunya akan memberi kontribusi yang positif bagi pemulihan kondisi ekonomi daerah. Hal ini tergantung sejauh mana berbagai kendala ekonomis yang menghambat pemulihan

investasi dapat diatasi dan menjadi tanggung jawab pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.

Menurut Sunariyah (2003:4) Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva/aset (sumber daya dalam bentuk harta benda) yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Sedangkan menurut Samuelson (2004: 198), investasi meliputi penambahan stok modal atau barang disuatu negara, seperti bangunan peralatan produksi, dan barang-barang inventaris dalam waktu satu tahun. Investasi merupakan langkah mengorbankan konsumsi di waktu mendatang.

Investasi atau penanaman modal adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Kegiatan usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal Negeri atas bidang usaha perusahaan diatur didalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Penanaman Modal di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang

berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

Investasi asing merupakan salah satu cara yang bisa dimanfaatkan oleh sebuah negara untuk tumbuh dan sekaligus mempelajari teknologi terkini yang telah dikembangkan dan digunakan di negara-negara kaya. Masuknya perusahaan asing dalam kegiatan investasi di Indonesia dimaksudkan sebagai pelengkap untuk mengisi sektor-sektor usaha dan industri yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak swasta nasional. Modal asing juga diharapkan secara langsung maupun tidak langsung dapat lebih merangsang dan menggairahkan iklim atau kehidupan dunia usaha, serta dapat dimanfaatkan sebagai upaya menembus jaringan pemasaran internasional melalui jaringan yang mereka miliki. Selanjutnya modal asing diharapkan secara langsung dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi Indonesia.

Penanaman Modal Asing (PMA) lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya jangka panjang, banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini, sangat penting bagi negara sedang berkembang mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja. Fungsi Penanaman Modal Asing adalah (1) Sumber dana modal asing dapat dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. (2) Modal asing dapat berperan penting dalam penggunaan dana untuk perbaikan struktural agar menjadi lebih baik lagi. (3) Membantu dalam proses industrilialisasi yang sedang dilaksanakan. (4) Membantu dalam penyerapan tenaga kerja lebih banyak sehingga mampu mengurangi pengangguran. (5) Mampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat. (6) Menjadi acuan agar ekonomi Indonesia semakin lebih baik lagi dari sebelumnya. (7) Menambah cadangan devisa negara dengan pajak yang diberikan oleh penanam modal.

Tujuan Penanaman Modal Asing adalah sebagai berikut (1) Untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, manfaat pajak lokal dan lain-lain. (2) Untuk membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan-perusahaan lain (3) Untuk mendapatkan return yang lebih tinggi daripada di negara sendiri melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sistem perpajakan yang lebih menguntungkan dan infrastruktur yang lebih baik. (4) Untuk menarik arus modal yang signifikan ke suatu negara.

Faktor yang Mempengaruhi Berkurangnya PMA adalah sebagai berikut (1) Instabilitas Politik dan Keamanan. (2) Banyaknya kasus demonstrasi/ pemogokkan di bidang ketenagakerjaan. (3) Pemahaman yang keliru terhadap pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah serta belum lengkap dan jelasnya pedoman menyangkut tata cara pelaksanaan otonomi daerah. (4) Kurangnya jaminan kepastian hukum. (5) Lemahnya penegakkan hukum. (6) Kurangnya jaminan/ perlindungan Investasi. (7) Dicabutnya berbagai insentif di bidang perpajakan 8) Masih maraknya praktek KKN (9) Citra buruk Indonesia sebagai negara yang bangkrut, diambang disintegrasi dan tidak berjalannya hukum secara efektif makin memerosotkan daya saing Indonesia dalam menarik investor untuk melakukan kegiatannya di Indonesia. (10) Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia.

Hal – Hal yang perlu dipertimbangkan dalam PMA adalah sebagai berikut (1) Bagi Investor adanya kepastian hukum. Fasilitas yang memudahkan transfer keuntungan ke negara asal. Prospek rentabilitas, tak ada beban pajak yang berlebihan. Adanya kemungkinan repatriasi modal (pengambilalihan modal oleh pemerintah pusat dan daerah) atau kompensasi lain apabila keadaan memaksa. Adanya jaminan hukum yang mencegah kesewenang-wenangan. (2) Bagi Penerima Investasi Pihak penerima investasi harus sadar bahwa kondisi sosial, politik, ekonomi negaranya menjadi pusat perhatian investor.

Dicegah tindakan yang merugikan negara penerima investasi dalam segi ekonomis jangka panjang dan pendek. Transfer teknologi dari para investor. Pelaksanaan investasi langsung atau investasi tidak langsung betul-betul dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan (mutual benefit) dan terutama pembangunan bagi negara/ daerah penerima.

Faktor Penarik Investor Asing adalah transparansi pasar keuangan dalam informasi yang terpercaya yang mengalir dalam suatu aliran yang stabil. Tidak adanya transparansi selama proses investasi dapat sangat membatasi rentang perhatian para investor asing. Pasar finansial yang terbuka harus dibebaskan dari kendali pemerintah langsung dan perdagangan bawah tangan (insider trading). Adanya aturan hukum para ahli ekonomi yang telah disepakati. Nilai tukar yang fleksibel. Sehingga memudahkan para investor untuk berinvestasi.

Faktor yang mempengaruhi Investasi Nicolas Stern dalam Taufiq (2013:80) menyebutkan bahwa iklim investasi sebagai kebijakan institusi, dan kondisi atau perilaku lingkungan, baik saat ini maupun yang akan datang, yang dapat mempengaruhi hasil-hasil (*return*) dan resiko-resiko (*risk*) dalam kegiatan investasi. Malik (2007:15) menyebutkan ada lima faktor utama yang mempengaruhi masuknya investor ke suatu Negara, yaitu (1) stabilitas politik, (2) kepastian hukum, (3) konsistensi kebijakan, (4) regulasi dan (5) pajak. Selain itu untuk menanamkan modalnya di Indonesia para investor memerlukan jaminan kepastian hukum dalam berusaha. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah memperhatikan aturan-aturan yang berkaitan dengan penanaman modal asing terutama yang berhubungan dengan perlindungan terhadap investor asing dalam bisnis dan bagaimana memperlakukan mereka secara adil

Faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain : *Pertama* faktor Sumber Daya Alam, *Kedua* faktor Sumber Daya Manusia, *Ketiga* faktor stabilitas politik dan perekonomian,

guna menjamin kepastian dalam berusaha, *Keempat* faktor kebijakan pemerintah, *Kelima* faktor kemudahan dalam peizinan. Dari segi Penanaman Modal Asing, banyak faktor yang menyebabkan timbulnya keengganan masuk investasi ke Indonesia pada saat ini. Faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung masuknya arus investasi ke suatu negara, seperti jaminan keamanan, stabilitas politik, dan kepastian hukum, tampaknya menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi Indonesia. Bahkan otonomi daerah yang sekarang diterapkan di Indonesia dianggap menjadi permasalahan baru dalam kegiatan investasi di beberapa daerah.

Menurut Suryati (2000:84) investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, memiliki pengaruh yang cukup besar pada penyerapan tenaga kerja, di mana terdapat hubungan yang positif antara investasi pemerintah dan investasi swasta terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian lain dilakukan oleh Samosir pada tahun 2005 yang meneliti pengaruh investasi swasta terhadap kesempatan kerja. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa untuk jangka pendek terjadi kenaikan kesempatan kerja sebanyak 3 orang bila investasi swasta naik Rp100 juta. Sedangkan untuk jangka panjang terjadi kenaikan kesempatan kerja sebanyak 8 orang bila investasi swasta naik Rp100 juta.

Menurut Pratiwi (2005:19), investasi yang mempunyai *multiplier effect* berdampak pada peningkatan kesejahteraan, yang diukur melalui kenaikan pendapatan. Artinya apabila pendapatan meningkat, jumlah barang dan jasa yang akan dikonsumsi akan meningkat pula. Apabila permintaan barang dan jasa meningkat, maka akan meningkatkan peluang lapangan kerja. Hal ini akan mengurangi tingkat pengangguran. Berkurangnya pengangguran ini disebabkan oleh terserapnya angkatan kerja dalam proyek-proyek investasi.

Pemupukan investasi yang mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah Kaltara dari waktu ke waktu perlu direncanakan.

Kebutuhan dana investasi dapat bersumber dari swasta/masyarakat maupun pemerintah. Bentuk investasi swasta seperti PMDN dan PMA, sedangkan investasi pemerintah seperti investasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu dibutuhkanlah strategi penanaman modal dan kualitas pelayanan perizinan yang bagus untuk menarik investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, diketahui bahwa ada beberapa tantangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kaltara dalam rangka menarik investor dalam negeri dan luar negeri yaitu sebagai berikut (a) Persaingan kebijakan investasi yang dilakukan oleh negara pesaing seperti China, Vietnam, Thailand dan Malaysia. (b) Kualitas SDM yang rendah dan terbatasnya infrastruktur (c) Stabilitas Politik politik sangat mempengaruhi masuknya investor ke suatu daerah. Stabilitas politik yang sedang tidak kondusif biasanya dibarengi dengan kondisi keamanan yang juga tidak baik seperti maraknya kasus demonstrasi dan sebagainya, sehingga akan mengurangi minat investor menanamkan modalnya. Karena secara tidak langsung stabilitas politik yang tidak kondusif akan berdampak negatif terhadap usaha yang akan dijalankan oleh investor. Dimana stabilitas politik yang tidak kondusif akan berpengaruh terhadap tingkat keamanan dan tentu saja akan menekan angka profit bagi investor. (d) Faktor pembiayaan. Faktor pembiayaan juga merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam peningkatan iklim investasi. (e) Infrastruktur merupakan salah satu faktor pendukung dasar para investor untuk menanamkan modalnya terutama infrastruktur jalan, sehingga apabila infrastruktur terutama akses jalan tidak baik maka hal ini juga akan mempengaruhi minat investor untuk mau menanamkan modalnya. (f) Regulasi yang belum ada menjadi salah satu faktor yang akan mengurangi minat investor menanamkan modalnya. Tidak hanya itu kurangnya jaminan/kepastian hukum bagi para investor juga merupakan salah satu faktor

yang diperhitungkan ketika investor ingin menanamkan modalnya. Jaminan hukum yang konsisten akan sangat berpengaruh terhadap jalannya usaha para pelaku dunia usaha.

Dari penjelasan mengenai tantangan dan hambatan Provinsi Kaltara dalam menarik investor dalam negeri dan luar negeri di atas dapat disimpulkan bahwa semua permasalahan dalam bidang investasi harus diselesaikan agar iklim investasi yang kondusif dan sehat. Perbaikan iklim investasi ini perlu dilakukan dalam beberapa strategi penanaman modal. Menurut Thomson (dalam Oliver, 2007:2) strategi adalah sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir. Jatmiko (2003:4) mendefenisikan strategi sebagai suatu cara dimana organisasi akan mencapai tujuan-tujuannya sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta sumber daya dan internal organisasi. Selanjutnya, Coulter (dalam Kuncoro, 2005:12) menegaskan bahwa, strategi adalah sejumlah keputusan dan aksi yang ditujukan untuk mencapai tujuan (*goal*) dan menyesuaikan sumberdaya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan industrinya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah seluruh kemampuan atau potensi penduduk yang berada di dalam suatu wilayah tertentu beserta karakteristik atau ciri demografis, sosial maupun ekonominya yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan. Jadi membahas sumber daya manusia berarti membahas penduduk dengan segala potensi atau kemampuannya. Potensi manusia menyangkut dua aspek yaitu aspek kuantitas dan kualitas.

Karakteristik demografi merupakan aspek kuantitatif sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk menggambarkan jumlah dan pertumbuhan penduduk, penyebaran penduduk dan komposisi penduduk.

Karakteristik sosial dan ekonomi berhubungan dengan kualitas (mutu) sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara, sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang ada baik secara fisik maupun mental.

Sumber daya manusia menjadi aset tenaga kerja yang efektif untuk menciptakan kesejahteraan. Kekayaan alam yang melimpah tidak akan mampu memberikan manfaat yang besar bagi manusia apabila sumber daya manusia yang ada tidak mampu mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam yang tersedia.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menimbulkan banyak masalah bagi negara, jika tidak diikuti dengan peningkatan produksi, dan efisiensi di bidang lainnya. Banyaknya penduduk akan menambah beban sumber daya produktif terhadap sumber daya manusia yang belum produktif (anak-anak, manula, pengangguran, dll) yang akibat lanjutnya akan menciptakan masalah-masalah sosial yang cukup rumit. Adapun tindakan-tindakan yang dapat dan telah dilakukan pemerintah, yaitu :

Melaksanakan program KB (Keluarga Berencana). Dengan program ini diharapkan laju pertumbuhan akan lebih dapat dikendalikan. Meningkatkan mutu sumber daya manusia (dengan pendidikan formal maupun informal) yang telah ada, sehingga dapat menunjang peningkatan produktifitas guna mengimbangi laju pertumbuhan penduduknya.

Penyebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan tidak seimbangny kekuatan ekonomi secara umum. Akibat selanjutnya adalah terjadinya ketimpangan daerah miskin dan daerah kaya. Daerah yang tampak menguntungkan (khususnya Pulau Jawa) akan menjadi serbuan dan perpindahan penduduk dari daerah lainnya sehingga daerah di luar Pulau Jawa yang memang telah ketinggalan dari segi ekonomi, menjadi semakin tertinggal.

Tindakan yang dapat dan telah dilakukan pemerintah adalah : Penyelenggaraan program transmigrasi, sehingga akan terjadi pemerataan sumber daya ke daerah-daerah yang masih membutuhkan. Memperbaiki dan menciptakan lapangan-lapangan kerja baru di daerah-daerah tertinggal. Sehingga penduduk sekitar tidak perlu ke kota atau Pulau Jawa untuk bisa bekerja. Dengan demikian arus urbanisasi dari desa ke kota, dari luar Pulau Jawa dapat dikurangi.

Adapun sasaran kebijaksanaan tenaga kerja di Indonesia meliputi hal-hal berikut : Memperluas lapangan kerja untuk dapat menyerap pertambahan angkatan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran. Membina angkatan kerja baru yang memasuki pasar melalui latihan keterampilan untuk berusaha sendiri maupun untuk mengisi lapangan kerja yang tersedia. Membina dan melindungi para pekerja melalui mekanisme hubungan kerja yang dijiwai oleh Pancasila dan UUD 1994 (Hubungan Industrial Pancasila), memperbaiki kondisi-kondisi dan lingkungan kerja agar sehat dan aman serta meningkatkan kesejahteraan pekerja. Meningkatkan peranan pasar kerja, agar penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan tenaga kerja dapat menunjang kegiatan pembangunan. Memperlambat lajunya pertumbuhan penduduk dan meningkatkan mutu tenaga kerja melalui usaha pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian dari perencanaan tenaga kerja terpadu.

Komposisi penduduk yang tidak seimbang dapat menimbulkan proses regenerasi kegiatan produksi menjadi tidak lancar. Akibatnya ada masa tunggu yang sebenarnya tidak perlu terjadi, karena kebutuhan hidup 'tak bisa' menerima istilah tunggu. Dengan demikian perlu dilakukan tindakan secepatnya untuk membekali dan mempersiapkan tenaga-tenaga kerja muda di Indonesia dengan pendidikan formal maupun informal, dengan keterampilan dan pengetahuan yang sifatnya mendesak.

Langkah-langkah yang akan dan telah ditempuh pemerintah untuk mengatasi hal ini, antara lain :

Meninjau kembali sistem pendidikan di Indonesia yang masih bersifat umum (general), untuk dapat lebih disesuaikan dengan disiplin ilmu khusus yang lebih sesuai dengan tuntutan pembangunan. Sehingga lulusan yang dihasilkan menjadi lulusan yang siap kerja dan bukannya siap 'latih kembali'. Menciptakan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih mendukung langkah pertama.

Salah satu hal penting dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), khususnya pemberdayaan, adalah penempatan pengembangan SDM dalam strategi korporat. pemberdayaan (empowerment) akan terbentur seandainya berada di luar agenda strategi perusahaan. Penempatan pemberdayaan ini dapat terabaikan di perusahaan tanpa budaya korporat yang berorientasi manusia.

Para pelaku ekonomi di daerah dan aparat birokrasi pemerintahan daerah perlu secara bersama melakukan persiapan-persiapan dalam upaya terprogram meningkatkan kompetensi daerah. Upaya awal yang paling mendasar adalah membangun kesiapan sumber daya manusia yang trampil dan cekatan. Sekolah-sekolah kejuruan industrial, ekonomi, teknologi dan bahasa dapat dibangun secara sinergi antar unsur-unsur pelaku ekonomi yang ada di daerah. Berikutnya ketersediaan fasilitas prasarana industri seperti pergudangan, jalur transportasi untuk logistik barang, pelabuhan, terminal serta hub-hub intra moda transportasi, sumber energi, air bersih, saluran irigasi lintas-desa, lembaga-lembaga ekonomi dan finansial pedesaan, serta pos-pos kolektor dan penyimpanan produk-produk hasil pertanian perlu dibangun secara memadai dan berkualitas. Rentetan investasi tersebut perlu ditrigger oleh inisiatif para gubernur dan para bupati dengan mengundang para investor masyarakat lokal. Dalam literatur

perekonomian daerah jenis penanaman modal yang demikian dimasukkan kedalam kelompok *Social Overhead Capital* (SOC).

Ketersediaan SOC akan memberikan rangsangan pada para investor di luar daerah untuk segera berkunjung dan menetap, karena mereka akan mendapatkan apa yang dinamakan dengan penghematan-penghematan urbanisasi (*urbanization economies*) dan aglomerasi (*agglomeration economies*). Untuk mengurangi dampak negatif dari kehadiran FDI khususnya di wilayah hinterland, maka Pemerintah Pusat dan Daerah perlu merevisi berbagai ketentuan-ketentuan yang melindungi kepentinganeliharaan kelestarian dan kualitas lingkungan hidup dan lingkungan alam. Perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut wajib menggantikan kerugian dengan jumlah penalti yang besarnya cukup untuk memperbaharui kerusakan-kerusakan yang dilakukan. Bagi para pengusaha lokal dan asing hendaknya perlu semakin sadar dan mulai menyisihkan anggaran yang memadai bagi terselenggaranya kesejahteraan masyarakat di sekitar pabrik dan lokasi usaha. Perhatian akan tanggung jawab sosial merupakan tuntutan bagi terselenggaranya kegiatan usaha yang berkelanjutan.

Perkembangan investasi langsung yang dahsyat tersebut kemudian memberikan berbagai manfaat dan dampak positif untuk perkembangan ekonomi lokal. Lapangan kerja secara nasionalpun dapat diberikan pada jumlah yang tinggi, dimana dengan satu persen laju pertumbuhan dalam perekonomian nasional dapat secara langsung memberikan tambahan lapangan kerja antara 700 ribu sampai dengan 800 ribu pekerja. Jarang kita mendengar keluhan dari para calon pekerja di daerah perkotaan yang sulit mendapatkan lapangan kerja. Tingkat pengangguran dapat ditekan seminimal mungkin. Lapangan kerja yang diberikan oleh kehadiran perusahaan asing dan domestik berorientasikan ekspor secara bersamaan telah dirasakan manfaatnya oleh kalangan pekerja kerah putih, para lulusan program pasca sarjana maupun para lulusan

dari program pendidikan sarjana di tanah air. Ditempat lokasi kerja perusahaan asing putraputra bangsa mendapatkan pengalaman yang sangat luas dalam bidangnya masing-masing, dengan pengenalan pada wawasan manajemen modern dan pengenalan terhadap kehadiran pasar global.

2. Promosi

Pelaksanaan Promosi hendaknya digunakan menjadi salah satu strategi yang ditempuh oleh DPMPTSP dalam meningkatkan iklim investasi masuk ke Provinsi Kaltara. Dimana promosi sangat berperan dalam memberikan informasi mengenai potensi dan peluang investasi bagi para investor atau pelaku dunia usaha. Investor atau pelaku dunia usaha tidak akan mampu mengetahui potensi investasi apabila promosi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik. Berikut merupakan bentuk promosi yang dilakukan oleh DPMPTSP dalam upaya meningkatkan iklim investasi di Provinsi Kaltara:

a. Promosi Pameran

Strategi promosi dalam bentuk pameran menjadi wadah yang sangat penting untuk mempromosikan potensi dan peluang investasi bagi para pelaku dunia usaha atau investor untuk mau menanamkan modalnya di Provinsi Kaltara. Pameran juga merupakan salah satu wadah yang menjembatani DPMPTSP mampu mendekatkan diri dengan para investor baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Dan indikator keberhasilan suatu promosi adalah terjadinya peningkatan penanaman modal yang masuk di Provinsi Kaltara.

Promosi dan publikasi potensi investasi sangatlah penting karena sumber informasi potensi dan peluang usaha daerah terletak pada publikasi dan promosi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Kaltara. Promosi melalui pameran. Promosi merupakan salah satu faktor pendukung meningkatnya iklim penanaman modal di suatu daerah.

b. Promosi *Media Online*, Cetak dan Elektronik

Promosi dilakukan dengan menggunakan media cetak dan elektronik dimana, promosi ini dilakukan dengan membangun kerjasama dengan media cetak atau koran dan media elektronik atau televisi.

Mekanisme promosi ini dilakukan dengan memberikan materi-materi potensi dan peluang investasi yang ada di Provinsi Kaltara untuk kemudian di publikasikan di koran dan juga di televisi dan diharapkan ada investor atau pelaku dunia usaha yang tertarik dengan materi-materi promosi tersebut dan mau menanamkan modalnya. Sementara itu promosi peta potensi investasi melalui media online belum dapat berjalan efektif dan belum dapat di publikasikan karena masih dalam tahap perbaharuan data. promosi potensi dan peluang investasi yang ada di Provinsi Kaltara dipublikasikan oleh DPMPTSP menggunakan booklet, leaflet maupun brosur yang dibagikan pada saat pameran dan juga pemasangan media informasi berupa billboard atau papan iklan. Tidak hanya itu DPMPTSP juga bekerjasama dengan media elektronik TV dalam mempublikasikan potensi dan juga capaian-capaian prestasi yang didapatkan oleh DPMPTSP.

3. Pengembangan Infrastruktur Daerah

Berdasarkan hasil penelitian di atas, upaya yang secara khusus ditangani oleh bidang investasi adalah yang berkaitan dengan kajian potensi daerah yakni melalui perumusan dan pembuatan peta potensi investasi daerah. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh seksi evaluasi investasi bahwa kajian potensi investasi dilakukan dengan pemetaan kawasan yang memiliki potensi dunia usaha dan hal ini dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah Provinsi Kaltara

Rencana strategis Penanaman Modal di Provinsi Kaltara adalah sebagai berikut.

a. Perhubungan Udara

- (1). Pengembangan Bandara Tanjung Harapan, Bulungan
- (2). Pengembangan Bandara Juwata Tarakan
- (3). Peningkatan Bandara Perintis Binuang, Kecamatan Krayan Selatan
- (4). Pembangunan Bandar Udara Sebatik

b. Perhubungan Laut

- (1). Pengembangan pelabuhan nunukan
- (2). Pengembangan Pelabuhan tarakan
- (3). Pembangunan pelabuhan bongkar muat barang di pesawan Tanjung Selor
- (4). Pengembangan Pelabuhan Tunon Taka
- (5). Pengembangan Pelabuhan Malundung
- (6). Pengembangan Pelabuhan Sebatik
- (7). Pembangunan Pelabuhan Internasional di Tanah Kuning
- (8). Pembangunan Pelabuhan Bebatu di Tana Tidung

c. Pendidikan

- (1). Pembangunan sekolah baru TK, SD, SMP, SMA dan SMK
- (2). Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan pembangunan asrama sekolah

d. Kesehatan

- (1). Pembangunan untuk RS pratama di Kabupaten Tana Tidung (Tana Lia, Bebatu), Kabupaten Nunukan (Sebayu dan Krayan), Kabupaten Malinau (Long Ampung, RS Langap)
- (2). Penyediaan alkes, jaringan untuk RS Pratama di Kabupaten Tana Tidung (Tana Lia, Bebatu), Kabupaten Nunukan (Sebayu dan Krayan), Kabupaten

Malinau (Long Ampung), RSUD Tarakan beserta pembangunan gedung radioterapi

(3).Pembangunan RS tipe D di Kabupaten Tana Tidung (pengembangan dari puskesmas menjadi RS)

(4).Pengadaan tenaga kesehatan di Kabupaten Malinau (dokter spesialis, bidan, perawat, ahli gizi)

(5).Pembangunan baru RS Provinsi Tipe A di Tanjung Selor, Kaltara

e. Jalan dan Jembatan

(1).Pembangunan Jalan Perbatasan Long Nawang – Long Pujungan- Long Kenuat- Langap- Malinau

(2).Pembangunan Jalan Mensalong-Sasipu-Tou Lumbis

(3).Pembangunan Jalan Perbatasan Malinau-Punan Long Bawan-Long Midang

(4).Pembangunan Jalan Long Nawang-Metulang-Long Boh-Batas Kaltim

(5).Pembangunan Jalan Penghubung Kabupaten Bulungan-Tarakan

(6).Pembangunan Jembatan Pendukung Pengembangan Kota Baru Tarakan

f. ASDP

(1).Pengembangan dermaga penyebarangan Nunukan

(2).Pengembangan dermaga penyeberangan Sebatik

(3).Pengembangan pelabuhan penyeberangan/Fery Tarakan

(4).Peningkatan pelabuhan Fery Ancam

g. Ketenagalistrikan

(1). PLTMG Tanjung Selor 15 MW

(2). PMTMG Nunukan 2 x 10 MW

(3). Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi

(4). PLTA Besahan (kayan 3) dan PLTA long Sempajang total kapasitas 1000 MW

h. Telekomunikasi dan Informatika

- (1).Pembangunan Tower telekomunikasi di daerah pedalaman dan perbatasan
- (2).Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
- (3).Pengembangan transmisi penyiaran TVRI

i. Perumahan

- (1). Pembangunan rumah khusus daerah perbatasan 230 KK di Kecamatan Krayan Selatan dan 845 KK di Kecamatan Lombis Ogong. Pembangunan infrastruktur kawasan permukiman untuk rumah khusus di daerah perbatasan
- (2). Pembangunan konsep persampahan ramah lingkungan untuk ibukota Kaltara

j. Sumber Daya Air

- (1).Pembangunan DR. Sepunggur Kabupaten Bulungan
- (2).Pembangunan Dr. Salim Batu Kabupaten Bulungan
- (3).Pembangunan Dr. Teras Kabupaten Bulungan
- (4).Pembangunan pengendalian banjir Tanjung Belimbing (kanal, retarding basin dan drainase) Kota Malinau Kabupaten Malinau
- (5).Pembangunan/Peningkatan jaringan irigasi Dr Tanjung Buka
- (6).Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi Dr Sepunggur
- (7).Pembangunan/Peningkatan jaringan irigasi Dr. Salim Batu
- (8).Pembangunan/Peningkatan jaringan irigasi Dr. Teras Batu
- (9).Pembangunan / peningkatan jaringan irigasi Dr. Selang Ketok
- (10). Pembangunan/Jaringan irigasi DT. Tanah Kuning
- (11). Persiapan pembangunan lima bendungan di Sungai Kayan, Kabupaten Bulungan dan tiga bendungan di Sungai Mentarang di kabupaten Malinau
- (12). Pembangunan embung di Kota Tarakan

- (13). Pembangunan waduk PLTA besahan (Kayan – K3) dan pembangunan waduk PLTA Long Sempajang (Mentarang 3) (1000 MW)

Berdasarkan rencana strategi Provinsi Kaltara di atas, Provinsi Kaltara menetapkan peta kawasan strategis. Peta kawasan strategis Provinsi Kaltara dapat dilihat pada Tabel 4.7. di bawah ini.

Tabel 4.7.

Peta Kawasan Strategis

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kawasan Strategis
1.	Nunukan	Krayan Selatan	Long Bawan, Long Layu	Perbatasan dengan kegiatan utama ekonomi
		Sebatik		Perbatasan dengan kegiatan utama ekonomi
2.	Malinau	Kayan Hulu	Long Nawang	Perbatasan dengan kegiatan utama ekonomi
		Mentarang Hulu Mentarang Malinau Utara		Kawasan Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
3.	Bulungan	Tanjung Selor Tanjung Palas		<i>Food state dan rice estate</i> ; warisan budaya kesultanan bulungan
		Tanjung palas utara		<i>Food estate dan rice estate</i>
		Tanjung palas timur		Kegiatan utama ekonomi
		Tanjung Palas Tengah		Koridor perkotaan (Tarakan – Tanjung Selor)
		Peso		PLTA 6.600 MW

4. Sistem Informasi Berbasis IT/Internet

Penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan publik memerlukan *good governance* yang akan menjamin transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh institusi pemerintahan telah semakin meningkat, sehingga untuk memastikan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi tersebut benar-benar mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan, maka harus memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dan pengelolaan risiko.

Investasi teknologi informasi merupakan keputusan yang diambil oleh organisasi untuk meningkatkan sumber daya dari pengeluaran biaya yang nyata dari teknologi informasi dengan harapan manfaat dari pengeluaran tersebut mencapai nilai dari apa yang diharapkan.

Sistem informasi sudah terbukti mampu mempermudah aktivitas manusia sehari-hari di berbagai aspek baik di bidang pendidikan, pemerintahan dan bisnis. Hal ini menurut O'Brien dan Marakas (2010) dikarenakan peran sistem informasi mampu mendukung fungsi dari area bisnis untuk mencapai tujuan, meningkatkan efisiensi kerja, efektif sebagai sumber utama informasi dalam mendukung pengambilan keputusan, dan mampu digunakan untuk mengembangkan produk dan jasa yang kompetitif. Peran sistem informasi dalam meningkatkan efisiensi kerja dan efektivitas sumber informasi yang diterapkan pada pemerintahan berupa electronic government (e-government), misalnya bermanfaat menyederhanakan birokrasi sehingga mampu memperlancar berbagai macam proses administrasi yang pada gilirannya mampu meningkatkan kinerja pemerintahan.

Menurut (Hasibuan, 2007) e-government adalah bentuk layanan informasi antar lembaga pemerintah (Government to Government-G2G), lembaga pemerintah kepada dunia usaha (Government to Business-G2B) dan lembaga pemerintah kepada masyarakat (Government to Citizen-G2C). Lebih lanjut ia menyatakan bahwa e-government yang sistematis dapat memberikan manfaat untuk menurunkan biaya administrasi, meningkatkan pelayanan kepada publik secara cepat dan akurat, dan mempermudah koordinasi antar lembaga pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Manfaat lain dari penggunaan sistem informasi dalam mengembangkan produk dan jasa dapat terlihat dari digunakannya pada perencanaan dan pelaksanaan proyek proyek infrastruktur. Hasil penelitian dari Sandhyavriti dkk (2013) mengungkapkan

bahwa teknologi informasi adalah faktor yang signifikan bagi perusahaan-perusahaan jasa konstruksi untuk meningkatkan produktivitasnya dan kinerjanya sehingga mampu berkompetensi di era global Center for Democracy and Technology dan InfoDev menyatakan dalam (Hasibuan, 2007) bahwa ada 3 (tiga) tahapan implementasi sistem informasi yang tidak tergantung antara yang satu dengan yang lainnya yang mampu menjadi solusi tersebut, adapun tahapan itu adalah:

- a. Publish, yaitu tahapan penggunaan sistem informasi untuk memudahkan akses informasi misalnya melalui pembuatan situs.
- b. Interact, yaitu tahapan meningkatkan interaksi masyarakat dalam pemerintahan, dan antar lembaga pemerintah misalnya melalui media sosial dan surat elektronik.
- c. Transact, yaitu tahapan melakukan layanan pemerintah secara daring (online), misalnya dengan cara pembuatan aplikasi prosedur perijinan.

Sistem informasi yang menyeluruh, mudah di akses dan selalu diperbaharui (up date) seperti pada tahap publish dan interact sangat membantu para investor dalam mencari informasi mengenai harga, lokasi dan ketentuan kepemilikan. Sementara tahapan transact selain memudahkan proses administrasi juga mengurangi birokrasi

Rumusan strategi pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltara yang secara umum dapat dikelompokkan dalam dua bagian dapat lebih diperinci sebagai berikut:

- (1). Membangun sistem manajemen mutu pada aspek pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltara. Dalam upaya meningkatkan pelayanan PTSP penanaman modal, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltara sebagai instansi jasa pelayanan publik perlu mengembangkan konsep *Total Quality Service* (TQS) yang merupakan sistem manajemen strategis dan integratif untuk

melibatkan kepala badan, kepala bidang, kepala kantor, karyawan atau staf yang terkait serta menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memperbaiki secara berkesinambungan proses-proses organisasi agar dapat memenuhi dan melebihi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan. TQS berfokus pada lima bidang, yaitu:

- (1). Fokus pada pelanggan,
- (2). Keterlibatan total,
- (3). Pengukuran,
- (4). Dukungan sistematis, dan
- (5). Perbaikan berkesinambungan.

Terkait dengan strategi pengembangan mutu organisasi sebagai strategi utama dalam membangun pelayanan yang baik, dapat dilakukan beberapa turunan kegiatan seperti: strategi peningkatan kualitas layanan dengan *benchmarking*, *reengineering*, *management by objective*, dan melengkapi dokumen yang bersifat fundamental, seperti grand design dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltara berikut instrumen kinerja, instrumen operasional (SOP) dan dokumen lain. Proses ini akan lebih mudah dilaksanakan sekaligus melalui strategi *benchmarking*, *reengineering*, dan *management by objective*.

- (2). Mengembangkan kelembagaan pelayanan penanaman modal yang efisien (PTSP) berbasis IT dengan kualitas tersertifikasi (ISO) dan bersertifikat bintang tiga. Kualitas dan pelayanan yang baik kepada publik tentunya akan memudahkan PTSP Provinsi Kaltara dalam membangun sistem manajemen mutu yang terstandar. Dalam hal ini, akan lebih kredibel untuk ditarget mendapatkan *International Standards Organization* (ISO) yang ditujukan untuk menjamin

proses manajemen yang berkualitas melalui pengembangan standar dunia bagi sistem, produk, dan layanan. Jika sebuah organisasi jasa memperoleh sertifikasi ISO, maka organisasi tersebut berhak mengatakan kepada publik bahwa organisasi telah mempunyai system kualitas terdokumentasikan yang telah diimplementasi dan diikuti secara konsisten. Organisasi yang telah mengikuti proses kualitas dalam standar ISO, besar kemungkinan akan menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas pula. Ada tiga prinsip dasar terkait ISO 9000 yang perlu dipersiapkan secara matang agar organisasi dapat mencapai sasaran perbaikan berkesinambungan. Ketiga prinsip dasar tersebut adalah:

- (1). Menyusun tujuan dan sasaran penting,
- (2). Merumuskan tindakan melalui kebijakan, program, dan prosedur untuk mencapai tujuan yang diharapkan, Memahami sumber penolakan dan menetralisirnya. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltara perlu mengembangkan komunikasi horisontal dan vertikal dalam organisasinya secara efektif, melibatkan para penentang potensial dalam perencanaan dan proses perubahan, serta memberdayakan para staf dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah.
- (3). Mengembangkan kerjasama strategis dalam rangka pelayanan perijinan yang kegiatannya terjadwal dan ada tim koordinasi lintas sektor dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kepuasan pelayanan di Provinsi Kaltara. Kegiatan kerjasama strategis ini selain untuk menjadikan forum melakukan analisis kebutuhan (*need assessment*) atas pelayanan yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltara, juga dijadikan sebagai media untuk sosialisasi produk layanan, capaian kinerja, maupun informasi lain yang akan mampu mendorong peningkatan

penanaman modal. Proses kerjasama strategis yang mulai dirintis oleh Bidang Perijinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltara perlu diintensifkan dalam pematangan bentuk kerjasama sehingga terbangun hubungan kontraktual yang tertuang dalam dokumen kerjasama, seperti MoU. Agar tujuan kerjasama strategis ini tercapai, maka sebagai inisiator, pihak Bidang Fasilitasi Perijinan bekerjasama dengan Bidang Kerjasama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltara harus berperan sebagai motor penggerak dalam implementasi MoU.

- (4). Pengembangan aplikasi IT untuk layanan perijinan investasi dan komunikasi dengan *stakeholders*. Pengembangan sistem pelayanan yang berbasis IT atau yang bersifat online memungkinkan proses pelayanan akan lebih cepat, efisien, dan informasinya menjadi transparan. Tentu saja pengembangan aplikasi ini, selain harus mendapatkan dukungan dari sisi pendanaan untuk penyediaan infrastrukturnya, juga pengembangan kualitas SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltara yang mengelola sarana ini sehingga tidak ada kesenjangan dalam pemahaman dan aplikasi IT.
- (5). Proaktif mengajukan penyediaan pendanaan untuk sarana dan prasarana perkantoran. Pada tahap awal, proses persiapan dan penyediaan untuk memberikan pelayanan, maka belanja publik yang teralokasi akan banyak dan bersifat belanja modal (investasi). Dengan tuntutan kualitas layanan, maka proses penyediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kualitas SDM tidak dapat ditunda ataupun secara gradasi dalam durasi waktu yang lama. Untuk itu, pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi Kaltara harus proaktif untuk mendapatkan berbagai dukungan pembiayaan ataupun bentuk lain yang bersumber dari dana pusat maupun daerah.

- (6). Meningkatkan partisipasi publik dalam monitoring dan evaluasi pelayanan perijinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltara. Adanya perkembangan tuntutan yang terus menerus dari masyarakat atas penyelenggara layanan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltara dapat dimaknai sebagai proses *learning organization* yang tidak dapat dihindari dan menjadi bagian dari manajemen mutu yang dibangun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltara dengan salah satu prinsip partisipasi publik. Dalam hal ini, juga termasuk upaya-upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltara untuk mendapatkan apresiasi publik melalui pemeringkatan dan penilaian kinerja, baik yang dilakukan oleh pemerintah, seperti BKPM RI, Kemendagri, maupun oleh lembaga independen.
- (7). Mengoptimalkan sarana pelayanan yang ada untuk memberikan pelayanan prima pada publik. Kegiatan optimalisasi dari sumber daya yang ada sekarang ini di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltara menjadi pilihan terkait dengan kondisi alokasi pembiayaan yang terbatas dan secara nyata mengimplementasikan prinsip optimalisasi atas investasi publik yang sudah dilakukan pada periode sebelumnya.
- (8). Meningkatkan kapasitas SDM dengan proaktif mengirimkan pada pelatihan-pelatihan bersertifikat. Strategi SDM yang bisa diterapkan adalah pengembangan SDM berbasis kompetensi. Pengembangan SDM tidak saja

dalam bentuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis tetapi juga pengembangan sikap. Sikap yang dibutuhkan adalah berupa daya respon dan kepekaan terhadap masalah-masalah perkembangan perilaku bisnis (termasuk kegiatan penanaman modal) serta mutu produk layanan. Pelatihan dan pengembangan sikap para staf yang langsung berhadapan dengan para konsumen dan pelanggan menjadi sangat strategis. Termasuk membangun kepribadian staf yang hangat dan empati sehingga pelayanan prima dapat terwujud secara efektif.

- (9). Proses pengembangan SDM juga dapat dilakukan dengan menyelenggarakan *inhouse training* yang secara berkala dilakukan dan diikuti oleh semua staf berdasarkan tema, baik yang materinya bersifat spesifik menunjang kompetensi khusus ataupun materi yang bersifat umum yang terkait dengan kualitas pelayanan.

Strategi Manajerial yang perlu dibangun adalah perlu menciptakan iklim investasi dan usaha yang lebih menarik. Singkat kata, iklim investasi yang positif dapat ditingkatkan melalui upaya-upaya berkesinambungan yang dilakukan oleh para birokrat dan para pelaku ekonomi di lokalitas-lokalitas tempat investasi dalam hal-hal berikut ini:

Pertumbuhan yang relatif tinggi didukung oleh berbagai faktor, meliputi antara lain: (a) dukungan kebijakan deregulasi perdagangan dan investasi, (b) iklim usaha yang kondusif untuk mempercepat laju kenaikan investasi dan juga (c) adanya kepercayaan dunia internasional pada para pelaku ekonomi domestik dalam melakukan berbagai bentuk kerjasama usaha patungan. Pada saat itu perhitungan serta kalkulasi proyek-proyek investasi baru dapat dengan mudah dilakukan karena memang terdapat kepastian berusaha yang tinggi dan tingkat resiko kegagalan dalam berusaha yang

rendah. Resiko berusaha yang rendah ini didukung oleh iklim politik yang stabil. Keamanan dalam perjalanan barang pasokan dan bahan mentah untuk kegiatan industri dan proses logistik dari produk dan barang jadi perusahaan dapat terkirim dengan mudah dan murah ditangan konsumen. Demikian juga sistem perijinan investasi masih ditangani secara sentralistis sehingga sekaligus mengurangi rantai birokrasi yang berlebihan. Tuntutan partai politik dan lembaga swadaya masyarakatpun masih dalam koridor yang tidak banyak mengganggu jalannya proses berbisnis.

Kondisi iklim berusaha dan resiko investasi yang positif ternyata kemudian membuahkan hasilnya. Perusahaan-perusahaan domestik tanpa ragu-ragu dapat melakukan ekspansi usahanya disegala lini produksi. Minat untuk melakukan investasi secara langsung pada sektor riil yang dilakukan oleh masyarakat bisnis dan industri rumahtangga meningkat tajam baik di sektor pertanian, perikanan, pertambangan, konstruksi, industri pengolahan, industri berat, jasa keuangan dan perbankan, serta pada sektor-sektor jasa lainnya. Minat investasi yang paling menonjol dan menunjukkan peningkatannya adalah investasi langsung dalam rangka mendapatkan fasilitas penanaman modal asing (FDI). Kehadiran FDI telah memberikan kontribusi yang besar dalam mendorong kinerja laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, mendorong timbulnya industri pasokan bahan baku lokal, proses alih teknologi dan manajemen, serta manfaat bagi investor lokal. Manfaat yang paling menonjol adalah berkembang nya kolaborasi yang saling menguntungkan dan terjalin antar investor asing dengan kalangan pebisnis lokal. Disini kita melihat bagaimana bisnis dan industri komponen berkembang dengan pesat, termasuk berbagai kegiatan usaha yang berorientasikan ekspor.

5. Kualitas Pelayanan

Strategi Pengembangan Pelayanan Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal dari Provinsi Kaltara yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka

dalam analisis strategi pengembangan pelayanan ini akan diformulasikan dalam matriks analisis SWOT kemudian dilakukan pembobotan untuk mendapatkan rumusan strategi pelayanan. Secara umum diketahui bahwa penanaman modal asing khususnya yang berlokasi di negara berkembang, sering merasa khawatir akan begitu banyak resiko. Hal ini disebabkan oleh keadaan politik, sosial dan ekonomi negara-negara berkembang atau sedang berkembang yang belum stabil. Padahal, penanaman modal asing membutuhkan iklim yang kondusif sifatnya seperti rasa aman, tertib serta adanya suatu kepastian hukum atau jaminan hukum dari negara penerima modal. Berbagai permasalahan dan kendala yang muncul dalam penanaman modal akan menimbulkan ketidakpuasan antara kedua belah pihak. Untuk itu, peran pemerintah sangat diperlukan melalui suatu sistem kebijakan yang terarah dan dapat memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Pemerintah melalui departemen dalam negeri menindaklanjuti kebijakan itu dengan meluncurkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan pelayanan satu pintu. Peraturan Mendagri ini pada intinya meminta pemerintah daerah melakukan kegiatan seperti: penyederhanaan sistem dan prosedur perizinan usaha; pembentukan lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu di daerah; pemangkasan waktu dan biaya perizinan, perbaikan sistem pelayanan; perbaikan sistem informasi dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses penyelenggaraan perizinan. Berdasarkan kebijakan tersebut diterapkan strategi yang dipandang efektif untuk meningkatkan pelayanan perizinan ke dalam suatu sistem penyelenggaraan pelayanan perizinan ke dalam suatu sistem penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu.

Menurut Mustawani dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Pasal 4 ayat (2) butir b langkah

yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kaltara adalah menerapkan kebijakan yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kaltara pada salah satu program prioritas yaitu pembangunan pemerintah dengan fokus : memperbaiki dan menambah kapasitas pelayanan publik berbasis ICT untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel; meningkatkan mutu pelayanan satu titik (*One Stop Service*) dengan membuat mutu pelayanan (waktu, biaya dan kecepatan) masyarakat dan meningkatkan investasi daerah; meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program kinerja pemerintah provinsi; meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dalam melayani masyarakat dan pelaksanaan tugas pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan lebih lanjut secara berkesinambungan.

Provinsi Kaltara belum memiliki Peraturan Gubernur tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan penanaman modal terpadu satu pintu. Upaya-upaya yang dibangun untuk menarik investasi di Kaltara harus diikuti dengan jaminan kepastian hukum bagi kegiatan investasi. Kepastian hukum menurut undang-undang adalah jaminan pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan bagi setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kaltara dalam menarik investor asing, secara garis besar upaya tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, upaya umum dan khusus.

Upaya-upaya yang sifatnya umum yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kaltara yaitu menambah aktivitas kantor perwakilan Kaltara di Jakarta sekaligus sebagai tempat promosi, baik untuk berbagai hasil produksi kerajinan khas Kaltara maupun potensi bisnis dan investasi di Kaltara; disiapkannya gedung graha promosi investasi Kaltara yang bertujuan untuk mempercepat pelayanan bagi investor dan

mengurangi ekonomi biaya tinggi; meningkatkan upaya kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait; membuka informasi melalui beberapa kedutaan besar RI di luar negeri tentang potensi dan peluang investasi di Kaltara, sedangkan upaya-upaya khusus yang terus dilakukan pemerintah Kaltara dapat diuraikan di bawah ini:

Pertama, membuat peraturan-peraturan kebijakan yang tetap dan konsisten yang tidak terlalu cepat berubah dan dapat menjamin adanya kepastian hukum karena ketiadaan kepastian hukum akan menyulitkan perencanaan jangka panjang usaha mereka. *Kedua*, prosedur perizinan yang tidak berbelit-belit yang dapat mengakibatkan *high cost economy*. Pemerintah pusat sudah seharusnya membantu sungguh-sungguh upaya pemerintah daerah dalam menyederhanakan proses perizinan penanaman modal di daerah.

Secara teoritis, menurut Sinambela (2011) tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan tersebut dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari: Transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dimengerti dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kondisional, pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. Kesamaan hak, yaitu dalam memberikan pelayanan tidak membedakan dari aspek apapun terutama suku, agama, ras, status sosial, golongan dan lain-lain. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan penanaman modal terpadu satu pintu di Kaltara adalah bagian dari pelayanan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya kalangan dunia usaha. Pelayanan publik ini sendiri pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu merupakan badan yang berwenang di bidang pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu. Sebagai badan yang bertanggung jawab terhadap investasi di Provinsi Kaltara. Pelayanan perizinan ini diharapkan terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, transparan, pasti dan terjangkau, terwujudnya hak-hak penanam modal untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan serta terciptanya iklim investasi yang kondusif. *Keempat*, meningkatkan sarana/prasarana yang dapat menunjang terlaksananya investasi dengan baik. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung terus ditingkatkan Pemerintah Kaltara.

Meningkatkan Capaian Investasi bahwa strategi yang digunakan dalam upaya meningkatkan iklim invetasi adalah dari segi kajian potensi dan peluang investasi, strategi pelayanan perizinan, serta strategi promosi. Ketiga unsur itu sangat penting dalam mendukung tercapainya target realisasi investasi di Provinsi Kaltara. strategi yang dilakukan oleh DPMPSTP dalam upaya meningkatkan iklim investasi adalah dengan meningkatkan kajian investasi yakni dengan melakukan pemetaan wilayah-wilayah potensi dan peluang investasi yang ada di Provinsi Kaltara.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Provinsi Kaltara untuk menarik investor dari dalam dan luar negeri dari sisi pelayanan adalah sebagai berikut.

a. Penyederhanaan Prosedur Pelayanan.

Berikut merupakan Gambaran dan Penjelasan Inovasi Pelayanan Perizinan yang merupakan bagian dari strategi perbaikan prinsip pelayanan:

(1). Handal, Cakap, Inovatif (Hancapi)

Dengan mengadopsi Filosofi "Hancapi" dari bahasa daerah yaitu bahasa banjar yang memiliki arti "dipercepat", mengandung makna mempercepat pelayanan publik sehingga menimbulkan kepuasan dan meningkatkan kapasitas, kemampuan keterampilan aparatur pelayanan publik yang lebih sempurna. Sebelumnya pelayanan perizinan dikelola dengan proses manual namun kini sudah didukung dengan teknologi informasi sehingga ketepatan, kecepatan, kapasitas penyelesaian semua izin menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kaltara berinovasi dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat yang didukung dengan:

- a) Sistem Perizinan Berbasis Teknologi Informasi melalui SAP (Sistem Aplikasi Perizinan) diantaranya *SMS Center*, *E-IKM*, *E-Document*, dan *website PTSP*;
- b) Penyederhanaan Persyaratan perizinan melalui Sistem Izin Paralel; dan
- c) Inovasi hasil/output produk perizinan.

Dalam memberikan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel kepada masyarakat DPMPTSP memberikan inovasi pelayanan perizinan berbasis Teknologi Informasi melalui Sistem aplikasi perizinan diantaranya *SMS Center* yakni pengaduan berupa kritik, saran maupun pertanyaan yang dikirimkan kepada DPMPTSP melalui sms maupun *website*. Sementra itu *E-IKM* adalah *Elektronik Indeks Kepuasan*

Masyarakat yakni mengisi tingkat kepuasan pelayanan yang dirasakan oleh penerima pelayanan di DPMPTSP yang bisa di akses melalui website dan juga alat yang telah disediakan oleh DPMPTSP sendiri. Selanjutnya, *E-Document* atau Dokumen elektronik adalah dokumen perizinan yang bisa di download atau diunduh sendiri melalui website DPMPTSP tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan perizinan.

(2). Syaharie Jaang

Beberapa keunggulan dari inovasi *Smart Card Syaharie Jaang* adalah sebagai berikut :

- a) Mengurangi Keterlibatan Pihak Ketiga, diharapkan dari adanya *Smart Card* ini akan memudahkan dalam proses perpanjangan izin sehingga tidak lagi menggunakan jasa Calo atau pihak ketiga. Kemudahan yang diperoleh dengan adanya kartu syaharie jaang diharapkan mampu mengurangi penggunaan jasa calo. Penggunaan kartu *syaharie jaang* sangat mudah yakni dengan membawa kartu dan proses perpanjangan izin usaha akan segera dilakukan dalam waktu satu hari dan dapat langsung dibawa pulang. Berbeda dengan sebelum adanya *Smart Card* dimana harus membawa berkas yang cukup banyak dan memakan waktu yang cukup lama.
- b) Memangkas Birokrasi Administrasi Perizinan
- c) Mendapatkan Fasilitas Perpanjangan Izin Satu Hari Langsung Dapat di Bawa Pulang
- d) Mendapatkan Kartu “Smart Card”

- e) Mendapatkan Fasilitas Layanan mudah dengan hanya menunjukkan kartu Smart Card izin perpanjangan berikutnya langsung dapat diproses tanpa membawa berkas.

(3). SMS (*Sunday Morning Service*)

Adapun keunggulan dari Inovasi SMS (*Sunday Morning Service*) :

- a) Mengurangi Keterlibatan Pihak Ketiga, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah bahwa dengan adanya program SMS ini akan mampu memberikan kemudahan dalam bentuk adanya jam kerja pelayanan diluar jam kerja sehingga masyarakat pelaku dunia usaha bisa mengurus sendiri izin usaha maupun perpajakan usaha secara mandiri tanpa menggunakan pihak ketiga atau biasa disebut Calo.
- b) Memanfaatkan waktu libur hari minggu bagi yang tidak sempat mengurus izin ke DPMPTSP Provinsi Kaltara dihari kerja.
- c) Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
- d) Mempermudah dalam mendapatkan pelayanan perizinan
- e) Mendaftar, mengisi berkas permohonan dan mengambil izin yang sudah terbit cukup dilokasi pelayanan “SMS”
- f) Mempermudah Akses Informasi langsung dalam pelayanan Perizinan di DPMPTSP Provinsi Kaltara.

Pengembangan Aplikasi Perizinan Berbasis Teknologi Informasi Berikut ini adalah target dan realisasi mengenai pemanfaatan sistem informasi di DPMPTSP, dimana sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut: (1) Pengelolaan data, informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik. (2) Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dapat diakses secara mudah oleh masyarakat diseluruh wilayah Provinsi Kaltara (3) Media Komunikasi yang mudah dijangkau secara

interaktif. Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltara, Teknologi Informasi yang telah di implementasikan yakni : (a) Pelayanan Berbasis Teknologi informasi dan (b) Memiliki *Website* perizinan ini juga menampilkan berbagai informasi perizinan yang dapat diakses secara langsung (*on-line*) melalui internet oleh masyarakat dan tersedianya fasilitas untuk download formulir pendaftaran. (c) Telah memiliki Model Pengarsipan secara elektronik (*E-Document*). (d) Telah memiliki Sistem Pelayanan yang berbasis Data Base serta (e) Memiliki Layanan informasi melalui (*SMS Center*) untuk *status report* poses perizinan dan informasi yang berkaitan.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa telah ada capaian yang di dapatkan dalam pengembangan aplikasi pelayanan perizinan yang dimana tujuan pengembangan aplikasi perizinan ini untuk terus mempermudah pelayanan perizinan di DPMPTSP Provinsi Kaltara. Capaian-capaian yang telah didapatkan tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik dari para investor dalam hal pelayanan perizinan di Provinsi Kaltara. Sementara itu untuk melihat realisasi yang dirasakan oleh masyarakat pelaku dunia usaha selaku penerima layanan penulis melakukan wawancara dengan beberapa pelaku dunia usaha terkait dengan pengembangan aplikasi yang dijalankan oleh DPMPTSP.

Dari hasil wawancara yang didapatkan menjelaskan bahwa kemudahan dalam mengakses dokumen-dokumen seperti formulir pendaftaran melalui website sangat mudah dan sangat membantu sehingga tidak perlu lagi harus ke kantor untuk mengambil formulir karena dapat di *download* sendiri. Namun, informasi yang di masukkan kedalam website DPMPTSP dinilai kurang *up date*. Informasi yang dinilai kurang terbaru mengurangi kepuasan pengguna layanan terutama pada *website* DPMPTSP.

Agenda-agenda strategi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kaltara antara lain: (i) merumuskan kebijakan investasi di bidang sumber daya manusia; (ii) meningkatkan cara promosi; dan (iii) memperbaiki dukungan dan pelayanan birokrasi (*one-roof system* atau *one-stop shop*); (iv) mengembangkan promosi daerah; (v) mengembangkan kemitraan (*partnership*); (vi) mengembangkan regional management; (vii) mengembangkan *business networking*; dan (viii) mempertajam strategi belanja publik (Salim, 2010). Kegiatan investasi diharapkan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, kehadirannya mampu berperan sebagai motor penggerak dan sekaligus menjadi pendorong percepatan (akselerasi) pembangunan secara luas.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltara harus melakukan upaya khusus untuk menarik investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Upaya khusus yang dilakukan Pemerintah Kaltara adalah strategi meningkatkan iklim investasi sebagai berikut.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia berupa tenaga kerja masih perlu pembenahan melalui pelatihan dan peningkatan kualitas pendidikan di Kaltara.

2. Promosi

Pemerintah Provinsi Kaltara telah melakukan berbagai promosi investasi baik di dalam negeri dan luar negeri, seperti menyelenggarakan seminar dan pertemuan forum investasi yang berpengaruh positif terhadap meningkatnya investasi di Kaltara

3. Pengembangan infrastruktur daerah

Pemerintah Provinsi Kaltara berupaya untuk melakukan percepatan pembangunan di bidang pembangunan infrastruktur yang menunjang investasi daerah.

4. Sistem Informasi Berbasis IT/Internet

Pemerintah Provinsi Kaltara telah menggunakan sistem informasi berbasis IT baik melalui website maupun aplikasi.

5. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan perizinan sudah cukup baik, Pemerintah Provinsi Kaltara melakukan berbagai terobosan demi menarik investasi baik di dalam maupun luar negeri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Sumber Daya Manusia

Pemerintah Provinsi Kaltara perlu memberikan pelatihan kepada para pegawainya sehingga kompetensi pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2. Promosi

Membuat kegiatan promosi secara berkala dan berkelanjutan dalam lingkungan DPMPTSP serta membuat media informasi potensi investasi di lokasi-lokasi strategis seperti bandara-bandara di lingkungan Kaltara dan promosi investasi melalui kedutaan besar di negara-negara sahabat Indonesia.

3. Pengembangan infrastruktur daerah

Pemerintah Provinsi Kaltara perlu terus melakukan pemantauan terhadap setiap infrastruktur yang akan dibangun.

4. Sistem Informasi Berbasis IT/Internet

Memasukan konten potensi investasi dalam website DPMPTSP agar para pelaku dunia usaha tidak hanya sekedar mendapatkan informasi pelayanan perizinan, tetapi juga informasi peluang usaha yang ada di Provinsi Kaltara.

5. Kualitas Pelayanan

Terus dilakukannya reformasi pelayanan publik serta peningkatan keamanan dan kenyamanan usaha di lingkungan Kaltara, termasuk upaya-upaya penciptaan iklim investasi melalui serangkaian kebijakan yang dapat menekan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) melalui berbagai kemudahan, pengurangan atau penghapusan pungutan dan biaya-biaya perijinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angus and Robertson. *Direct Foreign Investment in Asia and The Pacific*. Canberra: Australian National University Press. Published in South-East Asia (Singapore), 1972.
- Anoraga, Pandji. 2011. *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*. Jakarta: Dunia Pustaka
- Aulia, 1994. Universitas Sumatera Utara Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Jaya, 2010. Center for Regulatory Research (Pusat kajian Regulasi). *Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal. Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP)*.
- HS. Salim dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Ilmar, Aminuddin. 2006. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group
- Mairuddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Margono, Suyud. 2010. *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Alternative Dispute Resolutions (ADR): Teknik dan Strategi dalam Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Miles, Mathew dan A. Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Nasution, Asmin. 2008. *Transparansi dalam Penanaman Modal*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Radjagukguk, Erman. 2006. *Hukum Investasi di Indonesia*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rakhmawati, Rosyidah. 2004. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Globalisasi*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Sembiring, Sentosa. 2009. *Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Bandung: CV Nuansa
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. CV Alfabeta, Bandung.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2007. *Manajemen Publik*. Grasindo. Jakarta.

Artikel

- Adereiny, Aurora. 2012. Strategi Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Riau dalam Meningkatkan Investasi di Provinsi Riau Tahun 2009 – 2011.
- Dama, Melati, dkk. 2017. *Strategi Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Meningkatkan Iklim Investasi di Kota Samarinda*. eJournal Ilmu Pemerintahan, 20017, 6(1): 501-514. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unmul.
- Enggarani, Nuria. 2016. *Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali*. Jurnal Law and Justice Vol 1 No. 1 Maret 2016. Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Sumatera.
- Febliany, Imelda, dkk. 2014. *Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Penyerapan Investasi Di Kalimantan Timur (Studi Pada Badan Perijinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur)*. Jurnal Administrative Reform, Vol.2 No.3, September 2014
- Indayati, Dwi. 2015. *Keefektifan Program Paket Perizinan Online dalam Meningkatkan Pelayanan Perizinan Investasi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X. Volume 3, Nomor 3, September - Desember 2015. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga.
- Ismayanti, Leny. 2015. *Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Malang*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4 No.2 (2015). Program Magister Ilmu Administrasi Publik. Universitas Brawijaya.
- Marantika, George. -. *Strategi Promosi Investasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Fakultas Ekonomi*. Universitas Kristen Immanuel (UKRIM).
- Ma'ruf, Ahmad. 2010. *Strategi Pelayanan Penanaman Modal*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 11, Nomor 1 April 2010, hlm 20-29. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Putri, Mega. 2016. *Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Investasi di Kabupaten Cirebon Tahun 2015*. Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP. UNDIP.
- Suhendra, Adi. 2017. *Pro Investasi dalam Meningkatkan Investasi Daerah di Kabupaten Boyolali*. Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi Vol.6 No.1 Juni 2017 : 15-30
- Susiloadi, Priyanto. 2017. *Manajemen Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pelayanan Perizinan di Kota Surakarta*.

Jurnal Wacana Publik Vol 1 N 1 2017 Hal 1-10. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret.

- Aiken, L.R. dan Groth-Marnat, G. (2006). *Psychological Testing and Assessment*. 12th edition. Boston: Pearson Education Group, Inc.
- Aldiss, S., dkk. (2009). What is Important to Young Children Who Have Cancer While in Hospital. *Children & Society*, vol.23, 85-98. (ON LINE), <http://web.ebscohost.com/ehost>, 23 November 2010.
- Cozby, P.C. (2005). *Methods in Behavioral Research*. 9th edition. New York: McGraw-Hill International Edition.
- Baswardono, D. (2010). *Pendidikan Karakter Di Rumah*. Konferensi Nasional dan Workshop Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia. Malang: Universitas Negeri Malang
- Berk, L. (2006). *Child Development*. 7th edition. Boston: Pearson Education, Inc.
- Bordens, K. S. dan Abbott, B. (2005). *Research Design and Methods: A Process Approach*. 6th edition. New York: McGraw-Hill.
- Columbia Electronic Encyclopedia. (2010). Puppet. 6th Edition. Academic Source Premier.(ON LINE), <http://web.ebscohost.com/ehost>, 23 November 2010.
- Eastwood, L., dkk. (2009). *A Tool Kit for Creative Teaching In Post Compulsory Education*. London: McGraw-Hill Open University Press.
- Forty Years of Sweeping the Clouds Away. (2009). Sesame Street. (ON LINE), <http://www.sesamestreet.org>, 23 November 2010.
- Gea, A.A., Wulandari, A.P.Y, dan Babari, Y. (2002). *Relasi dengan Sesama Character Building II*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Goldstein, J.H. (1994). *Toys, Play, and Child*. New York: Cambridge University Press
- Nugiyantoro, B., dkk. (2004). *Statistik Terapan Untuk Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Papalia, D.E., Olds, S.W. dan Feldman, R.D. (2007). *Human Development*. 10th edition. New York : McGraw Hill. International Edition.
- Santrock, J.W. (2008). *Psikologi Pendidikan*. Edisi ke-2. Jakarta: Kencana Media Group.

Shaugnessy, J.J., dkk. (2000). *Research Methods in Psychology*. 5th edition. Boston MA:McGraw-Hill Higer Education.

Sofer, A. (2003). *The Stage Life of Props*. Ann Arbor: University of Michigan Press.





**Penulis sedang mewancarai Pj. Sekretaris Daerah Provinsi
Kalimantan Utara, Bapak Ir. H. Syaiful Herman, M.A.P.**



Penulis sedang mewancarai Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara,
Bapak Risdianto, S.Pi., M.Si.



**Penulis sedang mewancarai Kepala Bagian Ekonomi pada Biro
Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara,
Ibu Nurdiana, S.Pi.**



Renuis sedang mewancarai Bapak Buyung (PT. Citra Sawit Lestari)



Penulis sedang mewancarai pengusaha perempuan
Ibu Hj. Bambang

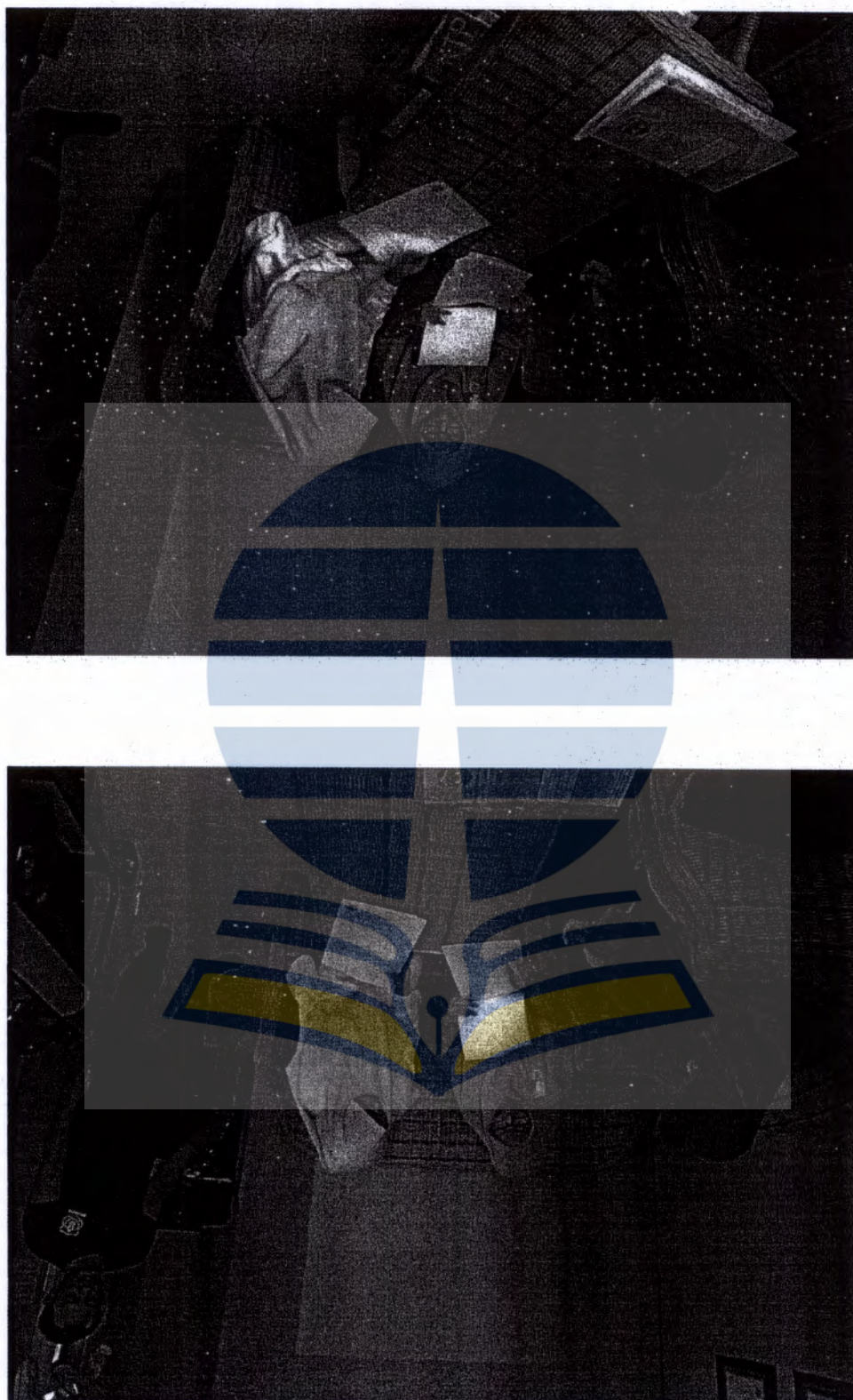


**Penulis sedang mewancarai Kepala Seksi Perijinan pada DPMPRTSP
Provinsi Kalimantan Utara Ibu Lidy, S.E.**



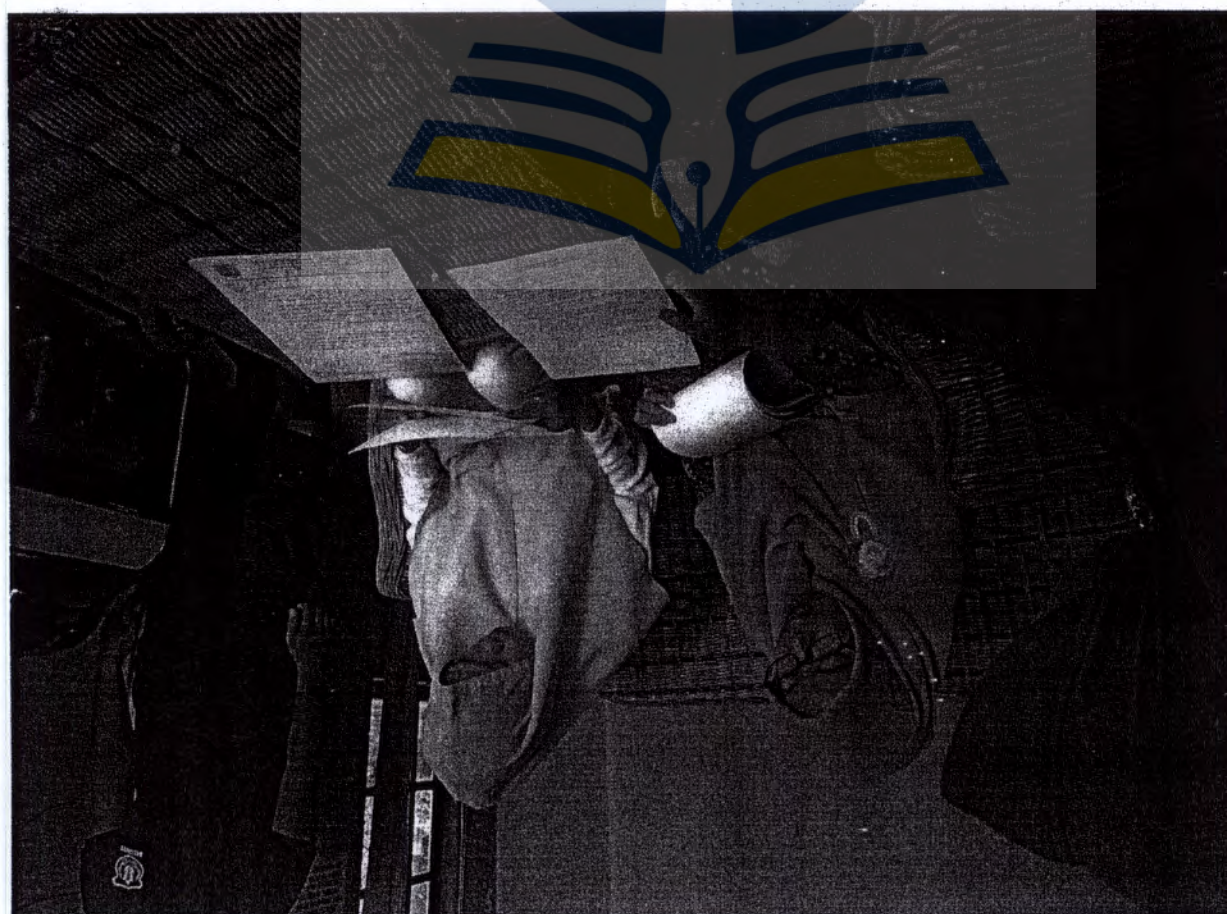
Penulis sedang mewancarai peternak sapi, Bapak Zulkarnaen





DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PT. KAYAN LESTARI

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

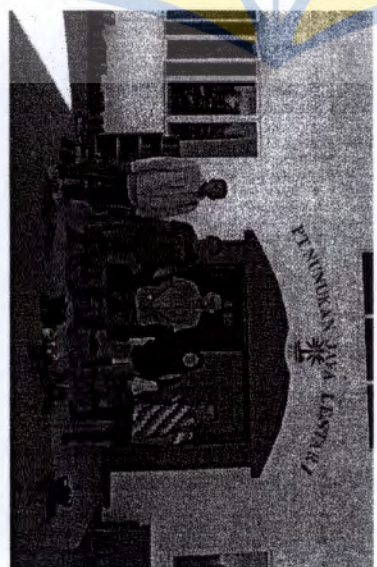
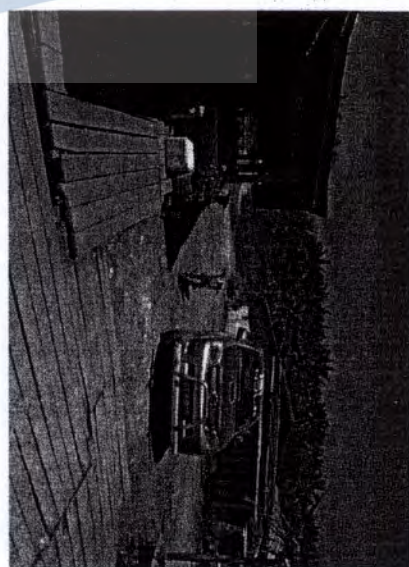
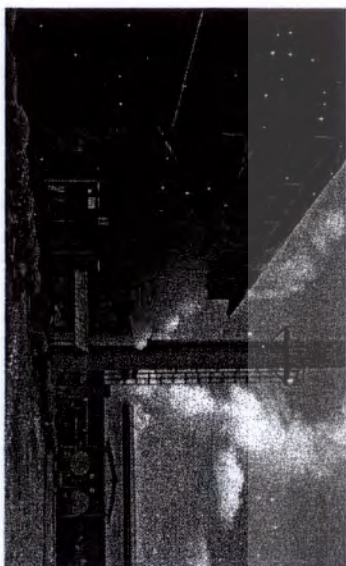




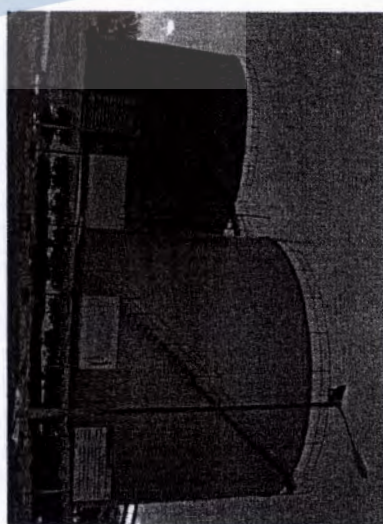
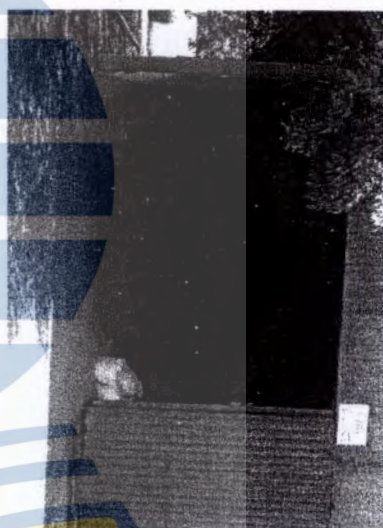
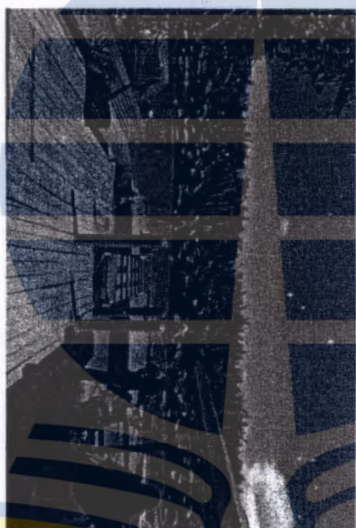
DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PT. NUNUKAN JAYA LESTARI

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

DOKUMENTASI PENINJAUAN KE PT. NUNUKAN JAYA LESTARI



DOKUMENTASI PENINJAUAN KE PT. NUNUKAN JAYA LESTARI



DOKUMENTASI PENINJAUAN KE PT. KARYA JAYA INDAH DI KABUPATEN MALINAU



DOKUMENTASI PENINJAUAN KE PT. PERSADA KENCANA PRIMA DI KABUPATEN TANA TIDUNG

